



Jurnal

Yudhagama

Media Informasi dan Komunikasi TNI AD

**Penguatan Binter Dalam Mendukung
Tugas Pemerintah Daerah**



**NETRALITAS, PROFESIONALISME PRAJURIT,
KEMANUNGGALAN TNI-RAKYAT
DALAM PEMILU 2014**



Apel Konsolidasi, Gelar Pasukan dan Latihan Sispamkota dalam rangka mendukung Operasi Mantap Brata Progo 2014 di Sleman, 7 Februari 2014



6

**Netralitas, Profesionalisme
Prajurit, Kemanunggalan
TNI-Rakyat Dalam Pemilu 2014**
Oleh: Mayjen TNI Istu Hari S,
S.E., M.M.



14

**Profesionalitas TNI AD
Dalam Menyikapi Tahun
Politik 2014**
Oleh: Mayjen TNI Bambang
Budi Waluyo. YP



24

**Profesionalitas TNI AD
Dalam Menyikapi Tahun
Politik 2014 di Wilayah**
Oleh: Mayjen TNI Dedi Kusnadi
Thamim



30

**Penguatan Binter Dalam
Mendukung Tugas
Pemerintah Daerah**
Oleh: Mayjen TNI Bachtiar,
S.IP, M.AP



40

**Profesionalitas TNI AD
Dalam Menyikapi
Tahun Politik 2014 di Wilayah**
Oleh: Mayjen TNI Wisnu Bawa
Tenaya



46

**Profesionalisme dan Netralitas
Prajurit Kodam XVI/Ptm
Menghadapi Tahun Politik 2014**
Oleh: Mayjen TNI Eko Wiratmoko



54

**Peranan Kodam Jaya
Dalam Mensukseskan
Pemilu 2014**
Oleh: Mayjen TNI E.
Hudawi Lubis



61

**Profesionalisme TNI AD
Dalam Menyikapi Tahun Politik
2014 di Wilayah Aceh**
Oleh: Mayjen TNI Pandu Wibowo,
SE



66

**Sebuah Pendapat Tentang :
Netralitas Prajurit TNI AD
Pada Pemilu 2014**
Oleh: Mayjen TNI Dody Usodo
Hargo.S., S.IP., MM

Kata Pengantar

Susunan Redaksi



Jurnal
Yudhagama
Media Informasi dan Komunikasi TNI AD

PELINDUNG : Kepala Staf TNI Angkatan Darat
PEMBINA : Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Darat
PENASEHAT : Irjenad, Aspam Kasad, Asops Kasad,
Aspers Kasad, Aslog Kasad, Aster Kasad, Asrena Kasad,
Kasahli Kasad.

PEMIMPIN REDAKSI :
Brigjen TNI Andika Perkasa

WAKIL PEMIMPIN REDAKSI :
Kolonel Arm Gatot Eko Puruhito, S.E., MM.

DEWAN REDAKSI :
Kolonel Czi Kuat Raharjo
Kolonel Caj Drs. Moh. Noor, MM.
Kolonel Inf Drs. Zaenal Mutaqim, M.Si.
Kolonel Inf Mu'tamar

KETUA TIM EDITOR :
Kolonel Czi Andi Kaharuddin, S.IP.

SEKRETARIS TIM EDITOR :
Letkol Inf Drs. N. Ertoto, M.Si.

ANGGOTA TIM EDITOR :
Letkol Caj Drs. James W. Sondakh
Mayor Caj (K) Yeni Triyeni, S.Pd.
Mayor Inf Dodi Fahrurrozi, S.Sos.
Mayor Inf Supriyatno
Kapten Inf Candra Purnama, SH.

DISTRIBUSI :
Mayor Inf Adrizal Mias, S.H.

DESAIN GRAFIS :
Serka Enjang

TATA USAHA :
Peltu (K) Ety Mulyati, Pratu Rifai, PNS Listin A.

REDAKTUR FOTO :
Mayor Inf Abidin Tobba, SE., M.Si.

ALAMAT REDAKSI :
Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat
Jl. Veteran No. 5 Jakarta Pusat Tlp. (021) 3456838,
3811260, Fax. (021) 3848300,
Alamat email : palaganyudhagama@gmail.com



Cover :
**TNI AD Bantu Distribusi
Logistik Pemilu di Daerah**

Menyikapi Tahun Politik 2014

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kemampuan untuk melaksanakan berbagai penugasan untuk bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai bersama. Pada edisi Jurnal Yudhagama Volume 34 Nomor 1 Maret 2014, redaksi mengangkat

informasi yang hangat dan aktual terkait dengan tahun politik 2014 yaitu pesta demokrasi Pemilihan Umum untuk memilih calon Legislatif dan Presiden serta Wakil Presiden. Adapun tema tulisan yang kami sajikan kali ini adalah Profesionalitas TNI Angkatan Darat dalam Menyikapi Tahun Politik 2014 di Wilayah, yang merupakan tulisan dari beberapa Perwira Tinggi TNI AD.

Berkaitan dengan profesionalisme dan netralitas TNI dalam Pemilu 2014, dibahas oleh Mayjen TNI Istu Hari S, S.E., M.M Pangdam I/BB. Dikatakannya bahwa sejalan dengan meningkatnya kesadaran politik masyarakat di era demokrasi ini, secara langsung maupun tidak langsung telah membawa pengaruh pada pandangan prajurit TNI tentang hak politiknya sebagai warga negara.

Pelaksanaan Pemilu 2014 merupakan wujud pembangunan demokrasi, namun dalam pelaksanaannya sering terjadi persaingan yang tidak sehat bahkan cenderung menjatuhkan, terkait dengan hal itu, Mayjen TNI Bambang Budi Waluyo.YP, Pangdam II/Swj mengatakan bahwa secara etis, dinamika politik di Indonesia saat ini relatif belum terlaksana dengan baik dan atau seideal mungkin.

Penggunaan kekuatan TNI AD baik itu dalam bentuk peran, sumbang pikir dan kegiatannya seyogianya dapat diarahkan kepada kenyamanan & keamanan masyarakat. Dalam hal ini TNI AD mempunyai cara yang tepat untuk mengimplementasikannya, yaitu dengan menggunakan konsep Pembinaan Teritorial. Hal itu diulas oleh Mayjen TNI Dedi Kusnadi Thamim, Pangdam III/Slw.

Selanjutnya ulasan peran TNI khususnya Satkowil mempunyai peranan yang penting dalam membantu Pemerintah Daerah dalam mewujudkan harmonisasi di wilayah, Mayjen TNI

Bachtiar, S.IP, M.AP. Pangdam VII/Wrb, mengatakan bahwa dinamika perkembangan tata kehidupan masyarakat dewasa ini berkembang dengan sangat pesat dan membawa dampak kepada perubahan sikap perilaku masyarakat tidak hanya di lingkup nasional, namun juga telah merambah sampai di tingkat lokal provinsi dan pedesaan. Masih berkaitan dengan netralitas prajurit, Mayjen TNI Wisnu Bawa Tenaya, Pangdam IX/Udy mengulasnya bahwa setiap prajurit harus memiliki komitmen dan kontribusi yang sangat positif di dalam mengawal jalannya pesta demokrasi di Indonesia.

Sikap netral dan tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis bagi TNI/TNI Angkatan Darat merupakan jaminan pertaruhan terhadap tetap tegaknya NKRI. Mayjen TNI Eko Wiratmoko, Pangdam XVI/Ptm mengulasnya dalam tulisannya yang berjudul Profesionalitas dan Netralitas Prajurit Kodam XVI/PTM Menghadapi Tahun Politik 2014.

Tahun politik 2014, menyajikan tantangan tersendiri bagi TNI, keberhasilan atau kegagalan dalam pengamanan Pemilu bukan satu-satunya dimensi yang dinilai publik. Lebih dari itu, apresiasi dan kepercayaan publik akan muncul manakala TNI mampu menjaga dan memegang teguh komitmen. Hal tersebut diulas oleh Mayjen TNI E. Hudawi Lubis

Pangdam Jaya, dengan judul tulisan Peranan Kodam Jaya Dalam Menyukseskan Pemilu 2014.

Ulasan lain mengenai netralitas TNI Angkatan Darat pada Pemilu 2014 juga dibahas oleh Mayjen TNI Pandu Wibowo, SE, Pangdam Iskandar Muda. Menurutnya Netralitas TNI sejatinya adalah merupakan kehendak rakyat Indonesia yang telah diamanatkan dalam Undang Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI. Disamping itu netralitas TNI juga merupakan wujud nyata dari TNI bahwa TNI benar-benar tidak masuk dalam ranah politik praktis.

Diakhir tulisan kami sajikan pandangan Wadan Kodiklatad, menurutnya Prajurit TNI AD tidak bersikap pasif dalam netralitasnya menghadapi Pemilu 2014, tetapi harus tetap melaksanakan tugas dan fungsinya agar proses demokrasi tetap berlangsung secara aman, tertib, dan lancar di wilayah tanggung jawab teritorialnya masing-masing.

Akhirnya, segenap redaksi Jurnal Yudhagama mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tulus atas sumbangan pemikiran berbentuk tulisan kepada redaksi dan kami yakin hal ini akan sangat bermanfaat bagi segenap pembaca setia Jurnal Yudhagama khususnya prajurit TNI Angkatan Darat.

Selamat membaca !

Redaksi

Jurnal Yudhagama sebagai media komunikasi internal TNI Angkatan Darat, mengemban misi:

- a. Menyebarluaskan kebijakan Pimpinan TNI Angkatan Darat kepada seluruh prajurit di jajaran TNI Angkatan Darat.
- b. Memberikan wadah untuk pemikiran-pemikiran yang konstruktif dalam pembinaan TNI Angkatan Darat dan fungsi teknis pembinaan satuan sesuai tugas pokok TNI Angkatan Darat sebagai kekuatan pertahanan negara matra darat.
- c. Menyediakan sarana komunikasi untuk penjabaran Kemanunggalan TNI-Rakyat.

Tulisan yang dimuat dalam Jurnal Yudhagama ini merupakan pandangan pribadi penulisnya dan bukan pandangan resmi TNI Angkatan Darat, namun redaksi berhak merubah tulisan (*rewrite*) tanpa mengubah inti tulisan untuk disesuaikan dengan misi yang diemban Jurnal Yudhagama dan kebijakan Pimpinan TNI Angkatan Darat. Redaksi menerima tulisan dari dalam maupun dari luar lingkungan TNI Angkatan Darat, dengan syarat merupakan tulisan asli dari penulis.

Topik dan judul tulisan ditentukan oleh penulisnya, dengan ketentuan panjang tulisan berkisar sepuluh halaman kertas folio, dengan jarak satu setengah spasi.

NETRALITAS, PROFESIONALISME PRAJURIT, KEMANUNGGALAN TNI-RAKYAT DALAM PEMILU 2014



Oleh: Mayjen TNI Istu Hari S, S.E., M.M.
(Pangdam I/Bukit Barisan)

“Jangan mudah tergelincir dalam saat yang akan menentukan nasib bangsa dan negara kita, seperti yang kita hadapi pada dewasa ini, fitnah yang besar atau halus, tipu muslihat yang keras atau yang lemah, provokator yang tampak atau sembunyi, semua itu insya Allah dapat kita lalui dengan selamat, kalau saja kita tetap awas dan waspada, memegang teguh pendirian cita-cita, sebagai patriot Indonesia yang sejati”.
(Jenderal Besar Sudirman)

Pendahuluan.

Reformasi yang terjadi pada tahun 1998 telah membawa perubahan mendasar terhadap sistem ketatanegaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia ke arah kehidupan nasional yang demokratis. Kehidupan demokrasi yang ingin dibangun bersama-sama dengan seluruh komponen

bangsa lainnya diharapkan dapat mewujudkan sebuah tatanan dan sistem kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang aman dan sejahtera. Hal tersebut sesuai dengan cita-cita reformasi yang salah satu agendanya adalah lebih diarahkan untuk mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat. Berbagai upaya perwujudan cita-cita reformasi secara bertahap telah berhasil dan terbukti, hal tersebut dapat dilihat dari terselenggaranya Pemilihan Umum 2004 dan Pemilihan Umum 2009 yang demokratis tanpa adanya intervensi dari pihak manapun serta mendapatkan pengakuan masyarakat dunia.

Menjelang pelaksanaan pesta demokrasi yaitu pemilu 2014 baik legislatif pada bulan April maupun pemilihan Presiden pada bulan Juli yang akan datang maka mulai ramai dibicarakan oleh masyarakat terkait dengan hak pilih TNI. Bila mencermati proses pembahasan Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 sampai ditetapkannya menjadi Undang-Undang Pemilu pada tanggal 16 Oktober 2011. Maka terkait dengan hak memilih dan dipilih anggota TNI sama sekali tidak dimasukkan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 dan Undang-Undang 34 Tahun 2004 tentang TNI sesungguhnya sudah memberikan gambaran tentang posisi TNI terhadap penyelenggaraan Pemilu 2014.

Namun demikian persoalan hak pilih TNI memang tidak mudah untuk dipahami oleh masyarakat luas, masih banyak pro dan kontra di kalangan masyarakat sehingga perlu kehati-hatian dalam memberikan penjelasan, mengingat masalah ini dapat dijadikan peluang bagi pihak pihak yang menginginkan TNI terkotak-kotak dan akan berdampak negatif terhadap proses reformasi internal yang terus dijalankan oleh TNI pasca reformasi 1998.

Terkait dengan penjelasan di atas, maka pembahasan tulisan ini diarahkan pada komitmen TNI dengan sikap netralitasnya pada tahun politik 2014 demi menjaga profesionalisme dan Kemanunggalan TNI-rakyat dalam Pemilu 2014.

Netralitas TNI.

Menjelang pelaksanaan Pemilu 2014 masih ada beberapa pengamat politik yang meragukan netralitas TNI. Keraguan yang tidak beralasan muncul sebagai akibat kurangnya pengertian dan pemahaman akan peran TNI sebagai alat pertahanan Negara sebagaimana tercantum dalam UU TNI No. 34 tahun 2004. Masih berkembangnya wacana di lingkup elit politik tentang hak politik Prajurit TNI selaku Warga Negara Indonesia yang mempunyai kedudukan dan hak yang sama selaku warga negara khususnya tentang penggunaan hak pilih dan hak dipilih pada Pemilihan Umum. Wacana tersebut tentunya mengundang pro dan kontra di kalangan masyarakat, bagi masyarakat yang bersikap pro mempunyai argumentasi bahwa hak pilih dan hak dipilih pada Pemilihan Umum merupakan hak politik setiap warga negara, sedangkan bagi masyarakat yang bersikap kontra telah berpendapat bahwa pemberian hak pilih dan hak dipilih bagi prajurit TNI dapat membahayakan integritas, profesionalitas, netralitas dan soliditas TNI yang muaranya akan berdampak pada keutuhan dan keselamatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, terutama bila dihadapkan dengan kondisi bangsa yang sampai saat ini masih larut dengan euforia reformasi.

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI, 2000;780) kata **Netral** mengandung arti **tidak berpihak** (tidak ikut atau tidak membantu salah satu pihak) dan kata netral dapat juga berarti tidak terikat. Ditinjau dari aspek Perundang-undangan Republik Indonesia, Instruksi dan Kebijakan Panglima TNI yang terkait tentang netralitas TNI dalam Pemilu telah dijelaskan dalam undang undang.

Dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak ada satu pasal pun dalam undang undang tersebut yang menyinggung tentang hak pilih dan hak dipilih bagi prajurit TNI.

Undang Undang Republik Indonesia nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI Pasal 39 telah mengamanahkan bahwa "Prajurit TNI dilarang terlibat dalam :

- 1) kegiatan menjadi anggota partai politik;
- 2) kegiatan politik praktis;
- 3) kegiatan bisnis, dan
- 4) kegiatan untuk dipilih menjadi anggota legislatif dalam pemilihan umum dan jabatan politis lainnya".





Pasal 39 ini telah cukup tegas menyatakan bahwa seluruh prajurit TNI tidak melakukan kegiatan politik praktis dan partisan partai politik serta memegang teguh komitmen netralitas TNI.

Instruksi Panglima TNI Nomor Ins/1/VIII/2008 tanggal 28 Agustus 2008 tentang Pedoman Netralitas TNI dalam Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Kepala Daerah. Instruksi Panglima TNI tersebut ditindaklanjuti dengan penerbitan Buku Saku tentang Netralitas TNI yang diperuntukkan bagi prajurit TNI dan PNS yang berisikan tentang pedoman netralitas TNI dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Umum Kepala Daerah, dan Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/33/2014 tanggal 15 Januari 2014 yang berisikan penekanan :

Pertama, setiap prajurit TNI baik selaku perorangan maupun atas nama institusi dilarang untuk memberikan bantuan dalam bentuk apapun kepada peserta Pemilihan Umum dan Pemilihan Umum Kepala Daerah, baik Partai Politik atau perseorangan; **Kedua**, tidak melakukan tindakan dan/atau pernyataan apapun yang bersifat memengaruhi kepada KPU/KPUD dan/atau Panwaslu/Panwasda; **Ketiga**, tidak memberikan komentar, penilaian dan mendiskusikan serta memberikan arahan apapun baik terhadap identitas maupun kualitas salah satu Partai Politik atau perseorangan peserta Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah; **Keempat**, setiap prajurit TNI baik perorangan maupun institusi dilarang menyambut, mengantar kontestan peserta pemilihan umum termasuk memobilisasi

organisasi sosial, agama dan ekonomi; **Kelima**, tidak menyimpan, menempel dokumen, atribut dan benda lain milik peserta Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah; **Keenam**, tidak berada di arena tempat penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Umum Kepala Daerah, berada di TPS dan tidak terlibat kegiatan dalam bentuk kampanye; **Ketujuh**, setiap prajurit baik perorangan maupun institusi wajib untuk selalu mewaspadai setiap perkembangan situasi di lingkungannya serta melaksanakan temu cepat dan lapor cepat secara hierarki apabila ada kejadian atau kegiatan yang berindikasi mengarah kepada menghambat, mengganggu atau menggagalkan Pemilihan Umum Pemilihan Umum Kepala Daerah; dan **Kedelapan**, setiap Pimpinan/Komandan/Atasan berkewajiban untuk memberikan pemahaman tentang Netralitas TNI dengan memedomani buku Netralitas TNI tahun 2008 kepada Anggota/Bawahannya dan bertanggung jawab atas pelaksanaannya di lapangan.

Sementara menurut **Marko Brown**, pada tulisannya tentang “Netralitas TNI jangan diragukan” yang diterbitkan di Media Kompasiana tanggal 17 Januari 2014 mengatakan bahwa “TNI telah menunjukkan jati dirinya sebagai Tentara Rakyat, Tentara Pejuang, Tentara Nasional dan Tentara Profesional dimana TNI dalam setiap pelaksanaan tugasnya telah menunjukkan pengabdian yang sangat besar bagi bangsa dan Negara Indonesia. TNI tidak melaksanakan politik praktis, ini ditunjukkan dengan netralitas TNI dalam setiap pelaksanaan Pemilu yang diadakan selama ini. TNI dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara, hal ini sudah jelas bahwa Netralitas TNI tidak perlu diragukan lagi”.

Berdasarkan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu, Undang Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI dan Instruksi Panglima TNI Nomor INS/1/VIII/2008 tentang Pedoman Netralitas TNI sesungguhnya sudah memberikan gambaran yang cukup tegas tentang posisi TNI terhadap Pemilu 2014.

Bahkan Presiden RI pada Rapim TNI-Polri tahun 2014 juga memberi penekanan tentang Netralitas TNI dalam Pemilu 2014 dimana tugas dan kewajiban TNI adalah memastikan agar pemilu dapat berlangsung tertib dan aman sehingga Pemilu dapat berjalan sukses yaitu Pemilu yang demokratis, jujur dan adil.

Dengan demikian maka sudah tepatlah kebijakan dan pernyataan Panglima TNI bahwa Netralitas TNI merupakan “**Harga Mati**” yang tidak bisa ditawar-tawar lagi oleh siapapun dan itu berlaku sepanjang masa.

Profesionalisme Prajurit.

Implementasi perwujudan profesionalitas dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi TNI dihadapkan dengan netralitas TNI pada pemilihan umum belum semuanya dapat dipahami oleh prajurit TNI terutama dalam penggunaan hak pilih dan hak dipilih. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI khususnya pada Pasal 2 tentang jati diri TNI yaitu Tentara Rakyat, Tentara Pejuang, Tentara Nasional dan Tentara Profesional. Mencermati bunyi pasal 2 tersebut khususnya tentang jati diri TNI sebagai tentara profesional terkandung maksud bahwa tentara yang profesional adalah tentara yang mahir menggunakan peralatan militer, mahir bergerak, mahir menggunakan alat tempur serta mampu melaksanakan tugas secara terukur dan memenuhi nilai nilai akuntabilitas.

Oleh sebab itu, tentara perlu dilatih dalam menggunakan senjata dan peralatan militer lainnya dengan baik, dilatih teknik dan taktik bertempur serta manuver strategi secara baik, dididik dalam ilmu pengetahuan dan teknologi yang mendukung pelaksanaan tugas pokok secara baik, dipersenjatai dan dilengkapi dengan baik, serta kesejahteraan prajuritnya dijamin oleh negara.

Sedangkan dalam Doktrin TNI Tridharma Ekakarma (TRIDEK) yang disahkan dengan Peraturan Panglima TNI Nomor PERPANG/45/VI/2010 menyebutkan bahwa Prajurit profesional adalah sosok prajurit yang selalu mengedepankan kepentingan bangsa dan negara diatas kepentingan pribadi dan golongan untuk melindungi bangsa dan negara Indonesia, dan menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia sebagai perwujudan dari isi Sapta Marga ke 4 yang menyatakan "*Kami Prajurit Tentara Nasional Indonesia adalah Bhayangkari Negara dan Bangsa Indonesia*". Setiap Prajurit TNI AD harus memahami akan tugas-tugas TNI AD yaitu: a. Melaksanakan tugas TNI matra darat di bidang pertahanan, b. Melaksanakan tugas TNI dalam menjaga keamanan wilayah perbatasan darat dengan negara lain, c. Melaksanakan tugas TNI dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan matra darat dan d. Melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan di darat.

Figur prajurit profesionalisme TNI AD bukanlah sosok prajurit profesionalisme ala "Barat" atau tentara asing lainnya. Prajurit profesionalisme TNI AD adalah sosok prajurit yang mencontoh nilai nilai perjuangan para pendahulu bangsa yang rela





berkorban jiwa dan raga, tanpa mengenal menyerah, membela kejujuran, kebenaran, keadilan sebagai kesatria Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Menurut beberapa pakar militer internasional seperti, **Samuel Finer**, dalam bukunya *The Man on Horseback: The Role of the Military in Politics*, menuturkan apa yang membuat militer berbeda karena didalamnya ada budaya yang sangat otokratik, tuntutan loyalitas dan komitmen penuh. Militer memiliki organisasi yang solid, unggul, kokoh dan bekerja seefektif mungkin. Dengan demikian, militer siap menunjukkan kinerja profesionalnya kapan saja negara membutuhkan.

Sedangkan menurut **Samuel Huntington**, untuk membentuk suatu profesionalisme khususnya dalam dunia militer dibutuhkan adanya **tiga prasyarat profesionalisme** yaitu : adanya keahlian (*expertise*), tanggung jawab sosial (*social responsibility*), dan adanya organisasi kesejawatan yang mengikat (*corporateness*). Hal tersebut senada dengan yang disampaikan oleh **Morris Janowitz** bahwa profesionalisme dapat terbentuk karena adanya suatu keahlian yang sangat spesifik yang diperoleh melalui latihan yang intensif, standar etika dan kinerja, rasa identitas kelompok, dan sistem administrasi internal. Sementara menurut pengamat militer **Salim Said** menyatakan pada Kantor Berita Antara tanggal 25 September 2013, bahwa Profesionalisme personel TNI untuk tidak berkecimpung dalam politik dapat dicapai dalam tiga upaya prioritas yaitu;

memajukan kesejahteraan, meningkatkan pelatihan dan mengadakan sistem persenjataan memadai untuk personel. Untuk mencapai profesionalisme tentara, peran dari internal TNI tidak akan maksimal jika tidak didukung otoritas politik dan otoritas politik juga harus berkomitmen dan bertindak dalam membantu serta melindungi profesionalisme TNI dan profesionalisme TNI semakin penting menjelang Tahun Politik 2014. Pernyataan Salim Said tersebut juga telah diamini oleh pengamat TNI lainnya seperti **J. Kristiadi**, mengatakan bahwa profesionalisme TNI harus segera diwujudkan dalam bertugas di lapangan, selain itu pembekalan dasar tentang hukum dan HAM kepada seluruh prajurit harus dilakukan sehingga setiap tentara dapat bertugas dengan aman. Penambahan alutsista yang mumpuni dan kesejahteraan prajurit merupakan faktor yang sangat penting untuk meningkatkan profesionalisme, karena prajurit akan lebih fokus dalam bidangnya yaitu menjaga setiap ancaman yang mengganggu keutuhan NKRI.

Dari pendapat para ahli militer tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa profesionalisme prajurit TNI adalah prajurit yang mempunyai pengetahuan, pendidikan, kemampuan, keterampilan serta tanggung jawab dibidang pertahanan dan keamanan negara dari ancaman luar dan dalam negeri.

Sedangkan dari sudut pandang TNI sendiri yang dimaksud dengan profesional adalah tentara yang terlatih, terdidik, diperlengkapi secara baik, **tidak berpolitik praktis**, tidak berbisnis, dan dijamin kesejahteraannya, serta mengikuti kebijakan politik negara yang menganut prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan hukum internasional yang telah diratifikasi.

Dengan kata lain untuk mencapai TNI yang profesional harus didukung oleh semua kalangan dan element bangsa yang ada dan diperkuat oleh Undang-undang yang ada, sehingga sampai kapanpun hal itu sudah merupakan keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Kemanunggalan TNI-Rakyat.

Sampai saat ini masih terdapatnya prajurit TNI yang tidak menunjukkan sikap dan perilaku yang baik ditengah-tengah kehidupan masyarakat, sehingga perwujudan kemanunggalan TNI-Rakyat sering dicerai oleh tindakan-tindakan prajurit yang merugikan masyarakat. Sementara tuntutan dalam rangka menciptakan rasa aman, kedamaian dan ketentraman dalam menghadapi Pemilu 2014 sangat mutlak diperlukan dan secara terus menerus harus

diwujudkan melalui kebersamaan antara TNI, Polri, Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Ditengah kondisi bangsa dan negara yang tengah dihadapkan dengan berbagai bencana alam (Erupsi G. Sinabung, banjir bandang di Manado, Banjir di Pati, Kudus, tanah longsor di Jombang, banjir di NTT, banjir di DKI Jakarta dan sekitarnya, dan yang pada terakhir kali ini adanya ancaman erupsi Gunung Kelud di Jawa Timur) maka sangat naif bila TNI/TNI AD ikut dalam percaturan politik praktis.

Kebijakan pimpinan TNI AD Bapak Jenderal TNI Budiman yang menggagas dan menggerakkan pasukan agar membantu dan terlibat aktif dalam mengatasi berbagai dampak dari bencana alam seperti memperbaiki jalur Pantura, dan penanganan korban bencana alam lainnya merupakan langkah tepat dan sangat terpuji untuk memosisikan TNI AD sebagai bhayangkari negara, khususnya pada tugas OMSP (Operasi Militer Selain Perang). Konsentrasi terhadap penderitaan rakyat Indonesia yang terkena bencana alam di berbagai tempat harus menjadi prioritas bagi TNI/TNI AD untuk turut meringankan beban permasalahan bangsa dan negara.

Pada peringatan ke-68 Hari TNI Tahun 2013 tanggal 5 Oktober 2013 di Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta yang mengambil tema; Profesional, Militan, Solid, dan Bersama Rakyat TNI Kuat. Dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono selaku inspektur upacara mengatakan bahwa tema

yang dikedepankan pada peringatan ke-68 hari TNI secara jelas menunjukkan orientasi dan ketegasan sikap TNI dalam menjalankan tugas negara menjaga kedaulatan NKRI yang terbentang dari Sabang sampai Merauke.

Sementara tekad bersama rakyat TNI kuat memiliki makna bahwa kemanunggalan TNI-Rakyat adalah sumber kekuatan utama TNI dalam mengemban tugas-tugas negara. Sejarah mencatat TNI lahir, tumbuh dan berkembang bersama rakyat. Sejarah juga mencatat kemanunggalan TNI-Rakyat telah menghasilkan prestasi gemilang di dalam mempertahankan kedaulatan negara maupun dalam peran serta menjalankan roda pembangunan. Lebih lanjut dikemukakan oleh kepala negara bahwa "Saat ini dan kedepan bahkan sampai kapanpun kemanunggalan TNI-Rakyat adalah pilar bagi tegak dan kokohnya TNI sebagai kekuatan militer handal dan mampu menjalankan tugas pokoknya," mengacu dari pidato Presiden RI maka kemanunggalan TNI-Rakyat adalah pilar bagi tegak dan kokohnya TNI/TNI AD sebagai kekuatan militer dalam melaksanakan tugas pengabdian terbaik bagi bangsa dan negara.

Kemanunggalan TNI-Rakyat juga menjadi wujud dari sistem pertahanan negara (Sishanneg) yang bersifat semesta. Dalam Sishanneg ini rakyat turut terlibat sebagai komponen cadangan dan pendukung membantu TNI sebagai komponen utama. Kemanunggalan TNI-Rakyat dapat dilihat ketika



penanggulangan bencana alam dikerjakan bersama sama antara TNI dan Rakyat. Kemanunggalan TNI-Rakyat juga dapat membentengi berbagai kemungkinan ancaman yang akan mengganggu kedaulatan negara RI dan keselamatan setiap warga negara Indonesia. Tanpa kemanunggalan TNI-rakyat maka TNI/TNI AD akan lemah dan tidak dapat berfungsi dan berperan dengan baik terlebih lagi dalam menghadapi pesta demokrasi pada Pemilu 2014 sangat penting dan strategis untuk menciptakan suatu kondisi nasional yang aman, tertib dan damai sehingga Pemilu yang diharapkan dapat berjalan dengan jujur, adil dan akuntabel.

Dengan demikian maka sudah tepatlah misi TNI sebagaimana yang disampaikan oleh Panglima TNI pada peringatan HUT ke-68 TNI tahun 2013 yaitu **“Bersama Rakyat TNI Kuat”**.

Kesimpulan.

Sejalan dengan meningkatnya kesadaran politik masyarakat di era demokrasi ini, secara langsung maupun tidak langsung telah membawa pengaruh pada pandangan prajurit TNI tentang hak politiknya sebagai warga negara, sehingga Sikap netralitas, profesionalisme Keprajuritan, Kemanunggalan TNI-Rakyat sangat penting dan strategis dalam menghadapi Pemilu 2014. Hal ini dapat membangun kondisi bangsa dan negara yang aman, tertib dan lancar. Sehingga Ketidakberpihakan TNI/TNI AD terhadap salah satu Parpol merupakan keputusan yang tepat agar TNI tetap pada jati dirinya dan sesuai konstitusi.

Menurut logika dan Undang-undang yang ada memang Netralitas sudah merupakan harga mati tidak hanya bagi TNI/TNI AD tetapi juga bagi semua element masyarakat yang ada. dan itu akan berhasil dengan baik apabila TNI dan rakyat saling bahu membahu dengan prinsip Ing Ngarso Sung Tulodo, yaitu mampu memberi suri tauladan, Ing Madyo Mangun Karso, yaitu ikut bergiat serta menggugah semangat di tengah masyarakat dan Tutwuri Handayani, yaitu mempengaruhi dan memberi dorongan kepada seluruh masyarakat sebagai perwujudan Kemanunggalan TNI-Rakyat.

Pemilu 2014 harus sukses dengan keikutsertaan seluruh masyarakat untuk mengawasi jalannya Pemilu sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing disamping tugas KPU sebagai penyelenggara dan Bawaslu sebagai pengawas langsung, lalu TNI juga sebagai bagian dari komponen masyarakat harus mendapatkan jaminan untuk kesuksesan tersebut, jika memang ada yang salah harus ditegur dan diperbaiki. Itulah salah satu sikap profesionalitas yang

diinginkan. Dan sifat profesional itu berulang kali telah ditekankan Panglima TNI dan yang terakhir pada Rapim TNI-Polri 2014 bagaimana TNI mendukung tugas pengamanan Polri.

Oleh karena itu profesionalisme TNI/TNI AD harus terus ditingkatkan sehingga prajurit paham dan bertanggung jawab tentang tugas pokok dan fungsinya selaku penjaga dan pengawal keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan keselamatan hidup bangsa, terlebih lagi menjelang Pemilu 2014. Tugas pokok dan fungsi TNI tersebut niscaya dapat berhasil dengan adanya komitmen Netralitas, Profesionalisme Prajurit dan Kemanunggalan TNI-Rakyat.

Rekomendasi.

Mengingat prajurit TNI wajib memegang teguh komitmen “Netralitas” dalam Pemilu 2014 dengan tujuan dapat tercipta Pemilu yang Jurdil dan bermartabat, serta dalam mewujudkan Netralitas tersebut diupayakan dengan optimal. Hal ini bukan berarti TNI hanya berdiam diri tetapi sebaliknya TNI harus proaktif untuk menciptakan ruang, alat dan kondisi yang kondusif bagi seluruh komponen untuk pelaksanaan pesta Demokrasi tersebut serta bersama-sama komponen bangsa ikut menjamin suksesnya Pemilu sehingga dalam masa transisi perubahan Kepemimpinan Nasional dijamin aman dan lancar. Selanjutnya sebagai bagian dari komponen bangsa TNI harus tetap dapat ikut berperan dalam pengambilan keputusan-keputusan Negara oleh sebab itu ide-ide, gagasan dan aspirasi yang bersifat konstruktif dalam membangun NKRI dapat disalurkan melalui KBT yang terpilih sebagai anggota Legislatif di DPR, DPP dan DPRD dan mitra TNI di DPR yaitu Komisi satu DPR-RI oleh sebab itu “Netralitas TNI dalam Pemilu” sudah merupakan harga mati dan dapat dipermanenkan sepanjang masa.

Demikian tulisan yang berjudul Netralitas, Profesionalisme Prajurit dan Kemanunggalan TNI Rakyat dalam menghadapi Pemilu 2014 ini dibuat, semoga dapat bermanfaat.

Daftar Pustaka.

1. Eko Widiarto Aan, M. Ali Syafaat, Herman Suryokumoro, *Dinamika Militer dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Malang: In Trans Publishing : 2007.
2. Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, *Paradigma Baru Peran TNI Sebuah Upaya Nasionalisasi*, (Jakarta: Mabes TNI, 1999)
3. MD Mahfud., *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Gama Media, Yogyakarta : 1999.

4. Notosusanto Nugroho, *Pejuang dan Prajurit Konsep Dwi Fungsi ABRI*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1991.
5. Syahnakri Kiki, *Aku Hanya Tentara, Catatan Militer, Kepemimpinan, dan Kebangsaan*, Penerbit Kompas, Jakarta : 2009.
6. Yulianto Arif, *Hubungan Sipil dan militer di Indonesia Pasca Orba di Tengah Pusaran Demokrasi*, Jakarta: Rajawali Pers: 2002

Sumber.

1. <http://news.okezone.com/read/2011/11/25/339/534439/gerindra-dukung-tni-polri-diberi-hak-pilih>, diakses pada 11 Desember 2011.
2. <http://hankam.kompasiana.com/2012/05/16/pro-kontra-pemberian-hak-pilih-kepada-tni-dalam-pemilihan-umum-457668.html> mohamad .Rohli

RIWAYAT HIDUP SINGKAT PENULIS**I. Data Pokok.**

1. Nama : Istu Hari. S. S.E.,M.M.
2. Pangkat : Mayjen TNI/29617
3. Tempat/Tgl. Lahir : Kertosono/13-12-1958
4. Agama : Islam
5. Status : Kawin
6. Sumber Pa/Th : Akabri/1983
7. Jabatan : Pangdam I/Bukit Barisan

II. Riwayat Pendidikan Militer.**A. Dikbangum.**

1. Akabri : 1983
2. Sussarcabif : 1983
3. Diklapa II Inf : 1993
4. Seskoad : 1996
5. Sesko TNI : 2002
6. Lemhanas : 2010

B. Dikbangspes.

1. Sussar Para : 1982
2. Sus Kasiops : 1985
3. Sustih Inti Dhakura : 1985
4. Suslapa Inf : 1990
5. Sus Jemen Hankam : 2006
6. Sus Danrem : 2007

III. Riwayat Penugasan.**A. Dalam Negeri.**

1. Ops Seroja Timtim : 1984, 1986, dan 1988

B. Luar Negeri.

1. Malaysia : 2001
2. Vietnam : 2002
3. Australia : 2008
4. Filipina : 2009

5. Korea Selatan : 2010
6. Jepang : 2012
7. Uganda : 2012
8. Jerman : 2013
9. Perancis : 2013

IV. Riwayat Jabatan.

1. Danton-1/A Yonif-141/AYJP
2. Danton-2/C Yonif-142/KJ
3. Dankipan-C Yonif-142/KJ
4. Kasi-2/Ops Yonif-142/KJ
5. Dankipan-C Yonif-142/KJ
6. Dankipan-B Yonif-142/KJ
7. PS. Pbd Kwatpers PB II Spersad
8. Pbd Kwatpers PB II Spersad
9. Pamen Denmabesad (Dik. Seskoad)
10. Pbdy Ops Sopsdam V/BRW
11. Danyonif-507 Dam V/BRW
12. Dandim-0832/SS Rem-084/BJ
13. Pbdy-1/Mindik PB II Spersad
14. Asops Kasdam V/BRW
15. Danpuslatpur Kodiklat TNI-AD
16. Paban II/Bindik Spersad
17. Danrem-131/STG Dam VII/WBR
18. Pamen Mabesad (Sesko TNI)
19. Pamen Ahli Gol IV Akmil
20. Wkl Gubernur Akmil
21. Waaspers Panglima TNI
22. Gubernur Akmil
23. Aspers Kasad
24. Pangdam I/BB

PROFESIONALITAS TNI AD DALAM MENYIKAPI TAHUN POLITIK 2014



Oleh: Mayjen TNI Bambang Budi Waluyo. YP
(Pangdam II/Sriwijaya)

Secara etis, dinamika politik di Indonesia saat ini relatif belum terlaksana dengan baik dan atau se-ideal mungkin. Kondisi ini tercermin melalui kemunculan berbagai isu negatif atau *black campaign* yang menjadi strategi politik salah satu pihak untuk menjatuhkan lawan politiknya.

***Black campaign* yang dilakukan pihak-pihak tertentu tanpa adanya bukti yang mendukung telah menciderai demokrasi dan memberikan pendidikan politik yang buruk di masyarakat**

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan Negara demokrasi yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam kurun waktu 16 tahun setelah reformasi tahun 1998 sampai dengan saat ini, Indonesia telah menyelenggarakan pemilihan umum sebagai bagian dari pesta demokrasi yang dipilih secara langsung oleh masyarakat sebanyak tiga kali, berikutnya pada tahun 2014 ini Indonesia kembali akan menyelenggarakan

pesta demokrasi yang keempat kali. Pesta demokrasi yang keempat ini diharapkan diikuti oleh seluruh warga Negara Indonesia yang telah memiliki hak pilihnya guna mendapatkan dan atau menghasilkan para pimpinan nasional yang negarawan. Namun demikian diakui bahwa, perkembangan partisipasi masyarakat dalam Pemilu sejak reformasi tahun 1998 sampai dengan Pemilu 2009, baik pemilihan Legislatif, Presiden, Gubernur, Bupati maupun Walikota belum sepenuhnya menggunakan hak pilihnya selaku warga negara. Sebagai contoh data survey LSI menunjukkan angka partisipasi politik masyarakat yang golput tahun 1999 adalah 10,9%, sedangkan tahun 2009 meningkat menjadi 39,1%. Sementara untuk Pilkada diwilayah DKI putaran kedua, angka Golput mencapai 36,7%.

Hal tersebut diatas dapat terjadi karena latar belakang pendidikan dan kesadaran politik masyarakat relatif rendah, ada kecenderungan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap partai politik. Pertanyaannya, bagaimana partisipasi masyarakat dalam pesta demokrasi tahun 2014 ? apakah akan semakin banyak Golput? Dipahami bahwa dalam tahun politik 2014 ini sejumlah partai politik telah berupaya menyelenggarakan pendidikan politik di lingkungan partainya masing-masing, disamping itu pemerintah juga telah melakukan berbagai upaya atau sosialisasi tentang Pemilu guna meningkatkan kesadaran masyarakat untuk ikut serta dalam Pemilu, dengan harapan pada pelaksanaan pesta demokrasi tahun ini, partisipasi masyarakat semakin meningkat. Pendidikan politik adalah usaha yang dasar untuk mengubah proses sosialisasi politik masyarakat, sehingga mereka memahami dan menghayati betul nilai-nilai yang terkandung dalam suatu sistem politik ideal yang hendak dibangun. Disadari bersama bahwa, memasuki tahun 2014 menjelang pesta demokrasi, eskalasi politik cenderung meningkat, hal ini ditandai dengan berbagai kegiatan yang dilakukan KPU dan juga Bawaslu yang mulai terlihat dan menggeliat menjadikan dinamika politik di tanah air semakin meningkat, ditambah lagi dengan adanya beberapa Parpol yang belum bisa menerima keputusan Komisi Pemilihan Umum yang hanya meloloskan 16 Partai,



persoalan dana saksi, dan lain sebagainya. Disamping itu, tingginya dinamika politik memasuki tahun politik 2014, juga diindikasikan dengan adanya berbagai persoalan internal beberapa partai politik dibarengi dengan manuver-manuver lawan politiknya yang dilakukan oleh para elit politik dan pendukungnya di setiap wilayah Indonesia. Persoalan lainnya yang sering terjadi di wilayah adalah masih terjadinya konflik sosial ditandai dengan terjadinya benturan berbagai kepentingan dilakukan antar kelompok masyarakat yang secara langsung berdampak pada terganggunya kelangsungan pembangunan nasional serta menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat di daerah. Hingga pertengahan 2013 peningkatan eskalasi konflik tercatat ada 531 konflik.¹ Beberapa konflik yang terjadi di wilayah antara lain konflik sosial bernuansa SARA, bentrokan warga dengan Ormas, aksi unjuk rasa dibarengi tindakan anarkis bentrokan antar massa pendukung calon kepala daerah dalam Pemilukada, dan lain-lain. Pertanyaannya, kenapa konflik sosial marak terjadi di daerah? Hal ini dapat timbul, karena kemungkinan disebabkan oleh adanya ego sektoral dan keraguan atau kegamangan para penegak hukum di daerah. Seperti yang ditegaskan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Nusa Dua Bali bahwa untuk mencegah konflik antar kelompok masyarakat di daerah harus diawali dari optimalisasi peran Pemda dan jajaran keamanan di daerah, saya minta semua jajaran pemerintah daerah sensitif dan responsif. Penegasan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tersebut tentunya termasuk TNI, khususnya TNI-AD yang ada di seluruh wilayah tanah air Indonesia.

Hal tersebut sesuai dengan undang-undang yang tercantum pada UU No 34 Tahun 2004, khususnya tentang tugas TNI dalam OMSP (14 tugas-tugas TNI) disebutkan bahwa tugas TNI diantaranya membantu Pemerintah, membantu Polri dalam Kamtibmas dan

pemberdayaan potensi wilayah pertahanan yang diimplementasikan melalui kegiatan Pembinaan Teritorial. Dengan adanya undang-undang tersebut tidak ada alasan bagi TNI AD untuk tidak melaksanakan tugasnya, baik dalam mencegah dan menaggulangi konflik sosial maupun dalam membantu Polri dalam pengamanan pemilu tahun 2014 dengan tetap mengedepankan netralitas TNI. Seperti yang telah ditekankan oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Dr Susilo Bambang Yudhoyono yang menegaskan pentingnya netralitas TNI dan Polri khususnya dalam Pemilu 2014.

Dipahami bersama bahwa TNI AD disamping menjalankan tugas pokoknya dalam OMP dan OMSP, pada saat ini bertugas membantu Kepolisian RI dalam pengamanan Pemilu 2014. Tugas tersebut harus dapat dilaksanakan secara profesional yaitu mampu menjalankan tugasnya sesuai keahliannya, mampu bekerja sama, memiliki jiwa korsa dan dapat mempertanggungjawabkan apa yang telah, sedang dan akan dilakukan. Untuk mengoptimalkan keberhasilan tugasnya, TNI AD selalu melaksanakan evaluasi terhadap Tugas Pokoknya yang diamanatkan oleh undang-undang, baik yang tercantum dalam pasal 30 UUD 1945 tentang Sishankamrata, maupun UU RI No. 3 tahun 2002 tentang Sishanta, serta UU No. 34 tahun 2004 tentang tugas-tugas dalam OMP dan OMSP. Dalam konteks ini, TNI AD tidak hanya dituntut untuk mengembangkan diri sebagai kekuatan pertahanan, tetapi harus memiliki integritas yang tinggi, serta mampu memerankan diri sebagai kekuatan moral dan kekuatan kultural.

Bertitik tolak dari kondisi tersebut diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan adalah bagaimana profesionalitas TNI AD menyikapi tahun politik 2014 di wilayah tugas dan tanggung jawab daerah masing-masing.

Tahun Politik 2014.

Pada kondisi saat ini diberbagai daerah manapun bertebaran iklan-iklan calon legislatif (Caleg) dan partai politik (Parpol) di banyak tempat, walaupun jadwal kampanye resmi belum dimulai menandai tahun politik 2014. Kenapa hal ini terjadi, barang kali karena kurang adanya ketegasan dari pihak yang berwenang terhadap larangan pemasangan iklan dan spanduk-spanduk yang dipasang di jalanan. Sebaliknya para Caleg dan Parpol berupaya untuk memperkenalkan dirinya kepada para pemilih guna mendapatkan hasil jumlah pemilih yang banyak sesuai yang dipersyaratkan dalam Pemilu. Oleh karena itu harus disadari bersama bahwa menjelang penyelenggaraan Pemilihan Umum Legislatif, DPR RI, DPRD Provinsi



dan Kabupaten Kota, serta DPD-RI maupun Pemilihan Presiden tentunya akan berdampak pada kerawanan terjadinya permasalahan yang sangat kompleks bahkan dapat berpotensi menimbulkan konflik sosial yang diawali dengan berbagai kerusuhan yang timbul di daerah dengan pola dan strategi yang beragam, bahkan melalui cara-cara anarkhisme.

Terjadinya konflik sosial tersebut tercermin dari tingginya dinamika sosial yang terjadi di seluruh wilayah tanah air, dalam hal ini dapat saja terulang kembali di enam wilayah yang pernah timbul konflik sosial pada 2013 yaitu : Papua, Jawa Barat, Jakarta, Sumatera Utara, Sulawesi Tengah, dan Jawa Tengah. Mengapa demikian, karena sepanjang tahun 2013, wilayah-wilayah tersebut potensi kerawannya sangat tinggi, dan terindikasi paling banyak dilanda konflik sosial, dengan data sebagai berikut : **Pertama**, di wilayah Papua, sepanjang 2013 setidaknya terjadi 24 peristiwa konflik sosial, kejadian ini menelan 59 korban jiwa termasuk 3 polisi dan 9 TNI, serta 92 orang luka, termasuk 6 polisi dan 4 TNI.² Dari peristiwa itu sedikitnya 11 rumah dibakar, tiga mobil dibakar, satu mobil dirusak, dan dua motor dirusak. **Kedua**, di wilayah Jawa Barat terjadi 24 kali konflik sosial dengan korban jiwa 29 orang, 23 luka (termasuk 10 polisi dan 1 TNI), 2 mobil dibakar dan satu sepeda motor dibakar. **Ketiga**, di wilayah Jakarta terdapat 18 peristiwa konflik yang menyebabkan 12 orang tewas, dan 11 orang luka (termasuk 3 Polisi). Jumlah terbesar korban tewas adalah akibat bentrokan antar Ormas, warga, pemuda, kelompok, dan preman. **Keempat**, di wilayah Sumatera Utara ada 10 peristiwa konflik yang menelan 21 korban tewas, 26 orang luka, 1 bangunan Lembaga Pemasarakatan (Lapas) dibakar. **Kelima**, di wilayah Sulawesi Selatan ada 10 peristiwa, 8 orang tewas, dan 28 orang luka (termasuk 17 polisi). **Keenam**, di wilayah Jawa Tengah ada 10 konflik sosial yang menyebabkan 7 orang tewas, 46 orang luka 1

mobil dan 70 sepeda motor dibakar.

Kondisi tersebut diatas tidak menutup kemungkinan dapat muncul kembali pada saat pertarungan partai politik dalam penyelenggaraan pemilu tahun 2014 ini, dimana Parpol berupaya meraih simpati masyarakat melalui strategi masing-masing yang terkadang mengabaikan etika politik. Hal ini apabila dilakukan dengan mengedepankan emosi dan mengabaikan kesantunan politik, maka dapat berujung pada aksi atau tindakan diluar etika berdemokrasi antar sesama aktor partai yang berlainan kendaraan politik. Tak bisa dipungkiri, konflik-konflik kecil bisa menemui jalan buntu bahkan bisa menjadi masalah besar di tengah-tengah masyarakat yang dapat menimbulkan dampak lanjutan yaitu terganggunya stabilitas keamanan dan politik.

Untuk mengantisipasi dan menghadapi berbagai kemungkinan yang akan terjadi, TNI kembali mengaktifkan Pasukan anti Huru Hara (PHH), terutama untuk mengamankan jalannya Pemilu 2014. Pengaktifan PHH TNI ini sebagai upaya untuk membantu dan atau mem-back up Polri dalam mengantisipasi gangguan keamanan dan kedaulatan NKRI. Selain membantu pengamanan pemilu, TNI-AD, AL dan AU juga dilibatkan dalam pendistribusian surat suara ke pelosok tanah air dengan mengerahkan seluruh potensi yang ada, terutama alat angkut darat, alat angkut air dan alat angkut udara untuk membantu Polri dan KPU. Disamping itu, untuk memperlancar sekaligus keberhasilan bantuan TNI kepada Polri dalam Pemilu 2014, pada Rapim TNI dan Polri tahun 2014 di PTIK telah dibuat kesepakatan dan atau kerja sama tentang bantuan TNI kepada Polri dalam rangka pengamanan pemilu tahun 2014 yang diwujudkan melalui Protap dan atau SOP. Selain itu seluruh jajaran TNI AD dengan tetap memedomani netralitas TNI akan terus memantau atau memonitor perkembangan dinamika politik di wilayah guna mengantisipasi sedini mungkin terjadinya konflik di wilayah. Hal tersebut dilakukan sebagai wujud keikutsertaan TNI AD dalam rangka mensukseskan Pemilu 2014.

Etika Politik, ancaman money politics, dan Golput.

Ditahun politik sekarang ini banyak terjadi intrik-intrik politik yang mewarnai segala aspek kehidupan sosial, baik itu yang berkaitan dengan aspek ideologi, ekonomi, sosial budaya maupun Hankam. Namun yang sering muncul saat ini justru intrik-intrik politik negatif yang dipertontonkan kepada masyarakat, diantaranya adanya cara-cara berpolitik dengan mengabaikan etika dan

kesantunan berpolitik. Lihat saja masih ada wakil-wakil rakyat saling hujat, saling memaki, saling pukul pada saat berlangsungnya rapat/sidang di gedung DPR, bahkan sudah cukup banyak yang terlibat obat terlarang Narkoba. Disamping itu tingginya tingkat korupsi yang menjerat para elit politik semakin memperkeruh persepsi politik itu hingga ke batas yang membuat sebagian besar orang tak lagi percaya bahwa masih ada kejujuran di dunia politik, sehingga ada adagium *"power tends to corrupt"* yang memberi gambaran bagaimana kekuasaan itu cenderung diselewengkan, disalahgunakan, serta dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu. Lihat saja sudah cukup banyak elit Parpol secara bergantian terjaring dalam KPK, yang berakhir dengan masuk penjara. Kondisi seperti ini menunjukkan kurang adanya keteladanan dilingkungan elit politik, ditambah lagi hilangnya kesantunan dan etika politik.

Secara etis, dinamika politik di Indonesia saat ini relatif belum terlaksana dengan baik dan atau se-ideal mungkin. Kondisi ini tercermin melalui kemunculan berbagai isu negatif atau *black campaign* yang menjadi strategi politik salah satu pihak untuk menjatuhkan lawan politiknya. *Black campaign* yang dilakukan pihak-pihak tertentu tanpa adanya bukti yang mendukung telah menciderai demokrasi dan memberikan pendidikan politik yang buruk di masyarakat. Para politisi seharusnya menjaga agar hal-hal yang menghalalkan berbagai cara dalam berpolitik tidak dilakukan, apalagi jika sampai memecah belah bangsa hingga mengakibatkan kerusakan. Kampanye politik hendaknya bermartabat dan mengandung nilai-nilai pendidikan bagi masyarakat. Oleh sebab itu masing-masing Parpol diharapkan memberikan pendidikan politik secara bertahap, bertingkat dan berkelanjutan, agar kehidupan Parpol dimasa depan akan semakin baik, diantaranya mampu memberikan rasa aman dan sejahtera bagi masyarakat luas. Pendidikan politik (**Alfian**, dalam bukunya *Prospek Pembangunan Politik Indonesia, jkt 2008*) adalah usaha yang dasar untuk mengubah proses sosialisasi

politik masyarakat, sehingga mereka memahami dan menghayati betul nilai-nilai yang terkandung dalam suatu sistem politik ideal yang hendak dibangun.

Belakangan ini tampak kerisauan sejumlah kalangan yang menyoroti kinerja manajemen tim sukses Capres maupun Parpol yang menggunakan cara-cara negatif seperti *black campaign*. Praktek seperti ini bisa diartikan bermacam-macam, namun pada umumnya terdapat kecenderungan serangan terhadap pribadi atau keluarga dan lontaran isu diluar wacana substansi. Kemungkinan isu-isu tersebut ada yang benar, akan tetapi tidaklah tepat jika diungkapkan dalam kampanye politik, sebaliknya banyak pula isu yang tidak benar bahkan fitnah. Sementara banyak kalangan melihat dan mencermati bahwa membicarakan sisi-sisi negatif dari pribadi calon dalam kampanye tidaklah etis. Namun, sebagian besar opini publik memandang bahwa sebagai pemimpin dan figur publik, seseorang tidak bisa menyembunyikan apapun. Masyarakat perlu tahu karakter pemimpinnya, sehingga kehidupan pribadi pemimpin bukan lagi milik pribadi, tapi sudah menjadi milik publik. Sebenarnya terdapat banyak sisi positif dengan adanya keterbukaan dari seorang Pemimpin, sehingga masyarakat tahu bagaimana sosok sesungguhnya dari calon pemimpinnya. Bukan hanya dari tampilan media atau pidatonya saja, namun hingga sisi pribadinya, karena kepribadian itu mencerminkan karakter dan kualitas kepemimpinan yang turut mempengaruhi pengambilan setiap keputusan yang menyangkut kepentingan rakyat banyak. Namun idealnya untuk kampanye mestinya fokus pada hal-hal yang substantive menyangkut kepentingan rakyat yang sejalan dengan arah tujuan demokrasi.

Selain itu cara-cara *money politic* digunakan untuk mempengaruhi elektabilitas Parpol. Hasil temuan pengamat melalui survey indikator menyimpulkan bahwa separuh dari sebagian besar masyarakat pemilih menilai praktik politik uang sebagai hal yang wajar, sebagian lagi menilai politik



uang tidak bisa diterima.³ Pemilih yang menilai politik uang sebagai kewajiban, kemungkinan atau logikanya akan memilih calon yang memberi uang terbanyak. Dan hanya sebagian kecil yang akan menolak, meski praktik politik uang dinilai sebagai suatu hal yang wajar. Hasil survey terhadap kecenderungan masyarakat saat ini tentu akan berpengaruh terhadap keputusan strategi politik yang akan digunakan oleh aktor politik maupun Parpol. Jalannya proses kedewasaan demokrasipun menemui hambatan. Hanya calon yang memiliki dana besar yang dapat memenangkan pertarungan politik, sehingga semakin memperkecil kesempatan bagi kandidat yang memiliki dana terbatas meski memiliki integritas tinggi yang akibatnya mereka tak dikenal masyarakat. Dampaknya adalah, rakyat yang dalam posisi seperti ini akan tetap menjadi objek eksploitasi politik pihak yang memiliki kekuasaan. Sehingga *money politic* tidak hanya cacat secara moral, bahkan berbahaya untuk kepentingan bangsa Indonesia. Hal inilah yang menyebabkan kualitas pejabat publik terabaikan. Sebab, seorang yang dipilih menjadi pejabat bukan karena kualitas atau kapasitas maupun kompetensinya untuk menempati posisi politik tersebut, namun semata karena memberi uang kepada pemilih menjelang Pemilu. Kondisi inilah yang menyebabkan jabatan-jabatan publik akhirnya ditempati oleh kaum *medioker* atau mereka yang tidak memiliki prestasi memadai untuk menjalankan struktur negara. Akibatnya, tentu struktur Negara tidak akan bekerja dengan baik untuk mewujudkan cita-cita negara demi kebaikan bersama. Sebagai contoh pada saat ini telah banyak kepala daerah dan atau wakil rakyat yang berurusan dengan KPK, bahkan sudah sangat banyak unsur Pimpinan daerah, bahkan Pimpinan Pusat yang masuk penjara karena kasus yang berkaitan dengan penyelewengan anggaran. Tak hanya *money politic* yang perlu diwaspadai, tingkat golput yang masih tinggi mempunyai konsekuensi terhadap legitimasi pemerintah kedepan. Jika golput melebihi 50% maka derajat legitimasi suatu pemerintahan sangat rendah, sehingga keabsahan menjalankan roda pemerintahan dipertanyakan. Hal ini merupakan akibat dari sebagian besar masyarakat yang menilai Parpol yang belum menunjukkan kinerja maksimal, karena Parpol cenderung hanya peduli kepada konstituennya pada saat menjelang Pemilu saja. Selain itu elit Parpol terus mengumbar janji kepada masyarakat, dan kurang dibarengi dengan realisasi nyata setelah mereka terpilih. Akibatnya pada saat terpilih dan menjabat sebagai pimpinan di daerah harus sering menghadapi unjuk rasa dari berbagai



lapisan kelompok masyarakat karena janji-janji pada saat kampanye tidak direalisasikan.

Netralitas TNI.

Pada tahun politik ini, TNI AD secara profesional berkomitmen untuk selalu berupaya menjaga netralitas dalam penyelenggaraan Pemilu tahun 2014. Oleh sebab itu TNI AD dengan mengacu pada undang-undang yang berlaku akan mengerahkan seluruh kemampuan yang dimiliki guna memberikan bantuan sepenuhnya kepada Polri dalam pengamanan Pemilu 2014 agar pelaksanaan Pemilu berlangsung dengan jujur, adil, tertib dan aman. Dipahami bersama bahwa TNI-AD memiliki kontribusi positif dalam mengawal jalannya demokrasi Indonesia, hal ini terwujud dalam sikap TNI untuk tidak terlibat dalam arena politik praktis. Netralitas adalah hak utama yang patut dijaga oleh setiap anggota TNI. Jika hal ini tidak terjaga maka dapat menimbulkan tindakan-tindakan keberpihakan yang menimbulkan ketimpangan dengan membantu partai politik ataupun aktor politik tertentu, baik sengaja maupun tidak sengaja. Kedewasaan berpolitik masyarakat yang masih belum sempurna menjadikan salah satu faktor yang memungkinkan prajurit TNI terseret dalam arus politik. Keikutsertaan anggota TNI dalam politik praktis tidak hanya menyebabkan pecah belahnya institusi pertahanan dan kedaulatan negara, akan tetapi juga dapat memecah belah seluruh komponen bangsa yang dapat berujung kehancuran tatanan masyarakat. Penegasan tentang netralitas TNI dalam panggung politik Indonesia sudah ada

sejak tahun 2000 melalui Ketetapan MPR Nomor MPR RI/VII/2000. Tap MPR itu menegaskan bahwa TNI tidak lagi menggunakan hak memilih maupun dipilih. Keikutsertaan TNI dalam menentukan arah kebijakan nasional disalurkan melalui MPR paling lama hingga 2009, walaupun dalam kenyataannya pada tahun 2004 TNI sudah tidak lagi memiliki wakilnya di legislatif. Penggunaan hak dipilih dan memilih itu kembali dipertegas dalam UU Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI dan UU No 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Anggota DPR, DPRD, dan DPD.

Penegasan tentang pentingnya netralitas TNI dalam panggung politik berdasar pengalaman Orde Baru dimana keberpihakan anggota TNI dapat menimbulkan ketakutan masyarakat untuk bisa berpolitik secara bebas demokratis. TNI tentunya memahami dan menyadari bahwa pada kondisi saat ini, netralitas anggota TNI masih sangat diperlukan. Panglima TNI, Jenderal TNI Dr Moeldoko, yang dilantik pada 30 Agustus 2013 telah berjanji akan tetap menjaga netralitas prajurit sesuai rencana strategis TNI, seperti yang telah diamanatkan Negara. Namun, Panglima TNI juga mengingatkan agar elemen masyarakat atau kekuatan politik termasuk para purnawirawan TNI untuk tidak menyeret prajurit ke kancah politik 2014. Pernyataan itu merupakan peringatan bagi elit politik untuk menjaga sikap netral prajurit.

Sikap Panglima TNI itu beralasan, karena penggunaan hak pilih prajurit TNI pada Pemilu dapat menimbulkan perpecahan internal. Apalagi, pada Pemilu saat ini terdapat beberapa mantan petinggi TNI yang menyatakan siap bersaing dalam Pemilihan Presiden 2014. Belum lagi sejumlah mantan Petinggi TNI yang menjadi Calon Anggota Legislatif (Caleg). Oleh karena itu jika TNI sebagai aparat negara yang memegang senjata terseret ikut berpolitik praktis akan muncul kubu-kubu dikalangan militer yang tentunya dapat membahayakan keamanan rakyat dan akhirnya dapat mencoreng perjalanan demokrasi Indonesia.

Disadari bahwa hingga saat ini masih terjadi beberapa persoalan internal yang dilakukan oleh oknum TNI, baik terkait dengan persoalan individu maupun kelompok dan kesatuan. Jika persoalan internal belum dibenahi secara tuntas, maka wajar jika muncul kekhawatiran publik kalau TNI bisa saja terseret ke pusaran politik praktis, terutama dengan kehadiran sejumlah mantan Jenderal dalam bursa Capres. Bukan tidak mungkin para senior yang dulu berpangkat bintang masih memiliki pengaruh untuk menggunakan kekuatan yang dimiliki militer untuk kepentingan politik mereka. Namun demikian

masyarakat tidak perlu khawatir, karena pada dasarnya Prajurit TNI sudah sangat sangat sadar bahwa apabila tidak netral, terlibat politik praktis, apalagi sampai memihak Parpol tertentu dan atau Capres tertentu, resikonya adalah dipecat dari dinas kemiliteran, hal ini sudah merupakan penegasan sekaligus perintah dari Panglima TNI dan ditindak lanjuti oleh Kasad. Seperti yang ditegaskan Kasad (*Baca Kompas, Selasa tanggal 4 pebruari 2014*), prajurit harus menjunjung netralitas setinggi-tingginya, jika ada prajurit yang tidak netral, akan dikenakan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggarannya, namun kalau tindakannya sangat tidak baik dan berdampak luas, kami tidak ragu-ragu terhadap prajurit seperti itu untuk dipecat. Berbagai petunjuk dan atau perintah dari Pimpinan TNI sudah sangat jelas dan rinci, diantaranya : **Pertama**, kampanye dari Parpol manapun tidak diperbolehkan menggunakan fasilitas TNI baik yang berkaitan dengan alat angkut, asrama, lapangan dan lainnya. **Kedua**, keluarga prajurit juga telah diberikan pemahaman tentang netralitas TNI (walaupun memiliki hak pilih dan dipilih), berikutnya telah ditegaskan juga bahwa keluarga Prajurit tidak boleh menggunakan fasilitas yang dimiliki TNI.

Harus dipahami juga bahwa, walaupun anggota TNI tidak menggunakan hak politik, namun bukan berarti TNI buta terhadap dunia politik. Untuk itu setiap prajurit harus dibekali pengetahuan yang luas tentang politik. Selain agar mereka paham tentang kehidupan bernegara, pengetahuan tentang politik juga akan membuat prajurit bisa mengerti dan menghindari jika ada kekuatan politik yang berusaha menarik mereka. Selain itu, pengetahuan politik itu akan bermanfaat suatu waktu jika kedewasaan berpolitik masyarakat dan elit semakin baik, sehingga pada suatu saat nanti dan atau Pemilu dimasa mendatang, setiap prajurit sebagai warga negara Indonesia dengan tetap mengedepankan profesionalismenya memiliki hak yang sama untuk memilih dan dipilih.

Profesionalitas TNI.

Salah satu perubahan fundamental dari era reformasi adalah keluarnya TNI dari arena politik praktis di Indonesia. Komitmen itu terwujud sejak 2004, dimana TNI sepenuhnya tidak terlibat dalam politik praktis. TNI memiliki kewajiban meningkatkan profesionalitas mulai dari peningkatan kualitas fisik, rasa tanggung jawab, keahlian, kedisiplinan, dan sebagainya. Pada saat ini TNI memiliki anggota sebanyak lima ratusan ribu prajurit, bila dihadapkan dengan kondisi geografi, demografi dan kondisi sosial serta perkembangan lingkungan strategis, jumlah

tersebut sangatlah kurang dan dirasa belum ideal. Dilain pihak disetiap tahunnya TNI terpaksa memecat sejumlah prajurit yang melakukan pelanggaran, meskipun diakui bahwa untuk melakukan perekrutan menjadi prajurit TNI tidaklah mudah, walaupun animo masyarakat untuk menjadi prajurit TNI cukup tinggi, tetapi yang memenuhi persyaratan belum optimal. Guna mendapatkan prajurit yang profesional, TNI-AD telah memiliki perencanaan jangka panjang dengan menyeleksi sejumlah lulusan Akademi Militer yang terbaik mulai lulusan Akabri tahun 1984 guna menduduki jabatan-jabatan strategis dimasa mendatang.

Berikutnya, TNI AD juga telah menyusun konsep lima tahunan kedepan, diantaranya melalui transformasi TNI AD dalam rangka menuju TNI AD yang profesional dan modern. Melalui transformasi, diharapkan TNI AD dimasa kini dan masa depan memiliki daya saing, tidak tertinggal dengan negara lainnya, untuk itu harus mampu mengikuti perkembangan dan kemajuan global yang semakin modern, baik yang terkait dengan teknologi komunikasi maupun informasi dan juga transportasi. Dalam kaitan tersebut, maka wujud profesionalitas TNI AD, baik yang berkaitan dengan peningkatan SDM dan Alutsista merupakan penentu bagi terciptanya suasana kondusif yang mendukung pembangunan bangsa dan negara dimasa depan. **Presiden Susilo Bambang Yudhoyono** seringkali menegaskan kepada TNI bahwa untuk menghadapi tantangan masa depan baik di tingkat nasional maupun internasional, TNI harus berprinsip *zero enemy*. Prinsip ini juga sejalan dengan politik internasional yang dianut Indonesia yaitu bebas aktif. Bebas dalam pengertian tidak memihak pada salah satu kekuatan negara besar, dan aktif berperan dalam kancah global memberikan kontribusi positif menciptakan perdamaian dunia. Namun demikian, bukannya TNI tidak siap perang, "Jika ingin damai bersiaplah untuk perang". Oleh sebab itu TNI AD sesuai dengan tugas pokoknya bertanggung jawab pertahanan diwilayah daratan, selalu mengoptimalkan potensi yang dimiliki, baik yang berkaitan dengan Alutsista maupun kualitas SDMnya agar selalu siap siaga menghadapi berbagai persoalan yang datang dari luar negeri maupun dari dalam negeri, termasuk kesiapan membantu Polri dalam pengamanan Pemilu 2014.

Potensi Konflik Dalam Pemilu 2014.

Seperti yang telah diuraikan diatas, bahwa potensi konflik sosial dapat terjadi di beberapa wilayah Indonesia, oleh sebab itu tidak menutup kemungkinan konflik akan timbul kembali pada saat sebelum,

selama dan setelah Pemilu 2014. Kesemuanya itu tentunya dapat mengganggu proses demokrasi yang akan berjalan keempat kalinya di negeri Indonesia tercinta ini. Untuk itulah TNI AD membuat berbagai kajian dan atau analisa tentang prediksi kemungkinan terjadinya ancaman pada Pemilu 2014 di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui lebih awal kemungkinan ancaman yang akan timbul, sehingga TNI AD mampu menyiapkan dan mengerahkan pasukannya dengan cepat guna mencegah sekaligus menanggulangi berbagai bentuk ancaman kemungkinan terjadinya konflik sosial yang timbul di wilayah Indonesia.

Kampanye hitam, pengerahan massa dan politik uang pada Pemilu 2014 merupakan persoalan yang dapat menimbulkan konflik sosial. Popularitas dan elektabilitas masing-masing calon atau kelompok menjadi bagian penting dalam memenangkan pertarungan politik di 2014 ini. Masing-masing pihak tentunya akan menggunakan berbagai cara untuk mengangkat popularitas maupun elektabilitas jagonya masing-masing. Di satu sisi, popularitas dan elektabilitas menjadi syarat penting yang menyehatkan proses demokrasi. Namun di sisi lain, perlu diwaspadai upaya-upaya untuk menjatuhkan popularitas dan elektabilitas pesaing. Penggunaan media internet untuk menyebarkan ide atau gagasan dari masing-masing kandidat sungguh memberikan perbedaan yang cukup signifikan untuk memengaruhi pikiran dan keputusan masyarakat. Potensi ini tentu sangat strategis jika dilihat dari sisi kampanye. Penggunaan media sosial sebagai alat kampanye, bisa jadi positif, namun tak jarang menjadi sesuatu hal yang negatif, bahkan dapat menyesatkan publik. Dipahami bersama bahwa hampir seluruh calon, baik yang menargetkan posisi legislatif maupun eksekutif, berupaya mengoptimalkan potensi yang ada melalui media, terutama internet. Meski UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sudah tegas mengatur tentang berbagai larangan yang tidak boleh digunakan di dunia maya, namun demikian pelanggaran masih terus terjadi. *Black campaign* sendiri merupakan salah satu bentuk dari tindakan yang tidak diperkenankan oleh undang-undang ITE.

Hal ini harus diwaspadai dan dicermati bersama, kemungkinan adanya informasi dan atau kampanye yang mengarah pada penggunaan unsur SARA untuk menyerang lawan politik di dunia maya, kondisi ini cukup mengemuka terkait adanya Otonomi Daerah, khususnya pada setiap penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah. Pada kenyataannya kondisi tersebut sampai saat ini masih berlanjut. Harus

dipahami dan disadari bersama bahwa kampanye yang mengkaitkan dengan unsur SARA menjadi sangat rawan dan sebagai salah satu penghambat terbesar rapuhnya demokrasi. Mengapa demikian, karena persoalan yang dikaitkan dengan unsur SARA seringkali menjadi biang atau penyebab konflik sosial di sejumlah wilayah, sehingga menjadi ancaman nyata bagi keutuhan dan kedaulatan NKRI.

Barangkali yang menjadi persoalan saat ini adalah, penggunaan *black campaign* yang menjadi pemicu utama terjadinya konflik yang berasal dari aktivitas dunia maya masih sulit ditindak. Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) mengakui masih kesulitan menindak pelaku *black campaign* di dunia maya pada Pilkada DKI, dua tahun silam. Selain kesulitan dalam pembuktian, Panwaslu dan petugas keamanan juga masih kesulitan menindak pelaku *black campaign* karena berada pada ruang abu-abu.⁴ Akun media sosial memang dimiliki oleh pribadi yang memiliki hak untuk melakukan berbagai hal melalui akunnya. Namun menjadi masalah ketika apa yang disampaikan melalui akun tersebut menjadi konsumsi publik. Kondisi inilah kemungkinan menjadi salah satu faktor yang membuat aparat yang bertanggung jawab seperti Panwaslu kesulitan menindak pelaku *black campaign* dengan undang-undang ITE.

Potensi konflik tidak hanya terjadi dalam *black campaign* yang dilakukan melalui internet. Pemberitaan di media massa arus utama juga bisa menjadi salah satu pemicu yang dapat melahirkan konflik di masyarakat. Pemberitaan yang kurang berlandaskan pada nilai-nilai objektivitas, apalagi dalam bentuk serangan terhadap pihak lain, sudah barang tentu berpotensi melahirkan konflik. Fakta bahwa saat ini kepemilikan media massa arus utama dikuasai oleh pihak yang turut serta dalam kancah politik 2014, tidak bisa dihindari. Pers bebas di era kini terkadang terperosok menjual gosip dan disinformasi, akhirnya objektivitas mediaupun mengundang pertanyaan publik.

Kondisi seperti tersebut diatas membawa warga masyarakat pada pemahaman bahwa potensi konflik yang bermuara dari perang dunia maya sangat mungkin terjadi. Oleh sebab itu, TNI AD harus sigap dan siap melakukan berbagai tindakan antisipatif sejak dini dalam menjaga keutuhan dan keamanan wilayah NKRI.

Pengamanan Pemilu di Wilayah Indonesia.

Dalam kesempatan meninjau latihan upacara defile pasukan di lapangan Kodam V/Brawijaya Surabaya pada 14 Desember 2013, Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Jenderal TNI Budiman menyatakan

siap mengamankan penyelenggaraan Pemilu 2014 di seluruh wilayah Tanah Air. Persiapan TNI AD meliputi persiapan alat komunikasi, kendaraan, dan penguasaan teknologi informasi komunikasi untuk para pejabat teritorial dari tingkat Bintara Pembina Desa (Babinsa) sampai dengan tingkat Komando Daerah Militer. Sekitar 70% kendaraan Babinsa telah dilengkapi oleh Negara. TNI AD juga telah menyiapkan pelaporan kondisi keamanan menjelang Pemilu dari tingkat Kotama/Kodam atau satuan-satuan yang akan langsung dilaporkan ke Markas Besar Angkatan Darat. Pengamanan Pemilu menjadi prioritas pertama penugasan kepada seluruh satuan-satuan militer di TNI AD.⁵ Fungsi lain yang sangat vital sebagai deteksi dini penanggulangan kerawanan sosial adalah menempatkan intelijen. Tugas intelijen sendiri bukan bermaksud menakuti masyarakat, namun mengawasi situasi dan perkembangan yang terjadi di lapangan. TNI AD juga akan terus memantau dinamika sosial masyarakat, terutama di daerah rawan konflik yang umumnya wilayah yang menjadi basis para pendukung fanatik Parnpol, dimana kemungkinan terjadi bentrok saat masing-masing Parnpol bertemu di waktu kampanye Pemilu. Berikutnya, pemantauan daerah rawan konflik akan terus dilakukan melalui pendataan yang diperbarui setiap bulannya. Bahkan TNI AD telah menyiapkan pasukan di setiap tingkatan, baik Pasukan Anti Huru Hara (PHH) maupun ditingkatkan Kodim disiagakan 1 Satuan Setingkat Peleton (SST) atau sekitar 30 prajurit. Sementara di tingkat Korem disiagakan sebanyak 1 hingga 2 Satuan Setingkat Kompi (SSK). Satu SSK setara dengan 100 prajurit, sedangkan tingkat Kodam telah menyiagakan 1 batalyon cadangan. Khusus untuk Kostrad menyiapkan 3 satuan Setingkat Batalyon (SSY) cadangan. Satu SSY berjumlah 1.000 prajurit.

Berikutnya, TNI juga telah bekerjasama dengan KPU Pusat untuk pengamanan dan pengawalan pendistribusian logistik Pemilu, termasuk di daerah yang tingkat kerawannya tinggi seperti di Papua yang seringkali terjadi gangguan keamanan oleh kelompok sipil bersenjata. Disamping itu semua, TNI juga telah melakukan berbagai bentuk latihan, termasuk kemungkinan adanya terorisme yang mengganggu jalannya pesta demokrasi di Indonesia. Latihan-latihan tersebut antara lain : latihan Satuan Penanggulangan Teror (Satgultor) TNI dengan sandi "Waspada Nusa V" yang telah dilaksanakan di Bandara Udara Halim Perdanakusuma pada pertengahan Januari 2014. Pelatihan ini juga untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas satuan Gultor TNI yang dihadapkan pada kecenderungan kondisi faktual perkembangan

aksi dan modus operandi terorisme. Pelatihan ini melibatkan sebanyak 507 anggota TNI, yang terdiri atas 35 orang penyelenggara, 55 Sat-81 TNI AD, 37 personil Denjaka TNI AL, 38 personel Satbravo 90 TNI AU, 5 personil Bais TNI dan 337 unsur pendukung.⁶ Melalui berbagai perencanaan dan kesiapan serta kesiap siagaan seperti yang telah diuraikan diatas diharapkan TNI AD mampu memerankan dan melaksanakan tugas pokoknya secara profesional, khususnya dalam rangka membantu mengamankan penyelenggaraan Pemilu 2014 dibarengi dengan penuh kejujuran, keadilan, tertib, lancar dan aman.

Penutup.

Tak terasa negara Indonesia telah 68 tahun merdeka, berbagai kemajuan telah tercapai dan dirasakan bersama hingga memasuki tahun 2014 menuju tahun transisi politik demokratis. Namun naiknya eskalasi politik meminta perhatian seluruh komponen bangsa untuk tetap bersatu dan memberi sumbangsih positif demi kebaikan bersama. TNI AD selalu tanggap dengan kondisi rakyat, memberikan kontribusi maksimal dalam persoalan faktual bangsa dalam rangka keutuhan dan tegaknya kedaulatan NKRI. Memasuki tahun politik 2014, TNI AD akan senantiasa bersikap netral dan senantiasa menjaga profesionalitas serta tidak melibatkan diri dalam arena politik praktis serta menjamin pelaksanaan Pemilu yang aman, tertib, jujur dan adil.

Untuk mewujudkan profesionalitas TNI AD dalam menyikapi tahun politik 2014 di wilayah, maka perlu adanya beberapa **rekomendasi** guna mewujudkan keberhasilan tugas pokok, antara lain sebagai berikut : **Pertama**, pentingnya pemahaman netralitas TNI bagi seluruh prajurit TNI dimanapun berada dan bertugas agar pemilu 2014 berjalan secara demokratis, lancar dan aman. **Kedua**, pentingnya pemahaman bantuan TNI kepada Polri oleh seluruh prajurit TNI dan komponen masyarakat lainnya, agar terjadi sinergitas dalam setiap menghadapi dan atau menanggulangi berbagai persoalan yang terjadi di wilayah. **Ketiga**, optimalisasi latihan PHH oleh seluruh prajurit TNI AD guna menghindari kesalahan prosedur dalam setiap menghadapi aksi unjuk rasa di lapangan, berikutnya diperlukan pemenuhan alat dan perlengkapan PHH guna mendukung keberhasilan tugas di lapangan. **Keempat**, Pemahaman cyber guna mengikuti perkembangan dan kemajuan politik, terutama kampanye melalui dunia maya dalam rangka mendukung serta mewujudkan stabilitas pertahanan dan keamanan. **Kelima**, disamping membantu pengamanan Pemilu 2014 ini, TNI AD juga dituntut siap siaga untuk melaksanakan tugas

penanggulangan bencana alam, mengingat cuaca ekstim yang sedang terjadi di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini perlu mendapat perhatian serius karena tidak menutup kemungkinan terjadi bencana alam pada saat penyelenggaraan Pemilu.

Harus diakui dan disadari oleh seluruh komponen bangsa bahwa setelah demokrasi didapatkan melalui reformasi 1998, ternyata masih banyak persoalan bangsa yang perlu dibenahi bersama. Mengapa demikian, karena penerapan demokrasi di negara tercinta Indonesia ini masih terkesan kebablasan, oleh sebab itu meminta banyak kesabaran dan menuntut lebih banyak keberanian, terutama yang terkait dengan penegakkan aturan hukum yang berlaku di Indonesia.

Hanya satu yang dapat menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut diatas, yaitu pentingnya "*penguatan sinergitas seluruh anak bangsa*", hindari dendam politik, mari kita bersama-sama bersatu padu menghadapi tantangan bangsa kedepan yang semakin kompleks, demi kesejahteraan rakyat dan menjaga martabat bangsa, keutuhan bangsa dan kedaulatan NKR berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Demikian penulisan tentang profesionalitas TNI AD dalam menyikapi tahun politik 2014, semoga dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi seluruh komponen masyarakat Indonesia dalam rangka menuju Indonesia yang sejahtera, aman dan damai. Apabila terdapat penulisan yang kurang tepat mohon adanya koreksi guna penyempurnaan penulisan ini.

Semoga bermanfaat,,

Sumber:

1. http://kesbangpol.kemendagri.go.id/index.php/seputar_kesbangpol/detailberitafoto/2357
2. <http://klipingad.blogspot.com/2014/01/6-daerah-paling-rawan-konflik-di-tahun.html>
3. <http://indikator.co.id/news/details/1/41/Laporan-Konpers-Rilis-Survei-Sikap-dan-Perilaku-Pemilih-terhadap-Money-Politics->
4. <http://news.detik.com/read/2012/05/12/052632/1915469/10/panwaslu-akui-belum-bisa-menindak-black-campaign-di-dunia-maya>
5. <http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/13/12/14/mxsu60-kasad-tni-ad-siap-amankan-pemilu-2014>
6. <http://satuharapan.com/read-detail/read/tni-siap-jaga-keamanan-pemilu/>

RIWAYAT HIDUP SINGKAT PENULIS

I. Data Pokok.

1. Nama : Bambang Budi Waluyo. YP
2. Pangkat : Mayjen TNI/29278
3. Tempat/Tgl. Lahir : Jakarta Barat/19-11-1956
4. Agama : Islam
5. Status : Kawin
6. Sumber Pa/Th : Akabri/1981
7. Jabatan : Pangdam II/Sriwijaya

II. Riwayat Pendidikan Militer.

A. Dikbangum.

1. Sussarcab Infanteri : 1980
2. Akabri : 1981
3. Suslapa-I/Inf : 1988
4. Diklapa-II/Inf : 1990
5. Seskoad : 1997
6. Lemhannas : 2009

B. Dikbangspes.

1. Lat Sar Para : 1980
2. Sus TI Terinbatmin : 1982
3. Jump Master : 1982
4. Susjurpa Intel Pur : 1984
5. Sussarpa Intel : 1987
6. Yun.combat
Instr.course/1982 : 1991
7. Sus Bahasa Inggris : 1992
8. Sus Danyonif : 1995
9. Suspa Intel : 1998

III. Riwayat Penugasan.

A. Luar Negeri.

1. Australia : 1991
2. Australia : 1992
3. Australia : 1993

IV. Riwayat Jabatan.

1. Danton I/B/Linud-700 Dam-VII/Wrb
2. Danki B/Linud-700/BS Dam-VII/Wrb
3. Kasi-1/Intel Linud-700/BS
4. Dankima Linud-700/BS Dam-VII/Wrb
5. Dan BKI-A Deninteldam-VII/Wrb
6. Kasilitbang Ops Sdirbinintel
7. Wadandeninteldam-IX/Udy
8. Danyonif-742 Rem-162/WB
9. Pamen Kodam-IX/Udy (Dik Sesko)
10. Kadepsus Intel Pusdik Intel
11. Kadeppengsus Pusdikintelad
12. Dandeninteldam-II/Swj
13. Dandim-0413/Bangka Rem-044/GP
14. Kasrem-044/Gapo Dam II/Swj
15. Asintel Kasdam II/Swj
16. Danpusdik Intel Kodiklat
17. Paban II/Pampers Spamad
18. Danrem-091/ASN Dam VI/Tpr
19. Dandenma Mabes TNI
20. Pamen Mabes TNI (Dik Lemhanas)
21. Pasahli Tk-II Kawasansus & LH
22. Kasdam XVI/Ptm
23. Staf Khusus Kasad
24. Ta Pengajar Bid. Geostrategi dan
Tannas Lemhannas
25. Pangdam II/Swj

PROFESIONALITAS TNI AD DALAM MENYIKAPI TAHUN POLITIK 2014 DI WILAYAH



Oleh: Mayjen TNI Dedi Kusnadi Thamim
(Pangdam III/Siliwangi)

Konsep Pembinaan Teritorial yang sudah diimplementasikan selama ini, harus dipertahankan dan ditingkatkan terutama dalam menghadapi Tahun Politik 2014 di wilayah. Konsep tersebut hendaknya diselaraskan secara sinergis dengan program penyelenggaraan pemilu

Profesionalitas TNI AD.

Sebagaimana diketahui, pertahanan negara diperlukan dalam rangka mempertahankan kedaulatan, keutuhan wilayah suatu negara dan melindungi keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan baik yang muncul di dalam negeri maupun luar negeri. Bagi Indonesia Pertahanan Negara merupakan upaya nasional yang melibatkan seluruh potensi dan kekuatan nasional

yang diselenggarakan secara terpadu, terarah, efektif dan efisien berdasarkan pada sistem pertahanan negara yaitu Sistem Pertahanan Rakyat Semesta. Dalam konteks TNI AD, pertahanan negara dengan konsep pertahanan kewilayahan adalah, suatu kemampuan pertahanan wilayah yang dikembangkan dengan bertumpu pada pertahanan pulau besar dan rangkaian pulau kecil atau biasa dikenal dengan *Land Base Oriented*, hal tersebut mensyaratkan adanya kemampuan prajuritnya yang profesional dan handal serta didukung Alutsista yang memadai. Sehingga sudah sewajarnya apabila pembentukan prajurit yang profesional dalam rangka menghadapi tuntutan perkembangan tugas, adalah hal yang menjadi prioritas bagi TNI AD.

Dalam kamus Webster Dictionary, kata "**profesional**" berasal dari bahasa Yunani "*profess*" (ikrar) yang kemudian menjadi kata bentukan *Professionalism* yang mempunyai arti "*tingkah laku, tujuan, sifat-sifat, karakteristik mengenai keistimewaan suatu profesi, atau manusia profesional dan karakteristik standar atau metode profesional*". Sehingga dapat disimpulkan **Profesional** adalah *standar yang dikenakan terhadap suatu pekerjaan yang dilakukan dengan lebih dilandasi oleh keyakinan akan adanya nilai-nilai kebenaran, kehormatan, kecintaan dan keterpanggilan di dalam pekerjaan itu, baik dalam hal menguasai keahlian yang diperlukan maupun pelayanan atas nama pekerjaan itu kepada orang lain, dari pada sekedar, atau semata-mata untuk memperoleh bayaran*. Sedangkan menurut **Samuel Huntington**, untuk membentuk suatu profesionalisme khususnya dalam dunia militer dibutuhkan adanya tiga prasyarat profesionalisme yaitu : adanya keahlian (*expertise*), tanggung jawab sosial (*social responsibility*), dan adanya organisasi kesejawatan yang mengikat (*corporateness*). Hal tersebut senada dengan apa yang disampaikan oleh **Morris Janowitz** bahwa profesionalisme dapat terbentuk karena adanya : 1) suatu keahlian yang sangat spesifik yang diperoleh melalui latihan yang intensif, 2) standar etika dan kinerja, 3) rasa identitas kelompok, dan 4) sistem administrasi internal.



Dari sudut pandang TNI sendiri yang dimaksud dengan **profesional** adalah tentara yang terlatih, terdidik, diperlengkapi secara baik, tidak berpolitik praktis, tidak berbisnis, dan dijamin kesejahteraannya, serta mengikuti kebijakan politik negara yang menganut prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan hukum internasional yang telah diratifikasi (UU No. 34 tahun 2004 ttg TNI).

Dari sini terlihat bahwa pada dasarnya pengertian profesional secara konvensional menurut pandangan negara Barat dengan pengertian yang dimiliki oleh TNI tidak jauh berbeda, yang membedakan adalah adanya penekanan tentang **jaminan kesejahteraan** dan **mengikuti kebijakan politik negara**. Untuk permasalahan mengikuti politik negara, sampai saat ini TNI mampu melaksanakan hal tersebut, bahkan dapat dikatakan TNI melakukan setiap tugas dan perintah yang diberikan oleh pemerintah/negara tanpa adanya "reserve" sama sekali.

Tahun Politik 2014 & Permasalahan yang Mungkin Timbul.

Salah satu perwujudan keterlibatan rakyat dalam proses politik negara adalah pemilihan umum. Pemilu merupakan sarana bagi rakyat untuk ikut menentukan figure dan arah kepemimpinan Negara dalam periode waktu tertentu. Ide demokrasi yang

menyebutkan bahwa dasar bagi penyelenggaraan negara adalah kehendak rakyat merupakan dasar bagi penyelenggaraan pemilu. Maka ketika demokrasi mendapatkan perhatian yang luas dari masyarakat dunia, penyelenggara Pemilu yang demokratis menjadi syarat menjadi penting dalam pembentukan kepemimpinan sebuah negara.

Dalam kurun waktu yang tidak lama lagi bangsa Indonesia akan melaksanakan Pemilu Legislatif dan Pemilihan Presiden. Suhu politik pada tahun 2013 sudah sangat panas dan diawal tahun 2014 banyak sekali gesekan-gesekan politik antar partai yang satu dan partai yang lainnya sering terjadi. Aktivitas politik yang dilakukan oleh para kandidat ataupun partai yang bertarung pada pemilu 2014 nanti akan berpengaruh terhadap stabilitas keamanan.

Implikasi kegiatan Pemilu dan Pemilu Kada di wilayah/daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, dimulai dari proses penentuan kontestan pemilu sampai dengan pelaksanaannya (tahun 2014). Adapun kemungkinan kegiatan yang aktif dilakukan masing-masing Parpol dalam memperoleh dukungan suara di tiap wilayah/daerah diantaranya dengan melaksanakan sosialisasi dan komunikasi di masyarakat dengan metoda anjarsana/silaturahmi di wilayah, kegiatan sosial, pelayanan kesehatan/pengobatan gratis dan Pasar murah maupun kegiatan lain yang bersifat hiburan seperti jalan santai, sepeda

santai dan lain-lain.

Adapun permasalahan yang mungkin timbul, diantaranya adalah :

Pertama, permasalahan pada saat/proses penetapan daftar pemilih tetap. Hal ini dikarenakan proses verifikasi pemilih masih secara manual, di sisi lain tenaga pelaksana sangat terbatas dengan biaya terbatas pula, selain itu pengiriman logistik pemilu terutama yang di daerah pelosok masih mengalami keterlambatan. Perilaku kampanye yang masih berupaya melakukan pengerahan masa masih sering memunculkan gesekan antara para pendukung, sehingga seringkali berpotensi konflik, disamping itu masih adanya cara pendekatan terhadap individu konsisten, yang kental dengan money politik. Sampai dengan saat sekarang kesiapan DPT sebagai dasar penyelenggaraan pemilu 2014 masih dipertanyakan oleh sebagian kontestan pemilu, bila hal ini tidak bisa dituntaskan kemungkinannya akan terjadi hal-hal yang mengganggu kelancaran pemilu seperti akan terjadi konflik antara partai. Bahkan bisa berdampak pada penundaan penyelenggaraan pemilu, apabila tidak dapat diatasi dengan segera. **Kedua**, adanya keterlambatan dalam pendistribusian maupun pengumpulan logistik pemilu merupakan salah satu kerawanan yang dapat menghambat kelancaran



pelaksanaan pemilu. Keterlambatan itu bisa disebabkan oleh dua faktor, baik karena faktor teknis, seperti transportasi maupun proses penyalurannya yang kurang tepat sasaran. Maupun faktor non-teknis, seperti gangguan cuaca dan bencana alam. Namun demikian apapun persoalannya, hal tersebut akan dimanfaatkan oleh kelompok tertentu yang mengembangkan persoalan ini untuk menyudutkan pemerintah dan menciptakan opini negatif kepada masyarakat luas. **Ketiga**, situasi terburuk yang akan terjadi dalam proses menuju penyelenggaraan pemilu 2014 adalah terjadinya konflik secara terbuka antara para konstituen. Situasi ini bisa terjadi akibat dari adanya akumulasi situasi-situasi kecil yang terjadi tapi tidak segera diantisipasi. Atau bisa juga terjadi akibat dari adanya persoalan yang tidak diselesaikan secara profesional dan proporsional oleh pihak penyelenggara Pemilu maupun aparat keamanan.

Dari kondisi tersebut TNI AD sebagai salah satu komponen bangsa yang memiliki tanggung jawab keamanan, merasa berkepentingan untuk berperan aktif dalam rangka mensukseskan pemilu yang aman, tertib dan damai. TNI AD tidak bekerja sendiri melainkan bersinergi dan membantu pihak penyelenggara (KPU maupun Panwaslu) dan pihak aparat keamanan dan ketertiban masyarakat (POLRI). Berkaitan dengan hal tersebut, maka strategi yang diterapkan adalah :

Pertama, Membentuk Satgas Pam Pemilu yang Professional & Proporsional Secara Berjenjang Sesuai Dengan Hierarki Komando Kewilayahan. Seperti telah disampaikan sebelumnya salah satu ciri dari



profesionalitas adalah adanya keahlian (*expertise*), karena nilai atau *value* seorang prajurit dapat dilihat dari bagaimana ia menguasai dan mengerjakan pekerjaan atau tugas pokoknya. Dihubungkan dengan pembentukan Satgas Pam Pemilu sebagai sebuah sistem, maka diharapkan antara sub sistem dan sub-sub sistem yang lain dibawahnya saling mengisi dan bekerja sama sehingga sistem tersebut dapat bekerja dengan baik dan berdaya guna. Dalam rangka peningkatan profesionalisme khususnya pelaksanaan tugas pengamanan Pemilu, maka harus terlebih dahulu diberi pelatihan & pengetahuan melalui latihan dalam satuan ataupun latihan pratugas yang dilaksanakan secara berjenjang sampai dengan setingkat Kodim. Peran para Dansat adalah bagaimana mereka dapat membantu prajuritnya agar bisa fokus pada tugas pokok, paham pada kekuatan yang mereka miliki dan kemudian dieksploitasi dengan cara yang profesional dan proposional.

Kedua, Peningkatan Koordinasi. Menyadari bahwa tugas pengamanan pemilu adalah tugas berat yang dilaksanakan secara sinergis, maka koordinasi harus dilakukan secara lebih ketat, fleksibel dan terus-menerus. Peningkatan koordinasi sangat penting dilaksanakan, baik secara kualitas & kuantitas sampai ketinggian perorangan, sekecil-kecilnya agar terhindar dari terjadinya miss komunikasi di lapangan. Di lingkungan internalpun demikian, keahlian dan spesialisasi yang dimiliki oleh personel TNI AD harus bisa dikoordinasikan dengan baik dan sinergis, agar setiap kelompok/satuan dapat saling mengisi dan mengarah pada pencapaian tugas pokok.

Ketiga, Bersikap, Berbuat dan Berpenampilan Terbaik. Satu hal penting yang harus disadari baik oleh prajurit maupun satuan, sekalipun bahwa membangun kepercayaan tidak lepas dari bersikap & berpenampilan simpatik, sekalipun dalam kondisi psikologis yang kurang menguntungkan. Bersikap, berbuat dan berpenampilan terbaik dimaksudkan adalah setiap personel yang bertugas di wilayah harus menunjukkan sikap seorang prajurit yang tegas namun tidak kasar serta harus tetap menjaga netralitas. Berbuat hanya untuk kepentingan negara dan rakyat serta senantiasa menunjukkan performa terbaik. Apabila para prajurit mampu melakukan hal ini, tentunya akan terbentuk profesionalitas yang diharapkan, sehingga citra baik TNI AD pun akan terbentuk dan diakui oleh publik.

Keempat, Senantiasa Menggunakan Pendekatan Hukum. Bahwa penggunaan personil, sarana & prasarana militer dalam rangka membantu memecahkan permasalahan bangsa, khususnya menghadapi tahun pemilu 2014, aspek legal hukum



tetap tidak boleh ditinggalkan. Disinilah perlunya keputusan politik dalam setiap pelibatan TNI AD, terutama apabila porsi penggunaan kekuatan TNI AD yang menggunakan kekuatan militer lebih dominan saat itu. Hal ini perlu disadari, karena pada dasarnya penggunaan kekuatan militer cenderung instrumen kekerasanlah yang digunakan, dimana dalam instrumen kekerasan tersebut apabila timbul korban maka kita tidak terjebak dalam persoalan hukum, atau paling tidak pendekatan hukum baik pada saat berlangsungnya operasi maupun sesudah operasi tetap dilaksanakan.

Kelima, Laksanakan Pembinaan Teritorial Dengan Sebaik-Baiknya. Pada dasarnya penggunaan atau pelibatan TNI AD adalah dalam rangka terlaksananya kesinambungan pembangunan didalam negeri terutama menghadapi tahun politik 2014, hanya bisa dicapai apabila situasi dan kondisi dalam keadaan kondusif, damai dan terkendali. Karenanya penggunaan kekuatan TNI AD baik itu dalam bentuk peran, sumbang pikir dan kegiatannya seyogyanya dapat diarahkan kepada kenyamanan & keamanan masyarakat. Dalam hal ini TNI AD mempunyai cara yang tepat untuk mengimplementasikannya, yaitu dengan menggunakan konsep Pembinaan Teritorial. Karena salah satu sasaran Pembinaan Teritorial



adalah mewujudkan ketahanan masyarakat dalam menghadapi kerawanan maupun ancaman, maka dalam menghadapi dan mengantisipasi Pemilu 2014, penerapan program Pembinaan Teritorial harus benar-benar terkoordinasikan dan dapat disinergiskan dengan program dan kegiatan instansi terkait baik aparat penyelenggara maupun aparat keamanannya.

Kesimpulan.

Profesionalisme mengandung *spirit, jiwa, karakter, semangat dan nilai kejuangan*. Profesionalisme ada karena adanya penilaian dan pengakuan dari orang lain, dan karena profesionalisme pulalah suatu organisasi bisa bertahan menghadapi segala tantangan jaman.

Dalam rangka menyikapi dan menghadapi Tahun Politik 2014 di wilayah, TNI AD beserta jajarannya harus lebih meningkatkan profesionalisme prajuritnya baik dari sisi performa fisik maupun sisi mental serta tetap menjaga netralitasnya.

Konsep Pembinaan Teritorial yang sudah diimplementasikan selama ini, harus dipertahankan dan ditingkatkan terutama dalam menghadapi Tahun Politik 2014 di wilayah. Konsep tersebut hendaknya diselaraskan secara sinergis dengan program penyelenggaraan Pemilu.



RIWAYAT HIDUP SINGKAT PENULIS

I. Data Pokok.

- | | |
|----------------------|-------------------------|
| 1. Nama | : Dedi Kusnadi Thamim |
| 2. Pangkat | : Mayjen TNI/29589 |
| 3. Tempat/Tgl. Lahir | : Bandung/31-08-1958 |
| 4. Agama | : Islam |
| 5. Status | : Kawin |
| 6. Sumber Pa/Th | : Akabri/1983 |
| 7. Jabatan | : Pangdam III/Siliwangi |

II. Riwayat Pendidikan Militer.

A. Dikbangum.

- | | |
|------------------|--------|
| 1. Sussarcab Inf | : 1982 |
| 2. Diklapa I | : 1989 |
| 3. Diklapa II | : 1992 |
| 4. Seskoad | : 1999 |
| 5. Sesko TNI | : 2003 |
| 6. Lemhannas | : 2009 |

B. Dikbangspes.

- | | |
|------------------------------|--------|
| 1. Sussar Para | : 1982 |
| 2. Tar OLI | : 1986 |
| 3. Tar PPH | : 1986 |
| 4. Sus Danki | : 1986 |
| 5. Tartih SJM | : 1987 |
| 6. Tar Bintel Fungsi Komando | : 1996 |
| 7. Sus Widyaswara | : 1996 |
| 8. Sus Danyonif | : 1997 |
| 9. Sus Danrem | : 2007 |

III. Riwayat Penugasan.

A. Dalam Negeri.

- | | |
|----------------------|--------------------|
| 1. Ops. Tim-Tim | : 1984, 1990, 1994 |
| 2. Ops. Rusuh Sampit | : 2001 |
| 3. Ops. Pam SU MPR | : 2004 |
| 4. Ops. Pam KTT E.A | : 2005 |
| 5. Ops. Pam KTT ASIA | : 2005 |

B. Luar Negeri.

- | | |
|--------------|--------|
| 1. Malaysia | : 2003 |
| 2. Australia | : 2009 |
| 3. Brunai | : 2012 |
| 4. Kamboja | : 2012 |
| 5. China | : 2012 |
| 5. Amerika | : 2012 |

IV. Riwayat Jabatan.

1. Danton Ban/C Yonif L-700/BS Dam XIV/Hsn
2. Danton-1/C Yonif L-700/BS Dam XIV/Hsn
3. Danton-1/B Yonif L-700/BS Dam XIV/Hsn
4. Dankipan A Yonif L-700/BS Dam XIV/Hsn
5. Kasi-2/Ops Yonif L-700/BS Dam XIV/Hsn
6. Wadanyonif-521 Rem-082/SPYJ Dam V/Brw
7. Kasdim-0821/LJG Rem-083/BDJ Dam V/Brw
8. Danyonif-527/BY Rem-083/BDJ Dam V/Brw
9. Kabag Dikbangum Sdirbindiklat Pussenif
10. Danbrigif-1/PIK/JS Dam Jaya
11. Asops Kasdam Jaya
12. Danrem-16/WS Dam IX/Udy
13. Irdam VII/Wrb
14. Sekretaris Pussenif Kodiklat AD
15. Pati Ahli Kasad Bid. Jemen Sishankamneg
16. Kasdam IV/Dip
17. Danpussenif Kodiklat AD
18. Asops Kasad
19. Pangdam III/Siliwangi

PENGUATAN BINTER DALAM MENDUKUNG TUGAS PEMERINTAH DAERAH



Oleh : Mayjen TNI Bachtiar, S.IP, M.AP
(Pangdam VII/Wirabuana)

Dinamika perkembangan tata kehidupan masyarakat dewasa ini berkembang dengan sangat pesat dan membawa dampak kepada perubahan sikap perilaku masyarakat tidak hanya di lingkup nasional, namun juga telah merambah sampai di tingkat lokal provinsi dan pedesaan. Kondisi tersebut mengakibatkan tantangan tugas Binter oleh Satkowil dalam membantu Pemda kedepan semakin tinggi dan kompleks.

Ditengah pusaran dinamika global yang semakin cepat dewasa ini, pengaruh yang ditimbulkannya tidak hanya membawa imbas kepada perubahan tata hidup masyarakat di kawasan nasional kita, namun juga telah menyentuh di tingkat lokal provinsi bahkan sampai ke pelosok pedesaan. Hal tersebut ditunjukkan dengan semakin luas dan kompleksnya persoalan-persoalan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah dalam mengakselerasikan

berbagai program pembangunan di wilayahnya. Seperti halnya di wilayah Sulawesi yang merupakan bagian dari wilayah pembinaan Kodam VII/Wirabuana, belakangan ini banyak diwarnai oleh dinamika perubahan tata kehidupan sosial di masyarakat yang semakin tinggi, baik yang menyangkut aspek geografi, demografi maupun kondisi sosial. Sebagai bagian dari kelembagaan pemerintah yang ada di wilayah Sulawesi, Kodam VII/Wrb mempunyai tugas dan tanggung jawab melaksanakan pembinaan wilayah pertahanan darat yang mencakup seluruh wilayah Sulawesi. Sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor : 34/2004 tentang TNI, maka tugas dan tanggung jawab tersebut dilaksanakan dalam rangka menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah dan melindungi segenap bangsa yang diselenggarakan dalam bentuk Operasi Militer Perang (OMP) dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Dalam Pasal 7 ayat (2) poin b, diamanatkan salah satu tugas OMSP yang harus dilaksanakan oleh Kodam VII/Wrb sebagai bagian dari TNI yaitu membantu tugas Pemerintah Daerah (Pemda), yang direalisasikan melalui pelaksanaan tugas Pembinaan Teritorial (Binter) oleh seluruh Satuan Komando Kewilayahan (Satkowil) jajaran Kodam VII/Wrb. Terkait dengan tugas Binter oleh Satkowil, pada hakekatnya merupakan bentuk kegiatan pemberdayaan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini, guna membangun, memelihara, meningkatkan dan memantapkan Kemanunggalan TNI-Rakyat, melalui kegiatan bantuan untuk mengatasi kesulitan rakyat. Dalam hal ini, proses pembinaannya diarahkan kepada terwujudnya ruang juang (aspek geografi), alat juang (aspek demografi) dan kondisi juang (aspek kondisi sosial) serta kemanunggalan TNI-Rakyat yang tangguh bagi kepentingan pertahanan negara. Di era sekarang ini, tentunya tugas tersebut menjadi tantangan yang semakin berat dengan adanya pergeseran tata kehidupan global dalam segala aspek. Disamping itu, kesamaan pemahaman dan pemikiran serta legitimasi terhadap pelaksanaan tugas Binter oleh segenap kelembagaan, hingga saat ini masih merupakan persoalan yang harus dituntaskan. Permenhan RI Nomor 40/2011 tentang



Kebijakan Pertahanan Negara yang dikeluarkan oleh Kemenhan RI beberapa waktu lalu, pada kenyataannya belum sepenuhnya memberikan legitimasi terhadap tugas Binter, terutama di lingkup Pemda Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Selaras dengan hal tersebut, guna menjamin pelaksanaan tugas dan implementasi kegiatan Binter yang lebih baik dan berhasil di masa mendatang, maka salah satu pemikiran konseptual Kodam VII/Wrb diwujudkan dalam perumusan penguatan pelaksanaan tugas Binter dalam membantu tugas Pemda, yang disesuaikan dengan perkembangan terkini dinamika kehidupan sosial masyarakat di seluruh wilayah Sulawesi. Oleh karena itu, pembahasan berikut ini akan mengupas tentang beberapa permasalahan terkini di seluruh wilayah Sulawesi, baik aspek geografi, demografi dan kondisi sosial serta langkah/tindakan yang harus dilakukan oleh Satkowil jajaran Kodam VII/Wrb, sebagai upaya penguatan pelaksanaan tugas Binter di wilayah masing-masing.

Pembahasan.

Perkembangan lingkungan strategis yang turut dipengaruhi perkembangan dinamika kehidupan

global saat ini, telah melahirkan berbagai isu sentral dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara di belahan dunia. Termasuk di wilayah Sulawesi, perkembangan isu sentral yang menyangkut kelangsungan pembangunan di wilayah ini, semakin tinggi dan kompleks. Hal tersebut tampak dari munculnya berbagai persoalan, baik pada aspek geografi, demografi maupun kondisi sosial di masyarakat. Mengingat kecenderungan pergeseran paradigma pola pikir dan sikap masyarakat di wilayah Sulawesi yang semakin maju, dasar pijakan proses kegiatan pembinaan yang harus dicermati oleh segenap aparat Satkowil jajaran Kodam VII/Wrb kedepan adalah penerapan Binter yang dapat membangun dan mewujudkan "SMART POWER, HARD POWER DAN SOFT POWER". Dalam konteks pembinaan terhadap segenap persoalan yang mengarah kepada perubahan sebuah sistem yang dapat dirasakan/dihitung, maka dapat menggunakan pendekatan secara *hard power* (perubahan konsep/tatanan). Bila bersentuhan dengan persoalan pembangunan karakter perilaku yang bersifat abstrak ataupun menumbuhkan kharisma di mata masyarakat, dapat mengedepankan pendekatan *soft power* (diskusi, sosialisasi, seminar). Sedangkan

smart power merupakan gabungan dari keduanya dan memerlukan sedikit sentuhan ekonomi dalam mewujudkannya.

Sejalan dengan hal tersebut, titik kulminasi tertinggi keberhasilan pelaksanaan tugas Binter di wilayah Sulawesi, juga sangat ditentukan oleh dukungan penuh dari Pemda setempat. Hal ini sangat diperlukan, mengingat keterbatasan yang dimiliki oleh Satkowil jajaran Kodam VII/Wrb. Tanpa dukungan dari Pemda, maka Satkowil jajaran Kodam VII/Wrb tidak akan dapat melaksanakan tugas Binter secara optimal. Oleh karena itu, kesamaan persepsi, koordinasi dan integrasi antara Satkowil, Pemda dan kelembagaan lainnya dalam berbagai kegiatan Binter mutlak diperlukan, guna mewujudkan sinergitas dan harmonisasi yang kuat antara TNI, Pemda dan masyarakat di wilayah Sulawesi.

Aspek Geografi.

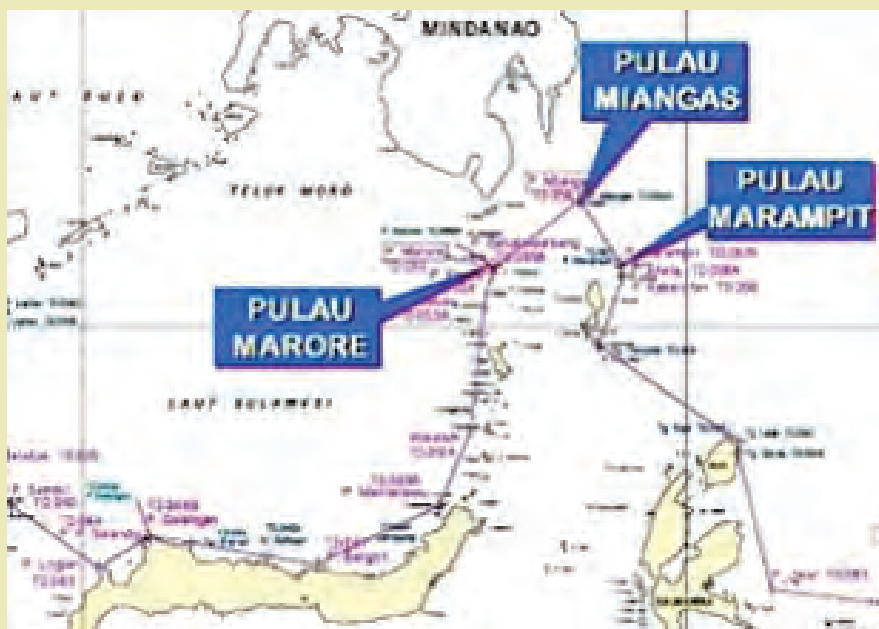
Perkembangan keadaan geografi di wilayah Sulawesi saat ini diwarnai oleh berbagai persoalan yang sangat membawa dampak kepada proses penyelenggaraan pembangunan oleh Pemda maupun kepentingan pembinaan wilayah pertahanan darat. Seperti; pemekaran wilayah, wilayah perbatasan, bencana alam dan kerusakan lingkungan. Dengan luas wilayah daratan Sulawesi yang mencapai 188.522,36 km², lautan 15.364,08 km dengan garis pantai sepanjang 15.909 km, menjadikan wilayah ini memiliki dinamika persoalan yang sangat tinggi. Seiring dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian mengalami judicial review menjadi Undang-Undang Nomor : 32 tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah, salah satunya membawa dampak kepada semakin banyaknya pemekaran wilayah administratif di Sulawesi, terutama wilayah Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan. Situasi ini mengakibatkan terjadinya perubahan besar dalam tata laksana dan struktur pemerintahan di beberapa daerah dan tidak sedikit yang menimbulkan konflik sosial di masyarakat.

Sementara itu, wilayah perbatasan antara Indonesia-Philipina yang terdapat di wilayah Sulawesi Utara, sampai dengan saat ini belum menemui kata sepakat. Hal ini merupakan persoalan tersendiri bagi Pemerintah untuk terus dikawal dan diselesaikan. Persoalan lainnya adalah fenomena kerusakan lingkungan dan bencana alam. Kerusakan lingkungan yang terjadi di beberapa wilayah di Sulawesi merupakan dampak dari perambahan illegal maupun sistem pengelolaan sumber daya alam yang tidak mementingkan kelestariannya. Disisi lain, bencana alam yang kerap kali terjadi akhir-akhir ini juga turut merusak berbagai fasilitas di beberapa daerah.

Menyikapi beberapa persoalan tersebut, seluruh kelembagaan yang ada di wilayah Sulawesi baik TNI, Pemda dan lembaga lainnya, harus menyatukan kerangka pemikiran secara lebih komprehensif dan integral, khususnya dalam mencari jalan keluar dan pemecahannya. Menyangkut persoalan aspek geografi, pada dasarnya terkait dengan pembangunan kesadaran dan kepedulian segenap lapisan masyarakat terhadap pendayagunaan segenap potensi wilayah secara tepat dengan memperhatikan kelangsungan dan kelestarian lingkungan guna kepentingan kesejahteraan rakyat (*teritorial awareness*). Dalam hal ini, legalitas formal penguasaan wilayah

berada di tangan Pemda. Dimana, wujud pembinaan wilayah oleh Pemda bagi kepentingan kesejahteraan rakyat dituangkan dalam perumusan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), melalui pembahasan secara berjenjang dalam forum Rapat Koordinasi Pembangunan Daerah (Rakorbangda). Pembahasan dalam perumusan RTRW tidak boleh hanya bertumpu kepada kepentingan kesejahteraan semata, namun juga harus memperhatikan kepentingan pertahanan negara. Dalam konteks ini, antara kepentingan kesejahteraan yang dikelola oleh Pemda dan kepentingan pertahanan negara





yang menjadi tanggung jawab TNI, keduanya harus dapat diakomodir didalamnya. Keselarasan dalam mengakomodir dua kepentingan tersebut, menjadi tugas Satkowil jajaran Kodam VII/Wrb untuk dapat berkoordinasi dan menyarankan dengan baik kepada Pemda dan segenap kelembagaan di wilayah masing-masing. Terutama yang menyangkut aspek-aspek penataan dan pengklasifikasian wilayah dalam rangka pemberdayaan wilayah pertahanan darat di daerahnya.

Pembinaan aspek geografi berhubungan dengan proses penataan dan penyiapan wilayah guna didayagunakan untuk mewujudkan ruang juang yang tangguh dalam rangka menjamin kelangsungan hidup masyarakat. Oleh karena itu, upaya pembinaan oleh Satkowil melalui kegiatan program Binter di wilayahnya, harus diwujudkan secara nyata dan bersinergi dengan berbagai instansi lain. Masing-masing Satkowil harus mampu mengklasifikasikan wilayahnya (peta wilayah) sesuai dengan karakteristik dan permasalahan yang dihadapi. Sehingga, perumusan jenis kegiatan Binter yang akan dilaksanakan akan dapat menyentuh dan mencapai hasil sesuai dengan fakta riil yang dibutuhkan oleh masyarakat setempat. Misalnya, bagi Satkowil yang memiliki wilayah perbatasan langsung dengan negara lain (Provinsi Sulawesi Utara), maka fokus kegiatan Binter yang dilaksanakan harus diarahkan kepada pemberdayaan wilayah perbatasan tersebut dalam rangka menghindari klaim wilayah teritorial oleh negara lain. Kegiatan-kegiatan dalam menumbuhkan kesadaran dan kecintaan masyarakat terhadap

NKRI melalui operasi bhakti dan karya bhakti harus gencar dilaksanakan, guna menghindari keterpengaruhan masyarakat terhadap negara tetangga.

Demikian halnya dengan wilayah-wilayah yang rawan bencana, maka Satkowil setempat harus dapat menjalin koordinasi dengan instansi lintas sektoral dalam membangun kesiapan wilayah guna menghadapi kontinjensi bencana alam yang akan terjadi (seperti; program simulasi penanggulangan bencana alam). Disamping itu, Satkowil setempat harus bisa menjadi tauladan dalam kegiatan yang mencerminkan kesadaran dan kecintaan terhadap

kelestarian alam, melalui kegiatan penghijauan, konservasi lahan dan lain-lain. Terkait dengan persoalan fenomena pemekaran wilayah, peran Satkowil yang perlu dilakukan adalah dengan melaksanakan penyesuaian pemetaan terhadap wilayah tersebut menyangkut tentang data-data wilayah, termasuk berkoordinasi dengan Pemda tentang kemungkinan pengembangan gelar satuan.

Menyangkut permasalahan geografi ini pula, pengetahuan dan kepedulian masyarakat terhadap keadaan lingkungan wilayahnya, dewasa ini memiliki kecenderungan yang menurun secara drastis. Hal ini mengakibatkan kepada banyaknya permasalahan yang berkaitan dengan kerusakan lingkungan dan kelestarian sumber daya alam, sebagian besar akibat perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri. Seperti; pertambangan tanpa ijin, penebangan liar, perburuan hewan langka dan lain sebagainya. Fakta terjadinya bencana alam (seperti; banjir bandang) yang terjadi selama ini di beberapa wilayah di Sulawesi sebagai akibat dari eksploitasi potensi wilayah yang sembarangan tersebut. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran dan kecintaan masyarakat terhadap keadaan wilayah/lingkungan (*territorial awareness*) dimana dia bertempat tinggal, sangat diperlukan guna memberikan pengetahuan yang cukup tentang potensi dan segenap resiko yang bisa ditimbulkan bila sistem pengelolaannya tidak benar. Satkowil jajaran Kodam VII/Wrb harus dapat mendorong masyarakat di wilayah masing-masing untuk memiliki pemahaman, pengetahuan, kesadaran dan kepedulian terhadap lingkungannya, melalui kegiatan pemasangan peta-peta wilayah



di setiap rumah penduduk, khususnya peta yang berisi data batas wilayah, potensi sumber daya alam dan rawan bencana. Melalui kegiatan semacam ini, masyarakat dengan sendirinya akan menyadari dan memahami tentang keadaan wilayahnya dengan baik, sehingga akan menumbuhkan kecintaan dan kepedulian terhadap kelestariannya.

Aspek Demografi.

Jumlah penduduk di Sulawesi saat ini berada dalam kisaran 18.568.781 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk antara 43 km² - 172 km² dan laju pertumbuhan antara 1,17 % - 2,68 % per tahun serta tingkat penyebaran penduduk yang tidak merata, dimana penduduk terpadat berada di wilayah perkotaan, seperti; Kota Makassar (Booklet Triwulan, BPS, Agustus 2013). Dari data tersebut, maka laju pertumbuhan penduduk di Sulawesi tergolong tinggi, dimana laju pertumbuhan penduduk rata-rata nasional pada tahun 2013 dalam kisaran 1,49 % per tahun. Hal tersebut dipengaruhi oleh angka fertilitas (kelahiran) di wilayah Sulawesi yang cukup tinggi yaitu mencapai rata-rata 65,1 % - 71,1 %. Sedangkan angka mortalitas (kematian) khususnya Angka Kematian Ibu (AKI) maupun Angka Kematian Balita (AKB) wilayah Sulawesi Selatan merupakan salah satu dari 6 wilayah penyumbang terbesar AKI/AKB secara nasional yang mencapai rata-rata 52,6 %. Data fertilitas dan mortalitas

diatas menunjukkan sejauhmana kuantitas dan kualitas kependudukan di suatu wilayah. Bila angka fertilitas tinggi, maka persoalan yang akan muncul adalah beban Pemerintah akan meningkat dalam hal penyediaan aspek fisik, pertumbuhan penduduk ikut meningkat dan akan melahirkan korelasi negatif terhadap tingkat kesejahteraan penduduk bagi wilayah-wilayah yang masih berkembang.

Kenyataan yang dialami oleh wilayah-wilayah di Sulawesi, secara kualitas kependudukan masih perlu perhatian serius oleh Pemda dan segenap kelembagaan di wilayah ini. Hal ini dapat dilihat dari prosentase penduduk miskin yang masih rata-rata berada diatas 10 % dari jumlah penduduk masing-masing wilayah Provinsi. Yang terbesar Provinsi Gorontalo yang tercatat sebesar 17,51 % atau 192.590 jiwa dari total jumlah penduduk sebesar 1.019.592 jiwa. Disisi lain, jumlah pengangguran terbuka di wilayah Sulawesi juga masih tergolong tinggi yaitu antara 2,00 % - 7,19 %, yang tertinggi adalah Provinsi Sulawesi Utara yaitu sebesar 7,19 %. Dengan demikian, diperlukan sebuah langkah konkrit oleh Pemda dan kelembagaan lainnya di seluruh wilayah Sulawesi untuk dapat mengatasinya agar tidak berdampak kepada munculnya berbagai persoalan sosial di masyarakat. Baik yang menyangkut pengendalian laju pertumbuhan, menekan angka pengangguran, tingkat produktifitas dan moralitasnya.

Adapun peran Satkowil jajaran Kodam VII/Wrb dalam hal membantu Pemda dalam pengentasan persoalan kependudukan di wilayah masing-masing yaitu dengan lebih mengoptimalkan pelaksanaan tugas Binter melalui kegiatan-kegiatan yang diarahkan kepada efektifitas mewujudkan kuantitas dan kualitas penduduk yang lebih baik. Seperti; kegiatan program KB-Kes, pengentasan buta aksara, mendorong tumbuhnya Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan lain-lain. Menyangkut tentang pembangunan moralitas penduduk, Satkowil diharapkan dapat menggalakkan kegiatan sosialisasi dengan menggunakan metode komunikasi sosial di masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan pembangunan kesadaran masyarakat terhadap persoalan kependudukan, seperti; kecenderungan migrasi ke daerah perkotaan. Disamping hal tersebut akan menambah beban Pemerintah Kota setempat, juga akan sangat memengaruhi program pengendalian penduduk di wilayahnya.

Aspek Kondisi Sosial Ideologi.

Secara umum kehidupan berideologi masyarakat Sulawesi khususnya tentang keyakinan terhadap ideologi Pancasila telah berjalan dengan baik. Namun dalam penghayatan dan pengamalan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila masih perlu ditingkatkan dalam kehidupan sehari-hari. Gerakan bawah tanah yang dilakukan oleh kelompok-kelompok radikal kiri dalam upayanya merongrong eksistensi Pancasila sebagai ideologi negara tetap ada dan perlu diantisipasi setiap saat. Seperti paham negara Islam yang menjadi agenda dari organisasi Komite Perjuangan Penegakan Syariat Islam (KPPSI) yang terdapat di wilayah Kabupaten Luwu, Kabupaten Poso dan Kota Palopo. Kegiatan yang perlu digalakkan oleh Satkowil setempat adalah kegiatan yang diarahkan untuk membangun kesadaran ideologi Pancasila masyarakat dalam bentuk sosialisasi, dialog, seminar maupun anjangsana. Disamping itu, Satkowil harus dapat mendorong dinas terkait di wilayahnya agar Pancasila dapat kembali menjadi salah satu materi dalam kurikulum pendidikan setempat.

Politik.

Dinamika kehidupan politik masyarakat Sulawesi akhir-akhir ini berjalan dengan sangat dinamis. Pergolakan kepentingan politik baik antar Partai Politik (Parpol) maupun di internal Parpol itu sendiri menunjukkan intensitas yang cukup tinggi. Terutama menjelang Pemilu Legislatif dan Pilpres 2014 mendatang. Para elit Parpol dan simpatisannya

semakin gencar melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam rangka menarik simpati masyarakat untuk memilih kandidatnya masing-masing. Nuansa ini kerap kali juga diwarnai oleh pertarungan yang tidak sehat, seperti; politik uang, kampanye hitam maupun kegiatan negatif lainnya. Bahkan terdapat pula yang menggunakan cara-cara yang mengarah kepada kekerasan dan perusakan (radikalisme). Adapun beberapa potensi konflik politik yang kemungkinan terjadi di wilayah Sulawesi antara lain; validitas DPT, distribusi logistik Pemilu, boikot Pemilu (golput), bentrok antar pendukung dan tidak terima hasil Pemilu.

Mencermati dinamika kehidupan politik tersebut, tugas utama yang harus dapat diwujudkan dalam kegiatan pembinaan oleh Satkowil adalah bagaimana menjamin netralitas TNI di jajarannya dan mendorong partisipasi aktif masyarakat (tidak Golput) dalam setiap agenda Pemilu di wilayahnya. Disamping itu, Satkowil juga harus dapat menjalin sinergitas yang baik dengan segenap kelembagaan dan masyarakat guna menciptakan situasi dan kondisi yang kondusif pada setiap penyelenggaraan pesta demokrasi di wilayahnya. Dengan menggunakan metode Komsos yang baik, seluruh aparat Satkowil dapat berkomunikasi dengan segenap lapisan masyarakat setiap saat, sehingga tuntutan tugas tersebut dapat tercapai.



Guna menunjang pencapaian keberhasilan dalam pelaksanaannya, Satkowil harus mampu memprediksi setiap kemungkinan ancaman yang mungkin timbul di wilayah masing-masing yaitu dengan membuat pemetaan tentang potensi konflik politik baik jenis, kelompok, perkiraan pelibatan pasukan maupun titik-titik sentral yang dimungkinkan konflik tersebut akan terjadi. Dengan demikian, Satkowil sejak dini akan dapat melakukan langkah-langkah antisipatif penanganan terhadap segenap potensi konflik tersebut melalui koordinasi dengan segenap Instansi terkait yang ada di wilayahnya guna tindakan pencegahan agar tidak terjadi.

Ekonomi.

Laju pertumbuhan ekonomi di wilayah Sulawesi pada akhir 2013 menunjukkan angka yang cukup tinggi dan menggembirakan. Dimana capaian pertumbuhan di beberapa wilayah Provinsi pada kuartal ketiga 2013, telah dapat melampaui capaian pertumbuhan ekonomi rata-rata nasional (5,92 %) yaitu antara 7,00 % - 10,30 %. Hal ini menunjukkan perkembangan pembangunan sektor-sektor ekonomi di wilayah Sulawesi belakangan ini berjalan dengan baik, namun belum dapat menopang pertumbuhan taraf hidup masyarakat. Hal tersebut ditunjukkan dengan masih tingginya jumlah penduduk miskin di setiap wilayah. Oleh karena itu, program pembangunan dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Sulawesi, masih perlu terus ditingkatkan. Salah satunya adalah peningkatan kegiatan pemerataan pembangunan sektor-sektor perekonomian dan hasilnya di setiap wilayah. Proses kegiatan pemerataan yang dilakukan tidak hanya bertumpu kepada penerapan teknis peningkatan hasil produksi semata, namun juga harus menyentuh pembangunan infra struktur perekonomian, seperti; jalan, irigasi, bendungan dan gudang penyimpanan hasil produksi, yang dapat menjamin kelancaran proses pembangunan perekonomian di seluruh wilayah.

Berkaitan dengan hal tersebut, Satkowil jajaran Kodam VII/Wrb harus dapat lebih meningkatkan kegiatan Binter di wilayah masing-masing, khususnya dalam menjalin kerjasama (MoU) dengan Pemda dalam menyukseskan berbagai program peningkatan taraf hidup dan ekonomi rakyat dalam rangka menciptakan swasembada/ketahanan pangan di wilayah tersebut. Baik di sektor pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, pertambangan dan energi, kehutanan dan lain-lain. Dalam pelaksanaannya, sangat ditekankan kepada kegiatan yang dapat meningkatkan hasil produksi,

kelancaran distribusi hasil produksi dan ketersediaan pangan masyarakat. Guna mencapai target tersebut, Satkowil harus bisa berkoordinasi dengan kalangan akademisi yang membidangi masalah perekonomian guna berkerjasama dalam pengembangan teknologi yang lebih mutakhir dengan melaksanakan uji coba di lahan-lahan percontohan. Dengan demikian, maka masyarakat dapat menimba ilmu dan dalam jangka waktu tertentu akan dapat merubah pola pikir masyarakat dari pola tradisional ke pola yang lebih modern.

Hal penting lainnya yang perlu dilakukan oleh Satkowil adalah membuat pendataan dan pemetaan terhadap segenap potensi unggulan di wilayah masing-masing, sehingga Satkowil mampu memberikan saran masukan kepada Pemda terkait dengan program peningkatan hasil produksi sektor unggulan yang berbasis ekonomi kerakyatan, guna lebih mengarah kepada peningkatan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat secara langsung. Dalam kaitan tersebut, kegiatan program ketahanan pangan yang dilaksanakan oleh Satkowil kedepan, hendaknya dapat lebih difokuskan kepada komoditi unggulan di wilayah masing-masing.

Sosial Budaya.

Keadaan sosial budaya masyarakat Sulawesi memiliki karakteristik yang unik dan keanekaragamannya yang sangat kaya. Hal tersebut tampak dari komposisi penduduknya yang terdiri dari banyak suku, agama, budaya dan bahasa. Tercatat jumlah suku bangsa yang terdapat di seluruh wilayah Sulawesi sejumlah 17 jenis. Dimana, suku lokal didominasi oleh suku Bugis-Makassar, sedangkan untuk suku pendatang oleh suku Jawa. Dari sisi populasi agama, masyarakat Sulawesi sebagian besar beragama Islam, disusul Kristen Katolik/Protestan, Hindu, Budha dan Aliran Kepercayaan. Toleransi kehidupan beragama di masyarakat berjalan dengan baik. Sedangkan bahasa daerah di Sulawesi terbagi dalam 5 rumpun yaitu rumpun Sulawesi, Philipina, Melayik, Sama-Bajau dan Sulawesi Selatan yang seluruhnya berjumlah 114 bahasa. Dari segi kebudayaan, masyarakat Sulawesi memiliki akar budaya yang sangat kental di masing-masing wilayah dan merupakan warisan leluhur secara turun temurun. Berbagai adat istiadat dan kesenian daerah senantiasa dijaga kelestariannya melalui acara-acara adat ataupun kegiatan seremonial lainnya.

Menyangkut bidang pendidikan, beberapa wilayah di Sulawesi masih perlu ditingkatkan terutama menyangkut program menekan angka

putus sekolah di tingkat pendidikan dasar. Dimana, beberapa wilayah Provinsi masih tergolong tinggi, seperti; Provinsi Sulbar angka putus sekolah di tingkat SD mencapai 2,37 % (rata-rata nasional hanya 0,62 %), Provinsi Sulut angka putus sekolah tingkat SMP mencapai 1,88 % (rata-rata nasional 2,21 %) dan Provinsi Sulteng angka putus sekolah tingkat SMA mencapai 6,58 % (rata-rata nasional hanya 3,14 %). Demikian halnya dengan bidang kesehatan, terutama partisipasi masyarakat dalam menyukseskan program Keluarga Berencana (KB) masih perlu ditingkatkan. Hal ini tampak dari angka laju pertumbuhan penduduk yang masih tergolong tinggi di Sulawesi, menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat untuk menekan angka kelahiran masih sangat kurang.

Menyikapi persoalan tersebut, maka kegiatan Binter yang dilaksanakan oleh Satkowil harus difokuskan kepada kegiatan yang bersifat sosial kemasyarakatan, baik dibidang pendidikan, kesehatan, kebudayaan dan keagamaan. Keterlibatan secara langsung segenap keluarga besar Satkowil dalam kegiatan mutlak diperlukan, guna mewujudkan secara nyata pelaksanaan tugas pembinaan di mata Pemda dan masyarakat. Disamping itu, kemandirian kegiatan dengan berbagai komponen masyarakat dan Pemda juga akan sangat membantu kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan kegiatan. Seperti; perlombaan kesenian dan budaya daerah,

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), menyiapkan tenaga guru pengganti bila diperlukan, Bhakti Sosial KB-Kes, menggalakkan Posyandu dan lain-lain.

Pertahanan Keamanan.

Wilayah Sulawesi merupakan salah satu wilayah yang sangat rentan terhadap timbulnya konflik sosial di masyarakat. Hal tersebut disebabkan oleh dislokasi wilayah Sulawesi yang sangat strategis di bagian timur Indonesia dan merupakan lintasan perdagangan antar negara. Disamping itu, luasnya wilayah darat dan laut serta banyaknya pulau-pulau, termasuk wilayah perbatasan langsung dengan negara lain (Philipina) yang berada di wilayah Sulawesi Utara, menjadikan wilayah Sulawesi salah satu wilayah sasaran/transit kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok anti keamanan yang ada di kawasan Asia Tenggara. Seperti; konflik Poso, bentrok antar kelompok masyarakat di Kota Makassar, terorisme, penyelundupan, pencurian kekayaan alam dan lain-lain.

Menyikapi hal tersebut, Binter yang dilaksanakan oleh Satkowil kedepan harus dapat pula difokuskan kepada kegiatan-kegiatan yang mengarah kepada kesiapan Pemerintah dan masyarakat setempat dalam mengantisipasi dan meredam berkembangnya potensi ancaman keamanan tersebut. Dalam pelaksanaannya, kegiatan yang dilakukan harus didasarkan kepada karakteristik, situasi dan kondisi



serta akar permasalahan yang dihadapi, agar strategi penanganannya dapat berjalan dengan baik, tepat dan berhasil guna. Terkait persoalan konflik sosial yang terjadi di wilayah Kabupaten Poso, peperangan antar kelompok masyarakat yang terjadi tidak hanya melibatkan masyarakat lokal saja, namun sudah melibatkan kelompok masyarakat dari wilayah luar, bahkan sudah ditunggangi oleh berbagai kepentingan, salah satunya gerakan kelompok teroris internasional. Karenanya, Satkowil setempat harus memahami dengan baik hal tersebut agar konsep penanganannya dapat lebih efektif. Kegiatan yang diperlukan kedepan adalah program deradikalisasi dan pengembalian sikap mental masyarakat pasca terjadinya konflik yang berkepanjangan di wilayah tersebut. Kodim setempat harus dapat menjalin kerjasama dengan segenap Instansi terkait dalam kegiatan program tersebut, sehingga hasil yang dicapai dapat terukur dan berkelanjutan.

Demikian halnya dengan konflik berkepanjangan antar kelompok masyarakat yang terjadi di wilayah Kota Makassar, persoalan dendam lama seringkali dijadikan sebagai faktor akar masalah. Namun bila kita cermati secara lebih mendalam, bentrokan antar kelompok masyarakat tersebut juga banyak ditunggangi oleh berbagai kepentingan baik politik, kelompok preman maupun pertarungan antar pribadi di masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan penggunaan berbagai jenis senjata tajam, seperti; papporo, busur/panah, bom molotof, badik dan senjata lainnya. Oleh sebab itu, upaya yang dapat dilakukan oleh Kodim setempat adalah melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mengarah kepada pembangunan karakter untuk merubah pola pikir dan sikap masyarakat agar tidak mudah terpancing/gemar melakukan bentrokan di antara kelompok masyarakat itu sendiri. Melalui kegiatan komunikasi sosial yang dikemas dalam bentuk sarasehan ataupun duduk bersama antar kelompok yang sering bertikai, penyelesaian perselisihan dan kesalahpahaman yang terjadi selama ini dapat dibicarakan dan diselesaikan dalam suasana kekeluargaan. Selain itu, pembangunan karakter masyarakat dapat ditempuh melalui kegiatan pendidikan bela negara dan wawasan kebangsaan, baik formal maupun informal. Secara formal, kegiatan dapat dilaksanakan dengan memanfaatkan keberadaan Sekolah Bela Negara yang terdapat di Rindam VII/Wrb. Sedangkan secara informal, dapat dilaksanakan dengan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling). Langkah tersebut niscaya akan lebih ampuh dalam meredam fenomena bentrokan yang

seringkali terjadi, daripada penanganan yang bersifat represif lainnya.

Terkait dengan persoalan lainnya seperti penyelundupan dan pencurian kekayaan alam, Satkowil setempat harus bisa menjalin kerjasama dengan Instansi terkait dalam penanganan persoalan tersebut. Kegiatan yang dilakukan dapat berbentuk memberikan saran masukan dan mendorong pembentukan Tim Terpadu Penanggulangan yang dikoordinir oleh Pemda setempat. Dengan demikian, legalitas hukum dalam program kegiatannya dapat lebih terjamin dan tidak bertentangan dengan prosedur/ketentuan yang berlaku. Disamping itu, seluruh Satkowil jajaran Kodam VII/Wrb harus memiliki dan mendirikan Posko Pusat Pengendalian Krisis (Pusdalsis) di satuan masing-masing, guna menjamin kesiapan satuan dalam mengantisipasi dan menanggulangi berbagai potensi konflik yang mungkin timbul di wilayahnya. Posko Pusdalsis yang didirikan harus berisi data-data lengkap tentang segenap potensi krisis sosial sesuai wilayah masing-masing, termasuk prosedur tetap penanggulangannya bila diperlukan (strategi, pelibatan pasukan, sarana/prasarana yang diperlukan dan pentahapan). Data dan prosedur tetap tersebut harus senantiasa diperbaharui sesuai dengan perkembangan dinamika kehidupan masyarakat setempat. Melalui pendirian Pusdalsis ini pula, kasus-kasus selama ini yang sering terjadi menyangkut keterlambatan dan kesalahan prosedur penanggulangan konflik sosial di masyarakat, tidak akan terjadi lagi di masa yang akan datang.

Penutup.

Dinamika perkembangan tata kehidupan masyarakat dewasa ini berkembang dengan sangat pesat dan membawa dampak kepada perubahan sikap perilaku masyarakat tidak hanya di lingkup nasional, namun juga telah merambah sampai di tingkat lokal provinsi dan pedesaan. Kondisi tersebut mengakibatkan tantangan tugas Binter oleh Satkowil dalam membantu Pemda kedepan semakin tinggi dan kompleks. Oleh karena itu, diperlukan pemikiran yang lebih konseptual terkait dengan penguatan pelaksanaan tugas Binter kedepan. Dimana, pelaksanaan tugas Binter kedepan harus dapat membangun dan mewujudkan sinkronisasi, sinergitas dan harmonisasi antara TNI, Pemda dan masyarakat dalam berbagai program kegiatan pembinaan, baik aspek geografi, demografi maupun kondisi sosial.

Dengan demikian, pembinaan wilayah dalam rangka pendayagunaan segenap sumber daya nasional yang dimiliki di seluruh wilayah Sulawesi guna

kepentingan pertahanan negara dan kesejahteraan rakyat akan dapat tercapai. Upaya nyata yang harus dilakukan dalam program penguatan Binter guna membantu tugas Pemda adalah merumuskan kerjasama (MoU) antara Satkowil dalam hal ini Kodam VII/Wrb dengan seluruh Pemda Provinsi dan *stakeholder* terkait lainnya di wilayah Sulawesi, sesuai dengan permasalahan yang dihadapi di wilayah masing-masing, meliputi bidang geografi, demografi dan kondisi sosial. Melalui penandatanganan MoU tersebut, diharapkan pencapaian sasaran program pembangunan yang berorientasi pada kepentingan kesejahteraan dan pertahanan keamanan dapat diwujudkan dengan baik. Langkah berikutnya adalah mendorong perumusan kegiatan Binter dalam Peraturan Daerah (Perda) di Pemda masing-masing, sesuai dengan permasalahan yang dihadapi,

agar program kegiatan Binter yang dilaksanakan oleh Satkowil mempunyai landasan dan legalitas hukum yang kuat. Disamping itu, Satkowil jajaran Kodam VII/Wrb kedepan harus diorientasikan kepada Satkowil yang mempunyai kemampuan dan dilengkapi dengan infrastruktur "*Cyber Defence*" atau pertahanan *cyber*, sebagai bentuk antisipasi Kodam VII/Wrb terhadap segala kemungkinan penetrasi oleh pihak-pihak tertentu dalam hal kegiatan "*Cyberwarfare*" atau pencurian data-data/informasi di seluruh Satkowil jajaran Kodam VII/Wrb. Demikian tulisan singkat ini, dibuat sebagai sumbangan pemikiran terkait dengan penguatan pelaksanaan tugas Binter oleh Satkowil jajaran Kodam VII/Wrb dalam membantu tugas Pemda kedepan yang lebih baik. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.

RIWAYAT HIDUP SINGKAT PENULIS

I. Data Pokok.

- | | |
|----------------------|------------------------|
| 1. Nama | : Bachtiar, S.IP, M.AP |
| 2. Pangkat | : Mayjen TNI/30883 |
| 3. Tempat/Tgl. Lahir | : Pati/9-04-1960 |
| 4. Agama | : Islam |
| 5. Status | : Kawin |
| 6. Sumber Pa/Th | : Akabri/1984 |
| 7. Jabatan | : Pangdam VII/Wrb |

II. Riwayat Pendidikan Militer.

A. Dikbangum.

- | | |
|-----------------|--------|
| 1. Akabri | : 1984 |
| 2. Sussarcab If | : 1984 |
| 3. Suslapa II | : 1995 |
| 4. Seskoad | : 1998 |
| 5. Sesko TNI | : 2003 |
| 6. Lemhannas | : 2012 |

B. Dikbangspes.

- | | |
|-----------------|--------|
| 1. Sus Sar Para | : 1983 |
| 2. Combat Intel | : 1984 |
| 3. Ter Terpusat | : 1985 |
| 4. Tar Tih If | : 1999 |
| 5. Sus Danrem | : 2008 |

III. Riwayat Penugasan.

A. Dalam Negeri.

- | | |
|-----------------|-------------|
| 1. Ops. Tim-Tim | : 1985-1987 |
| 2. Ops. Irja | : 1999 |
| 3. Ops Aceh | |

IV. Riwayat Jabatan.

1. Danton II/A/141/BS
2. Dankipan A/141/BS
3. Danyonif-752
4. Dandim-1704/ SORONG
5. Danbrigif-15/KJ /III/Slw
6. Asops Dam III/ Slw
7. Danrindam V/Brw
8. Danrem-011/DAM IM
9. Dirlat Kodiklat TNI AD
10. Dansecapaad
11. Gubernur Akmil
12. Aster Kasad
13. Pangdam VII/Wrb

PROFESIONALITAS TNI ANGKATAN DARAT DALAM MENYIKAPI TAHUN POLITIK 2014 DI WILAYAH



Oleh : Mayjen TNI Wisnu Bawa Tenaya
(Pangdam IX/Udayana)

Setiap prajurit harus memiliki komitmen dan kontribusi yang sangat positif di dalam mengawal jalannya pesta demokrasi di Indonesia.

Salah satu wujud agar setiap proses tahapan Pemilu pada tahun 2014 dapat dikawal dengan sebaik-baiknya maka tidak ada kata lain kecuali dengan mengedepankan netralitas TNI.

Demokrasi akan rusak dan cacat jika prajurit bermain-main di arena politik.

TNI Angkatan Darat yang merupakan bagian dari TNI memiliki tugas pokok menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Dalam

melaksanakan tugas pokok tersebut, TNI Angkatan Darat menggelar dua macam operasi, yaitu OMP (Operasi Militer Perang) dan OMSP (Operasi Militer Selain Perang) yang melibatkan berbagai komponen yang ada antara lain Komponen Utama, Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung.

Sebagai Komponen Utama, TNI Angkatan Darat memiliki gelar kekuatan terdepan yaitu Komando Kewilayahan (Kowil) meliputi Kodam (Komando Daerah Militer), Korem (Komando Resor Militer), Kodim (Komando Distrik Militer) dan Koramil (Komando Rayon Militer) yang memiliki tugas pokok menyelenggarakan pembinaan teritorial di wilayahnya dalam rangka mendukung tugas pokok satuan di atasnya. Koramil merupakan satuan pelaksana pembinaan teritorial terkecil dan terdepan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat.

Eksistensi TNI Angkatan Darat yang memiliki gelar kekuatan di darat sangat menentukan stabilitas keamanan wilayah. Sumbangsihnya sangat dibutuhkan dalam upaya menjaga kelangsungan hidup bangsa dengan berbagai situasi dan kondisi yang terjadi, apalagi menghadapi situasi di tahun 2014, yang sebagian besar kelompok masyarakat menyebutnya sebagai *Tahun Politik*.

Tahun Politik tentunya penuh dengan dinamika dan tantangan. Oleh sebab itu, TNI Angkatan Darat tidak mau terlambat atau kecolongan menangani dan mengantisipasi eskalasi tantangan dan ancaman yang mungkin timbul setiap saat. Pada tahun 2014, selain dilaksanakannya Pemilihan Umum (Pemilu) legislatif pada bulan April 2014 juga suksesi kepemimpinan melalui pemilihan presiden dan wakil presiden pada Juli 2014. Dua agenda besar negara itu harus dilaksanakan dengan lancar dan aman serta demokratis. Oleh sebab itu, agar TNI-AD tidak terlambat mengantisipasi segala kemungkinan yang terjadi, maka mau tidak mau prajurit TNI Angkatan Darat harus menjadi prajurit yang profesional dan proporsional di bidangnya.

Bagaimana menjadikan prajurit TNI Angkatan Darat yang profesional dan proporsional? Tentu

jawabannya sangat sederhana yaitu tetap teguh dan konsisten melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai garda terdepan dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan juga bersikap netral pada Pemilu nanti.

Netralitas Wujud Nyata Profesional dan Proporsional.

Setiap prajurit harus memiliki komitmen dan kontribusi yang sangat positif di dalam mengawal jalannya pesta demokrasi di Indonesia. Salah satu wujud agar setiap proses tahapan Pemilu pada tahun 2014 dapat dikawal dengan sebaik-baiknya maka tidak ada kata lain kecuali dengan mengedepankan netralitas TNI. Demokrasi akan rusak dan cacat jika prajurit bermain-main di arena politik.

Netralitas TNI sejatinya merupakan kehendak rakyat Indonesia yang telah diamanatkan dalam Undang Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI. Di samping itu netralitas TNI juga merupakan wujud nyata dari TNI bahwa TNI benar-benar tidak masuk dalam ranah politik praktis. Posisi prajurit TNI untuk tetap netral dalam Pemilu 2014 telah dituangkan dalam panduan Buku Saku Netralitas TNI, yang setiap saat harus dibaca dan tidak boleh dilanggar. Upaya yang dilakukan oleh pimpinan TNI adalah suatu bentuk tanggung jawab TNI agar dalam Pemilu 2014 ini, TNI tidak dimasuki oleh intrik-intrik yang ingin menarik TNI masuk dalam kancah pertarungan politik

yang sejatinya bila tidak diwaspadai dapat memecah soliditas dalam tubuh TNI.

Sementara itu bagi para purnawiran TNI sendiri yang telah memiliki hak politik yang sama dengan warga negara Indonesia pada umumnya memiliki hak untuk memilih dan dipilih. Demikian juga dengan keluarganya serta keluarga dari TNI aktif, akan tetapi hak tersebut hendaknya jangan digunakan untuk memengaruhi para prajurit aktif terlibat dalam politik praktis. Sebab komitmen TNI sudah jelas untuk tetap netral dan tidak akan memberikan dukungan moral atau apapun bentuknya kepada para kontestan Pemilu, termasuk para purnawirawan. Secara emosional dan sosial seluruh prajurit TNI mempunyai hubungan baik dengan para pendahulunya/seniornya, namun secara institusi maupun organisatoris tidak ada hubungan sama sekali.

TNI tidak boleh terlibat dalam politik praktis dan tidak boleh mendukung kandidat Calon Presiden (Capres) atau partai politik (parpol) tertentu. Pemilu legislatif dan pemilihan presiden tahun 2014 harus dihadapi TNI dengan tetap berpegang teguh pada netralitas TNI, pastikan TNI hanya tegak untuk kepentingan bangsa dan negara serta untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Semua sudah mahfum bahwa seluruh prajurit atau anggota TNI memiliki keluarga besar, selain adanya organisasi di bawah naungan pembinaan TNI seperti Pepabri, FKPPi, LVRI, PPM atau organisasi



lainnya, tapi bukan berarti para prajurit yang masih aktif akan bebas untuk mengarahkan hak politiknya kepada mereka. Anggota keluarga TNI AD dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan TNI AD sudah cerdas dan bijak dalam memilih, dan tidak boleh golput. Tidak akan memberikan pilihan terhadap salah satu kontestan Pemilu ataupun Calon Presiden karena dipaksa atau karena imbalan materi tertentu. Sudah merupakan rahasia umum bahwa pelaksanaan pemilu akhir-akhir ini sangat dominan diwarnai oleh tindakan transaksional secara material dan celakanya masyarakat telah banyak memilih bersikap pragmatis. Sikap ini muncul karena masyarakat sebagai pemilik hak suara memberi pilihan tidak percaya lagi terhadap wacana yang ditawarkan oleh para calon, baik itu visi, misi maupun program.

Masyarakat beranggapan bahwa para calon atau kontestan hanya menawarkan janji kosong, manis di bibir dan jika terpilih nanti hanya akan mengutamakan kepentingan pribadi dan golongannya serta akan lupa mengutamakan tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pandangan ini semakin terkrystalisasi setelah melihat sikap dan tindakan para elit politik akhir-akhir ini yang banyak tersangkut kasus asusila, pelanggaran hukum dan terutama korupsi.

Dengan memiliki pandangan seperti ini, maka dalam setiap pelaksanaan sosialisasi dan kampanye, masyarakat membenarkan tindakannya sendiri untuk bersikap praktis dan pragmatis, misalnya akan mendukung atau memilih seseorang apabila memperoleh imbalan material seperti souvenir, perbaikan sarana umum, sembako maupun uang tunai. Masyarakat beranggapan bahwa memilih mereka juga tidak ada jaminan akan memberi manfaat untuk kesejahteraan masyarakat di masa yang akan datang, jadi lebih memilih mengutamakan kepentingan jangka pendek, yaitu yang dapat diperoleh dan dinikmati saat itu juga seperti imbalan tertentu.

Fenomena ini ironisnya justru bukan merupakan keprihatinan bagi sebagian para calon yang bertarung dalam pemilu, bahkan dianggap sebagai peluang pintas untuk meraup perolehan suara. Maka tidak jarang kita lihat ada calon anggota legislatif sangat jarang melakukan sosialisasi atau kampanye, karena adakalanya lebih kecil biaya membeli suara (*money politics*) jika dibandingkan dengan jumlah biaya yang musti dikeluarkan jika melakukan kampanye sebagaimana umumnya dilakukan.

Pimpinan TNI Angkatan Darat selalu berusaha untuk memberikan kemerdekaan dan kebebasan





kepada keluarga besarnya menggunakan hak pilihnya secara baik, tidak pamrih pada keuntungan materi atau profit. Calon pemimpin yang dipilih harus memenuhi kriteria *astabrata*, *memiliki track record dalam karier*, *yang berani membela*, *jujur*, *benar* dan *adil*. Pemimpin harus transformatif dalam mengapresiasi keinginan masyarakat, mendengar aspirasi, ikut partisipatif dan tentunya memiliki inisiatif tinggi.

Selain memiliki sifat-sifat tersebut, seorang calon pemimpin harus berjiwa Pancasila sejati, memahami dan menerapkan UUD 1945, mengabdikan diri sepenuhnya kepada NKRI serta menjunjung tinggi kebhinekaan, sebagaimana yang termuat dalam *Empat Pilar Penyangga Bangsa*. Empat Pilar Kebangsaan yang terdiri dari **Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia** dan **Bhinneka Tunggal Ika** ditafsirkan sama ibarat tiang penyangga suatu bangunan. Pilar dalam hal ini memiliki peran sangat sentral dan menentukan karena apabila pilar ini tidak kokoh atau rapuh akan berakibat robohnya bangunan yang disangganya. Dalam terminologi Jawa, tiang penyangga bangunan atau rumah disebut “*soko*”, bahkan bagi rumah jenis joglo yang atapnya menjulang tinggi terdapat empat

soko di tengah bangunan yang disebut “*soko guru*”. Soko guru sangat menentukan kokoh dan kuatnya bangunan, sehingga membuat orang yang tinggal di dalamnya merasa nyaman, aman dan selamat dari berbagai ancaman serta gangguan.

Bantuan TNI dalam Pesta Demokrasi.

Pemilu akan berjalan dengan sukses dan aman jika sistem yang ada di dalamnya yaitu KPU, partai politik dan rakyat sebagai pemilih benar-benar melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan konsekuen. Ibarat sebuah pertandingan, KPU harus bisa memainkan perannya secara baik yaitu mulai dari merencanakan, mempersiapkan, melaksanakan sampai tahapan akhir Pemilu yaitu penghitungan suara. Demikian juga partai peserta Pemilu harus berani siap untuk kalah dan menang, jangan hanya siap untuk menang. Karena kondisi yang demikian ini dikhawatirkan akan menimbulkan eksek yang tidak baik pada akhirnya. Dan, rakyatpun sebagai pengambil keputusan harus menggunakan hak pilihnya dengan baik, jangan sampai golput. Sistem ini harus berjalan dengan baik dan benar, sehingga nantinya Pemilu akan berlangsung Luber (Langsung Umum Bebas Rahasia) dan Jurdil (Jujur dan Adil).

TNI memang tidak berpolitik praktis, tetapi harus memonitor dan memberikan bantuan sepenuhnya agar perhelatan Pemilu berjalan aman, sukses dan lancar.

Netralitas TNI tidak saja diwujudkan dalam sikap dan tindakan, misalnya tidak berafiliasi dan memihak salah satu partai politik peserta Pemilu atau kontestan Calon Presiden, tetapi juga tidak akan meminjamkan sarana atau prasarana apapun yang dimiliki TNI untuk kegiatan berpolitik. Bantuan yang dapat diberikan TNI untuk kelancaran pelaksanaan Pemilu antara lain pengamanan logistik/surat suara. Dalam hal pengamanan pendistribusian logistik, TNI bisa memberikan bantuan sarana kepada KPU berupa kendaraan untuk mendistribusikan kotak/surat suara ke daerah rawan dan terpencil yang tidak terjangkau oleh panitia/KPU.

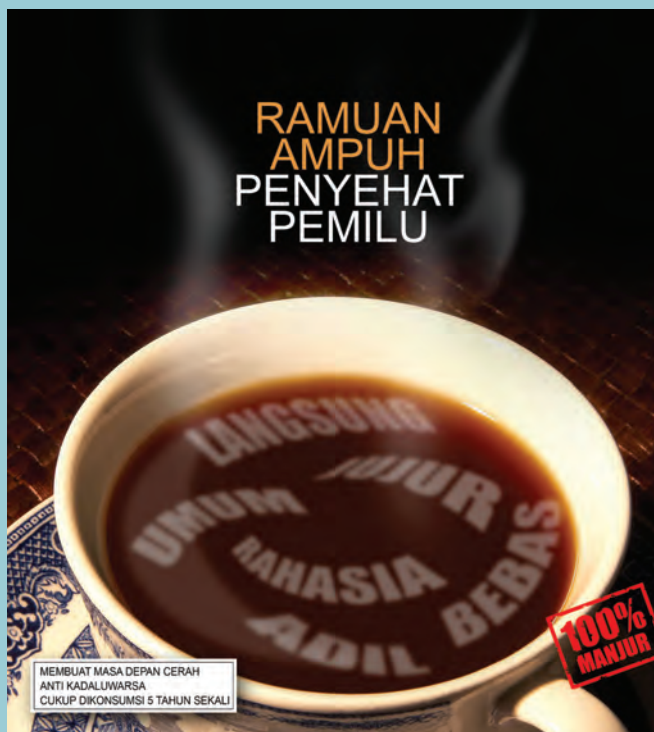
Selain pendistribusian logistik Pemilu, TNI akan melakukan koordinasi yang intensif dengan pihak kepolisian dalam mengawal jalannya pesta demokrasi tersebut, seperti contoh antisipasi penanganan aksi anarkhisme dengan membentuk satuan PHH di setiap Kodim maupun upaya menangkal aksi teroris dengan mengerahkan anggota intelijen. Apabila aksi teroris sudah pada high level (tingkat tinggi) maka personel TNI siap mengamankan segala kemungkinan terburuk sekalipun yang dapat menggagalkan pelaksanaan pesta demokrasi. Bantuan semacam ini tidak dimaksudkan untuk membantu melancarkan atau meloloskan salah satu partai peserta Pemilu atau



kontestan calon presiden/wakil presiden, melainkan semata-mata TNI memiliki rasa tanggung jawab tinggi untuk ikut serta menyukseskan pelaksanaan pesta demokrasi, yang merupakan penentu arah kelangsungan perjalanan hidup bangsa di lima tahun mendatang.

Tujuan Akhir Pemilu.

Pemilu yang demokratis sebetulnya merupakan pesta rakyat bukan pesta politisi ataupun partai peserta Pemilu. Calon yang kalahpun harus berbesar hati menerima kekalahannya karena kemenangan siapapun atau partai apapun adalah kemenangan demokrasi atau kemenangan rakyat. Kesejahteraan rakyatlah yang terpenting, bukan kemenangan partai. Karena itu, seluruh komponen bangsa mulai dari aparat pemerintah, politisi, organisasi kemasyarakatan, tokoh masyarakat dan seluruh masyarakat tidak terkecuali keluarga besar TNI harus mengawal jalannya proses demokrasi dan menolak adanya pendangkalan demokrasi. Kita berharap cerita demokrasi nanti ditutup dengan kehadiran *pemimpin negara yang kompeten dan benar-benar memiliki sifat dan sikap seorang negarawan.*



RIWAYAT HIDUP SINGKAT PENULIS

I. Data Pokok.

1. Nama : Wisnu Bawa Tenaya
2. Pangkat : Mayjen TNI/29253
3. Tempat/Tgl. Lahir : Denpasar/24-04-1958
4. Agama : Hindu
5. Status : Kawin
6. Sumber Pa/Th : Akabri/1981
7. Jabatan : Pangdam IX/Udayana

II. Riwayat Pendidikan Militer.

A. Dikbangum.

1. Akabri : 1981
2. Diklapa II : 1991
3. Seskoad : 1996
4. Sesko TNI : 2003
5. Seskoad : 1999
6. PPSA-16
Lemhannas RI : 2009

B. Dikbangspes.

1. Sussarcab If : 1980
2. Sussar Para : 1980
3. Komando : 1981
4. Gultor : 1984
5. Scuba Diver : 1985
6. Suspaska : 1986
7. Suspa Intelpur : 1990
8. Pandu Udara : 1993
9. Free Fall : 2002
10. Stuff Duties Course : 2002
11. Susdanrem : 2005
12. KSPS : 2007

III. Riwayat Penugasan.

A. Dalam Negeri.

1. Ops. Nanggala-LI
Tim-Tim : 1982
2. Ops. Cakra-XII
Tim-Tim : 1983
3. Ops. Chandraca-V
Tim-Tim : 1983
4. Satgas Darat
Tim-Tim : 1985
5. Satgas-86
Tim-Tim : 1991

B. Luar Negeri.

1. Australia : 1982
2. Thailand : 1983, 2002, 2010
3. Inggris : 1986, 1988
4. Philipina : 1986, 1987, 1988
5. Perancis : 1989
6. Amerika Serikat : 1999, 2000
7. Singapore : 2001
8. Malaysia : 2004, 2010
9. Korea Selatan : 2010
10. China : 2012
11. Belanda : 2009

IV. Riwayat Jabatan.

1. Danton Kopassandha
2. Danton-2/111/11 Grup-1 Kopassus
3. Danton-1/121/12 Grup-1 Kopassus
4. Danton-1/111/11 Grup-1 Kopassus
5. Wadantim Paska Den-81 Kopassus
6. Ps. Dantim Paska Den-81 Kopassus
7. Dansat Scuba Susjur Grup-3 Kopassus
8. Kasi Opsjar Grup-3/Pusdikpassus
Kopassus
9. Pgs. Danpuslatsus Grup-3
Kopassus
10. Pabandya Ops Sops Kopassus
11. Dirdiklat Grup-3/Pusdikpassus
Kopassus
12. Dirum Grup-3/Pusdikpassus
Kopassus
13. Wadan Grup-2 Kopassus
14. Asops Danjen Kopassus
15. Dan Pusdikpassus Kopassus
16. Asops Kasdam VI/Tpr
17. Danrem-121/Abw Kodam VI/Tpr
18. Ir Kostrad
19. Wadanjen Kopassus
20. Kasdam VI/Tpr
21. Kasdam VI/MIw
22. Danpussenif Kodiklat TNI AD
23. Danjen Kopassus
24. Pangdam IX/Udy

PROFESIONALISME DAN NETRALITAS PRAJURIT KODAM XVI/PTM MENGHADAPI TAHUN POLITIK 2014



Oleh : Mayjen TNI Eko Wiratmoko
(Pangdam XVI/Pattimura)

“.....Tentara hanya mempunyai kewajiban satu, ialah mempertahankan kedaulatan negara dan menjaga keselamatannya, sudah cukup kalau Tentara teguh memegang kewajiban ini. Sebagai Tentara, disiplin harus dipegang teguh, tunduk kepada pimpinan atasannya, dengan ikhlas mengerjakan kewajibannya. Harus diingat pula, bahwa negara Indonesia tidak cukup dipertahankan oleh tentara saja, maka perlu sekali mengadakan kerjasama yang seerat-eratnya dengan golongan serta badan-badan di luar Tentara. Tentara tidak boleh menjadi suatu alat golongan atau orang siapapun juga” Jenderal Besar Soedirman, 12 November 1945.

Profesionalisme dan Netralitas TNI.

Kalimat diatas merupakan sebagian Pidato Jenderal Besar Soedirman di Yogyakarta pada tanggal 12 November 1945. Meskipun kalimat Pidato Panglima Besar Jendral Soedirman di sampaikan hampir 69 tahun yang lalu, dan kabinet pemerintahan negara telah beberapa kali berganti, namun kalimat tersebut diatas masih sangat relevan bagi keberadaan TNI dewasa ini. Lebih-lebih dalam menghadapi tahun politik 2014, nasehat Panglima Besar Jenderal Soedirman perlu di sosialisasikan kembali dan dijadikan prinsip pedoman setiap prajurit TNI dalam melaksanakan tugas.

“Tentara hanya mempunyai kewajiban satu, ialah mempertahankan kedaulatan negara dan menjaga keselamatannya, sudah cukup kalau Tentara teguh memegang kewajiban ini” kalimat ini dimaksudkan bahwa TNI mempunyai tugas pokok **menjaga kedaulatan negara** dan selalu mempertahankan setiap fihak manapun yang akan menghancurkannya, TNI harus siap paling di depan apabila ada kelompok baik dari dalam maupun luar negeri yang mencoba menghancurkan kedaulatan NKRI, maka sudah sepantasnya kalau TNI mempunyai motto **“NKRI HARGA MATI”** karena motto tersebut merupakan wujud dari totalitas TNI dalam menjaga kedaulatan negara, dan itu merupakan kewibawaan atau kebanggan TNI.

“Sebagai Tentara, disiplin harus dipegang teguh, tunduk kepada pimpinan atasannya, dengan ikhlas mengerjakan kewajibannya”. Penggalan kalimat diatas, merupakan sikap profesionalisme prajurit TNI yang harus dilakukan, tunduk disertai ketaatan yang keluar dari keikhlasan yang tulus ikhlas dan didasari dengan kesungguhan melakukan tugas pokok sebagai bentuk kewajiban yang harus dilaksanakan, sehingga untuk dapat melaksanakan kewajiban tugas pokok tersebut Parjurit TNI harus meningkatkan kemampuannya. Itulah bentuk profesionalisme yang harus dilakukan oleh setiap Prajurit TNI.

“Harus diingat pula, bahwa Negara Indonesia tidak cukup dipertahankan oleh tentara saja, maka perlu sekali mengadakan kerjasama yang seerat-eratnya dengan golongan serta badan-badan di luar Tentara. Tentara tidak boleh menjadi suatu alat golongan atau orang siapapun juga.” Kalimat ini juga menunjukkan bahwa Kedaulatan NKRI menjadi tanggung jawab semua komponen Bangsa, karena sistem pertahanan kita sesuai dengan undang-undang menganut **Sistem Pertahanan Semesta**, yang melibatkan seluruh warganegara Indonesia, dimana TNI menjadi kekuatan Utama dan Rakyat serta sumber daya nasional yang disiapkan sebagai kekuatan cadangan maupun kekuatan pendukung. Sehingga tidak salah ketika TNI mengumandangkan **“Kemanunggalan TNI Rakyat”** sebagai wujud sistem pertahanan Semesta, yang merupakan kekuatan yang tidak dapat dipisahkan. Namun disisi lain, TNI juga punya kemandirian terhadap kepentingan kelompok ataupun golongan tertentu, artinya kepentingan TNI adalah kepentingan politik negara, sehingga apabila ada kelompok ataupun golongan yang memanfaatkan TNI diluar kepentingan politik negara, maka tegas-tegas TNI menolaknya. Dengan kata lain TNI akan Netral, wujud netralitas TNI ini diaplikasikan dengan TNI tidak memanfaatkan hak pilihnya pada Pemilu 2014 nanti.

Jadi apabila ada yang masih menanyakan tentang TNI dalam upaya memelihara dan meningkatkan Profesionalismenya serta sikap TNI dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka sebetulnya sudah sejak dahulu kala, atau sejak berdirinya TNI, yang diperkuat dengan pidato Panglima Besar TNI, Jenderal Besar Soedirman bahwa Profesionalisme dan Netralitas TNI merupakan prinsip dan pedoman yang harus dilakukan oleh TNI sampai kapanpun.

Tindak lanjut dari prinsip dan pedoman diatas maka, pimpinan TNI selalu menekankan kepada seluruh jajarannya untuk selalu memelihara dan meningkatkan Profesionalisme sesuai peran, tugas dan tanggung jawabnya masing-masing dan selalu menjaga Netralitas, tidak boleh berfihak kepada salah satu golongan apapun.

Profesionalisme dan Netralitas Kodam XVI/Ptm.

Mengacu kepada Profesionalisme dan Netralitas TNI, maka Kodam XVI/Ptm menjabarkan Profesionalisme dan Netralitas disesuaikan dengan Tugas Pokok Kodam XVI/Ptm, yang pelaksanaannya sangat dipengaruhi antara lain oleh :

a. Situasi dan Kondisi Kodam XVI/Ptm. Kodam XVI/Ptm membawahi wilayah Provinsi Maluku dan Provinsi Maluku Utara, dimana secara geografis



wilayahnya berbentuk kepulauan, diperkirakan terdapat lebih dari 2.000 pulau baik yang sudah bernama atau belum diberi nama, sedangkan luas daratan hanya 10 % sedangkan sisanya 90% berupa lautan dari luas wilayah Maluku dan Maluku Utara. Demikian juga wilayahnya berbatasan langsung dengan beberapa negara yaitu negara Australia dan RDTL serta Negara Palau. Dari letak geografis tersebut, maka bila dilihat dari segi pertahanan dan keamanan, letak Kodam XVI/Ptm sangat rawan terhadap kegiatan Subversi/Infiltrasi ataupun pelanggaran batas wilayah serta tindakan ilegal lainnya seperti ilegal fishing ataupun penyelundupan dari pihak asing. Demografi wilayah Maluku dan Maluku Utara yang berjumlah 2.622.300 jiwa (sensus tahun 2010) atau dengan kepadatan penduduk sekitar 27 jiwa/Km², berada di pulau-pulau terpisah yang menimbulkan banyak suku dengan adat istiadat yang cukup berbeda, sehingga sering menimbulkan kesalahpahaman akibat primordialisme kedaerahan/kesukuan yang cukup kental, hal ini sering menimbulkan kerawanan keamanan dan ketertiban. Meskipun kondisi sosial tidak jauh berbeda dengan wilayah Kodam yang lain, namun dengan wilayah kepulauan, maka karakteristik kehidupan sosial menjadi sedikit berbeda, hal ini karena sangat dipengaruhi oleh wilayah kepulauan yang transportasinya masih mengandalkan transportasi laut, sehingga pengaruh cuaca dan iklim sangat memengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi masyarakat Maluku dan Maluku Utara serta

akses dengan wilayah lain sering menjadi hambatan. Beberapa kejadian atau peristiwa yang pernah terjadi dari dampak Geografi, demografi dan kondisi sosial wilayah Maluku dan Maluku Utara antara lain terjadinya pelanggaran pelintas batas di wilayah perbatasan RI yaitu di P. Lirang Kab. Maluku Barat Daya dengan negara RDTL dikarenakan masyarakat P. Lirang dan RDTL masih memiliki hubungan keluarga, sehingga mereka sering saling berkunjung tanpa melalui perizinan resmi. Kita juga mengetahui tentang kerusuhan beberapa tahun lalu yang terjadi pada tahun 1999-2003 dan pada tanggal 11 September 2011 serta bentrok pada tanggal 15 Mei 2012 pada acara pawai Obor Pattimura.

b. Gelar kekuatan yang dimiliki Kodam XVI/Ptm.
Kekuatan Kodam XVI/Ptm tergelar meliputi :

- 1) 2 Korem yaitu : Korem 151/BNY dan Korem 152/BBL.
- 2) 9 Kodim yaitu : Kodim 1501/TNT, Kodim 1502/MSH, Kodim 1503/TUAL, Kodim 1504/ABN, Kodim 1505/TDR, Kodim 1506/NLA, Kodim 1507/SML, Kodim 1508/TBL, dan Kodim 1509/LBH.
- 3) 4 Yonif yaitu : Yonif 731/Kbs, Yonif 732/Bnu, Yonif 733/Raiders dan Yonif 734/Smd.
- 4) 2 Satbanpur yaitu : Denkav 5/BLC dan Denzipur 5/CMG.
- 5) 2 Satgas BKO yaitu : Yonif 643/WNS dan Yon Armed 9/K.





Gelar kekuatan ini tersebar diseluruh wilayah Maluku dan Maluku Utara, bila dihadapkan dengan jumlah pemerintahan di daerah Maluku dan Maluku Utara yang berjumlah 16 Kabupaten dan 4 Kota, dengan jumlah Kodim yang hanya 9 Kodim, maka ada sebagian Kodim yang wilayahnya terdiri dari 2 atau 3 Kabupaten. Namun demikian dengan segala kelebihan dan kekurangannya Kodam XVI/Ptm siap mengemban tugas yang dibebankannya.

Dari Situasi propinsi Maluku dan Maluku Utara dan gelar satuan Kodam XVI/Ptm seperti diatas, maka upaya menanamkan profesionalisme Prajurit yang dilakukan oleh Kodam XVI/Ptm adalah dengan menerapkan salah satu strategi yang tepat yaitu mempersiapkan, memelihara dan meningkatkan SDM setiap Prajurit Kodam XVI/PTM agar mampu menjalankan setiap tugas, yang memiliki daya tempur yang handal, menguasai peranti keras dan lunak sesuai dengan keahlian (*Skill*) yang disandanginya serta ditunjang dengan daya nalar/pikir yang baik, sehingga mampu menjalankan setiap tugas yang diemban. Profesionalisme prajurit Kodam XVI/Ptm haruslah prajurit yang terlatih, terdidik, diperlengkapi secara baik, tidak berpolitik praktis, tidak berbisnis, dan dijamin kesejahteraannya serta mengikuti kebijakan politik negara yang menganut prinsip demokrasi, supremasi sipil, tidak bertentangan dengan Hak Asasi

Manusia (HAM), menaati ketentuan hukum Nasional dan hukum Internasional. Profesionalisme prajurit harus dilakukan dan dimulai dari pembentukan personelya, karena pada dasarnya personellya yang menggerakkan suatu organisasi. Prajurit profesional harus fokus pada pekerjaannya sesuai dengan strata pangkat dan jabatan yang disandang. Penerapan sistem reward and punishment diterapkan karena tuntutan tugas seiring dengan pemenuhan hak prajurit. Sejalan dengan itu, upaya peningkatan moral prajurit Kodam XVI/Ptm dalam pembentukan profesionalisme prajurit. Sangat berbahaya ketika senjata diawaki oleh prajurit yang tidak profesional dan tidak memiliki moralitas yang sesuai dengan ajaran agama, maka yang terjadi adalah penyalahgunaan profesi dan berakibat sangat mencederai citra Kodam XVI/Ptm. Dengan penggelaran satuan yang demikian tersebar di wilayah yang transportasinya relatif tergantung dengan cuaca dan musim, maka setiap Prajurit Kodam XVI/Ptm tidak boleh putus asa dan tetap semangat dalam menjalankan tugas-tugasnya secara profesional.

Begitu pula dalam menanamkan Netralitas, Kodam XVI/Ptm selalu menekankan kepada setiap prajuritnya dimanapun berada, bahwa TNI dalam mengemban amanat menjaga kedaulatan negara, tidak mungkin dilaksanakan sendiri, diperlukan



kerjasama dengan badan (institusi) ataupun golongan dimasyarakat yang lain (sesuai amanat Pangsar Jendral Besar Soedirman). Dengan sendirinya kerjasama ini adalah untuk kepentingan bangsa dan negara, sehingga kita tidak boleh larut dalam fatamorgana kepentingan sesaat mendukung salah satu badan atau golongan dimasyarakat. Pengalaman dimasa lalu TNI yang sedikit banyak telah mendukung salah satu golongan tidak boleh terulang lagi, masa kelam itu akibat tidak menerapkan prinsip dan pedoman keberadaan TNI sesuai dengan amanat Pangsar Soedirman. Keberadaan Prajurit Kodam XVI/Ptm diwilayah Maluku dan Maluku Utara haruslah dapat bersinergis dengan badan ataupun golongan masyarakat di daerah, kerjasama itu adalah saling bahu membahu membahu dalam rangka menjaga stabilitas keamanan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat di daerah. Program Binter yang merupakan salah satu fungsi utama dari TNI AD, menuntut Prajurit Kodam XVI/Ptm selalu dekat dengan Rakyat, manunggal dengan Rakyat dan siap membantu kesulitan Rakyat di daerah. Hal inilah dituntut sikap mengutamakan kepentingan bersama, tidak boleh hanya mengutamakan kepentingan kelompok ataupun salah satu badan, sehingga netralitas dalam

menjaga kepentingan bersama merupakan sikap yang harus melekat pada setiap Prajurit Kodam XVI/Ptm. Untuk itulah netralitas bagi Prajurit Kodam XVI/Ptm merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sikap profesionalisme yang harus dijunjung tinggi dalam melaksanakan kewajiban sebagai Prajurit TNI.

Kodam XVI/Ptm di Tahun Politik 2014.

Pada tahun 2014 dikatakan sebagai tahun politik karena negara Indonesia akan melaksanakan pesta demokrasi, yaitu pelaksanaan pemilihan umum legeslatif dan pemilihan Presiden dan wakil Presiden. Seiring dengan hal tersebut tentunya momentum pelaksanaan pemilu 2014 yang dilaksanakan sangat berpengaruh terhadap perkembangan lingkungan di daerah dan dinamika perilaku masyarakat Maluku dan Maluku Utara yang saat ini sudah semakin kritis dalam berbagai kehidupan, baik aspek Politik, Ekonomi, Sosial dan Budaya. Kondisi masyarakat yang demikian berdampak di masyarakat secara keseluruhan. Kodam XVI/Ptm dalam salah satu tugas pokoknya adalah menjaga keamanan negara diwilayah Maluku dan Maluku Utara, artinya baik keamanan yang dapat mengganggu sendi-sendi kehidupan masyarakat di Maluku dan Maluku Utara,

yang diakibatkan oleh gangguan dari dalam negeri maupun luar negeri, harus menyikapi tahun politik 2014 ini dengan seksama. Strategi meningkatkan profesionalisme Prajurit Kodam XVI/Ptm merupakan langkah yang tepat sehingga setiap prajurit mengetahui apa yang harus diperbuat dan apa yang tidak boleh diperbuat dalam setiap pelaksanaan tugasnya. Demikian juga sikap netralitas harus melekat pada langkah profesional yang ditunjukkan dalam setiap tugasnya, sehingga Prajurit Kodam XVI/Ptm benar-benar menjadi tumpuan dan harapan semua badan atau kelompok yang ada dimasyarakat. Sikap netralitas ini menjadikan Prajurit Kodam XVI/Ptm diterima dimana saja dan oleh siapa saja.

Dengan pertimbangan tersebut diatas, maka pada tahun politik 2014 ini Kodam XVI/Ptm memberi penekanan agar dapat dipedomani oleh prajurit Kodam XVI/Ptm adalah sebagai berikut :

a. Yang berkaitan dengan Profesionalisme.

- 1) Prajurit Kodam XVI/Ptm harus mengetahui peran tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan jabatan.
- 2) Prajurit Kodam XVI/Ptm harus memiliki, memelihara dan meningkatkan kemampuan (skill) yang berkaitan peran tugas dan tanggung jawab jabatannya.
- 3) Prajurit Kodam XVI/Ptm harus melaksanakan latihan dengan sungguh-sungguh sesuai dengan kalender latihan yang telah dibuat, agar memiliki kemampuan sesuai dengan tingkat latihan yang harus dicapai.

4) Prajurit Kodam XVI/Ptm harus mengetahui hasil evaluasi setiap latihan atau tugas yang dilaksanakan untuk mengetahui sampai sejauh mana kekurangan maupun kelemahan yang harus diperbaiki untuk latihan atau tugas yang akan dilaksanakan berikutnya.

5) Prajurit Kodam XVI/Ptm harus siap mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan dan apa yang tidak dilakukan berkaitan dengan beban tugas dan tanggung jawab yang embannya.

6) Prajurit Kodam XVI/Ptm harus siap menerima koreksi atas hasil pelaksanaan tugas agar dapat kesempurnaan pada tugas-tugas selanjutnya.

7) Prajurit Kodam XVI/Ptm harus dapat menjalin kemitraan dan kerjasama dengan badan/institusi dan kelompok masyarakat lainnya dalam pencapaian tugas pokok.

Prajurit Kodam XVI/Ptm sebagai alat pertahanan negara dituntut meningkatkan profesionalitas keprajuritan dalam menjaga integritas wilayah dan kedaulatan negara. Tuntutan profesionalitas keprajuritan harus dipahami bukan saja sebagai respon atas proses demokratisasi di tanah air dan perubahan lingkungan global, tetapi juga sebagai kelanjutan dari peran historis TNI dalam mempertahankan integritas wilayah dan kedaulatan negara. Sejak proses reformasi internal TNI bergulir bersama arus reformasi nasional, TNI terus melakukan reformasi diri, mulai dari reposisi TNI untuk tidak lagi bermain diranah politik baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini dapat dilihat pada penghapusan peran Dwifungsi ABRI,



penarikan anggota TNI dari legislatif pada tahun 2004, serta reorganisasi dan reaktualisasi peran TNI merupakan proses yang terus berlanjut. Soliditas prajurit TNI jangan sampai terganggu oleh dinamika politik yang berlangsung di alam demokrasi bangsa Indonesia karena jati diri sebagai tentara rakyat, tentara pejuang, tentara nasional dan tentara profesional selalu dicerminkan dalam pola pikir dan pola tindaknya. TNI memiliki garis pembatas yang sangat tegas dalam ranah politik. Selaku alat negara, maka politik TNI adalah politik negara, bukan politik kelompok atau politik suatu partai. Hal ini jelas menuntut agar TNI senantiasa mengedepankan profesionalisme dalam mengimplementasikan perannya sebagai bagian dari sistem ketatanegaraan. Dinamika politik yang sarat dengan kepentingan dan kecenderungan tarik-menarik antar elite politik harus dapat disikapi secara arif dan bijaksana untuk menghindari keterjerumusan TNI pada situasi yang sangat pelik.

b. Yang berkaitan dengan Netralitas

- 1) Prajurit Kodam XVI/Ptm tidak boleh menjadi anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
- 2) Prajurit Kodam XVI/Ptm tidak boleh menjadi anggota Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslu Kecamatan.
- 3) Prajurit Kodam XVI/Ptm tidak boleh menjadi anggota PPK, PPS DAN KPPS. Konsekuensi logis sebagai alat pertahanan dan bukan alat keamanan, maka Kodam XVI/Ptm juga tidak boleh terlibat dalam penyelenggaraan pemilu.
- 4) Prajurit Kodam XVI/Ptm tidak boleh menjadi panitia pendaftaran pemilih dan tidak boleh menjadi anggota maupun pimpinan panitia pendaftaran pemilih (pantarlil).
- 5) Prajurit Kodam XVI/Ptm tidak boleh sebagai peserta dan juru kampanye dan dilarang ikut kampanye dalam pemilu apapun, bahkan dilarang mendatangi tempat kampanye serta tidak boleh berperan sebagai peserta dan juru kampanye.
- 6) Prajurit Kodam XVI/Ptm tidak boleh menjadi tim sukses kandidat dan dilarang menjadi tim sukses kandidat dalam semua jenis pemilu. Prajurit dan PNS Kodam XVI/Ptm yang akan menjadi Tim sukses kandidat Presiden atau kepala daerah atau calon anggota DPR/ DPRD/ DPD harus ke luar dari Institusi TNI.
- 7) Prajurit Kodam XVI/Ptm tidak boleh memobilisir semua organisasi sosial, keagamaan dan ekonomi untuk kepentingan partai politik dan kandidat tertentu serta tidak boleh mengarahkan, menekankan, mempengaruhi dan memobilisir semua organisasi sosial, keagamaan dan ekonomi baik yang ada di

dalam maupun di luar organisasi untuk kepentingan partai politik atau kandidat tertentu, agar sikap netralitas dan integritas Kodam XVI/Ptm tetap terjaga sebagai prajurit profesional, maka pimpinan Kodam XVI/Ptm di setiap tingkatan perlu mengontrol dan mengawasi ketentuan di atas.

8) Prajurit Kodam XVI/Ptm yang akan mengikuti Pemilu/Pemilukada harus membuat pernyataan mengundurkan diri dari dinas aktif (pensiun) sebelum tahap pelaksanaan Pemilu/Pemilukada (berdasarkan surat telegram panglima TNI Nomor Str/546/2006 tanggal 22 Agustus 2006).

Prajurit TNI (yang masih aktif) dengan tegas dinyatakan untuk tidak menggunakan hak pilihnya dan tidak masuk dalam Parlemen. Netralitas TNI ini merupakan keputusan yang final dan TNI tidak ada merasa kehilangan haknya untuk memilih, karena sejak menandatangani ikatan dinas menjadi prajurit TNI, maka seorang prajurit sudah siap untuk kehilangan sebagian haknya, salah satunya adalah hak untuk memilih. Walaupun disadari juga bahwa akhir-akhir ini ada sebagian elite politik yang berusaha menyeret TNI untuk menggunakan hak pilihnya dengan dalih membela Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai prajurit TNI. Prajurit Kodam XVI/Ptm harus bersikap netral agar mampu melindungi segenap komponen bangsa dengan aman dan damai.

Kita ketahui bersama bahwa Pemilu Legislatif dan Pilpres yang akan datang merupakan suatu proses pesta demokrasi yang sarat dengan muatan politik, adanya keinginan untuk saling memperebutkan pengaruh dan posisi serta kekuasaan. Kepercayaan rakyat akan menjadi meningkat kepada TNI bila pelaksanaan Pemilu maupun Pilpres dilaksanakan secara demokratis dan sesuai dengan prinsip terbuka, jujur dan adil. Disinilah diperlukan netralitas prajurit TNI sebagai suatu jaminan pertaruhan terhadap tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Netral berarti tidak berpihak kepada siapapun dan dalam kondisi apapun yang terjadi saat ini. Kita harus berfikir bijaksana, arif dan adil sesuai tugas dan tanggung jawab TNI secara jelas dan tanpa adanya campur tangan pihak lain. Campur tangan inilah yang akan membahayakan integritas, netralitas dan soliditas TNI, sehingga akan berdampak pada keutuhan dan keselamatan NKRI. Prajurit Kodam XVI/Ptm harus benar-benar memahami secara benar, bagaimana implementasi tuntutan profesionalitas tugas dihadapkan dengan hak pilih masyarakat dengan tetap memegang teguh netralitas.

RIWAYAT HIDUP SINGKAT PENULIS

I. Data Pokok.

1. Nama : Eko Wiratmoko
2. Pangkat : Mayjen TNI/29453
3. Tempat/Tgl. Lahir : Jakarta/18-10-1958
4. Agama : Islam
5. Status : Kawin
6. Sumber Pa/Th : Akabri/1982
7. Jabatan : Pangdam XVI/Pattimura

II. Riwayat Pendidikan Militer.

A. Dikbangum.

1. Akabri : 1982
2. Sussarcab If : 1981
3. Suslapa I If : 1988
4. Diklapa li If : 1991
5. Seskoad : 1996
6. Sesko TNI : 2004
7. Lemhanas : 2009

B. Dikbangspes.

1. Sussar Para : 1981
2. Lat Komando : 1982
3. Sus Bhs Portugis : 1989
4. Sus Bhs Inggris : 1990
5. Susfung Ren : 2000
6. Sus Danrem : 2006

III. Riwayat Penugasan.

A. Dalam Negeri.

1. Ops. Tim-Tim : 1982
2. Ops. Tim-Tim : 1984
3. Ops. Tim-Tim : 1986
4. Ops. Tim-Tim : 1999
5. Ops. Dampak-52/
Aceh : 1992
6. Satgas Intel Aceh : 1996
7. Ops. Aceh : 2001

B. Luar Negeri.

1. Filipina : 1987

IV. Riwayat Jabatan.

1. Danton Kopassandha
2. Danki-113 Grup-3
3. Dan Team-1 Den-111
4. Pasi-2/21 Grup-2 Kopassus
5. Pgs. Dansat Scuba Susjur
6. Pgs. Danden-3/22 Grup-2
7. Danden-3/22 Grup-2
8. Pgs. Kasi-1 Grup-2 Kopassus
9. Kasi-1 Grup-2 Kopassus
10. Pamen Kopassus (Dik)
11. Danyon-43 Grup-4 Kopassus
12. Wadan Grup-4 Kopassus
13. Wadan Grup-3/Pusdik Passus
14. Waasren Danjen Kopassus
15. Wadan Grup-3/Pusdik Passus
16. Asintel Kopassus
17. Asintel Kasdam IM
18. Paban Utama C-4 Dit "C" Bais
19. Pamen Mabes TNI (Diksesk)
20. Paban Utama C-4 Dit "C" Bais
21. Danrem-011/Lw Dam Im
22. Pamen Mabesad (Dik)
23. Dandenma Mabesad
24. Danpusintelad
25. Aspam Kasad
26. Pangdam XVI/Ptm

PERANAN KODAM JAYA DALAM MENYUKSESKAN PEMILU 2014



Oleh : Mayjen TNI E. Hudawi Lubis
(Pangdam Jaya)

Tahun politik 2014 menyajikan tantangan tersendiri bagi TNI, keberhasilan atau kegagalan dalam pengamanan Pemilu bukan satu-satunya dimensi yang dinilai publik. Lebih dari itu, apresiasi dan kepercayaan publik akan muncul manakala TNI mampu menjaga dan memegang teguh komitmen netralitas selama tahapan pelaksanaannya.

Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana untuk pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilu dari tahun ke tahun selalu memberikan nuansa yang berbeda dalam setiap pelaksanaannya. Dari pemilu pertama yaitu tahun 1955 hingga pemilu yang paling terakhir yaitu tahun 2009 lalu, selalu memiliki sisi lain yang sangat menarik untuk dikaji.

Pembahasan mengenai pelaksanaan Pemilu sebagai praktek pelaksanaan kegiatan politik, akan tidak bisa lepas dari adanya suatu mekanisme yang secara sistematis mengendalikan dan menjadi penggerak dari kegiatan politik tersebut yang kemudian disebut sebagai pemerintah. Banyak sekali organ-organ, yang terdapat dalam sistem pemerintahan suatu negara, salah satunya ialah komponen militer atau TNI.

Salah satu hal menarik untuk dikaji adalah netralitas dan peranan TNI dalam pelaksanaan Pemilu 2014, bahkan dari Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono pada saat menyampaikan sambutan dalam upacara peringatan hari ulang tahun TNI ke-68 di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma Jakarta mengingatkan **“Kita akan kembali menyelenggarakan Pemilu legislatif dan Pilpres. Hasil reformasi harus diwujudkan pada pemilu tahun depan pastikan keberpihakan TNI tegak lurus dengan negara, Karena hanya dengan cara itulah TNI akan semakin dipercaya dan menjadi bagian penting dalam proses pematangan demokrasi di Indonesia.”**

Tahun 2014 ini bisa dikatakan, setiap sendi kehidupan berbangsa (Ipoleksosbudmilkam) akan berkontraksi seiring memanasnya aktivitas politik sehingga perhatian dan energi seluruh rakyat Indonesia sebagian besar berfokus pada upaya menggelar pesta demokrasi dan melaluinya dalam keadaan aman, lancar dan sukses. Sebagai kegiatan besar pesta lima tahunan seluruh rakyat Indonesia yang akan menjadi salah satu indikator perjalanan berdemokrasi, pemilihan umum dan pemilihan presiden secara langsung sangat menentukan nasib rakyat dalam kurun waktu lima tahun kedepan. Melalui Pemilu, rakyat dapat memilih anggota lembaga perwakilan, yaitu DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

Setiap tahapan penting Pemilu (dimulai dari tahapan pendaftaran dan pemutakhiran daftar pemilih, tahapan pengadaan logistik, tahapan kampanye, serta tahapan pemungutan penghitungan suara) memiliki tingkat kerawanan yang berbeda dan berpotensi menimbulkan efek domino terhadap



terjadinya konflik baik vertikal maupun horizontal di tengah masyarakat. Wilayah tanggung jawab Kodam Jaya yang terdiri dari Provinsi DKI Jakarta, Depok, Tangerang dan Bekasi yang dianggap sebagai sentral aktivitas nasional dan barometer keamanan nasional tentu tidak luput dari ancaman potensi kerawanan yang harus diantisipasi. Tulisan ini akan memberikan gambaran dan sedikit masukan tentang peranan Kodam Jaya dalam mensukseskan Pemilu 2014.

Peranan Kodam Jaya Dalam Pelaksanaan Pemilu 2014.

Didalam kegiatan pengamanan Pemilu 2014, keterlibatan unsur Komando Kewilayahan sesuai dengan UU TNI nomor 34 tahun 2004 harus dapat dioptimalkan yaitu sesuai pasal 7 ayat 2 b dimana TNI memiliki andil dalam tugas pokok OMSP (Operasi Militer Selain Perang). Masih adanya rasa ketakutan dari kelompok-kelompok tertentu di masyarakat terhadap keterlibatan TNI dalam penyelenggaraan Pemilu, merupakan tantangan yang harus dijawab dengan menunjukkan profesionalitas kita dalam bertugas mengawal jalannya pesta rakyat ini. Keragaman penduduk di wilayah Ibukota Jakarta, yang nantinya pada saat tahapan pengerahan massa akan terkotak-kotak berdasarkan warna atau simbol gambar partai merupakan salah satu potensi ancaman yang harus dapat diantisipasi oleh Kodam Jaya selaku komando kewilayahan. Oleh sebab itu guna menjaga stabilitas keamanan dan meningkatkan kesiapsiagaan

dalam menghadapi pelaksanaan Pemilu 2014, Kodam Jaya mengambil langkah-langkah guna berperan aktif dalam terselenggaranya setiap tahapan Pemilu sampai dengan selesai. Terdapat dua hal mendasar yang menjadi perhatian Kodam Jaya dalam rangka mensukseskan penyelenggaraan Pemilu 2014, yaitu tentang Netralitas Prajurit Kodam Jaya dan peran Kodam dalam membantu pengamanan Pemilu.

Netralitas Prajurit Kodam Jaya.

Tahun politik 2014 menyajikan tantangan tersendiri bagi TNI, keberhasilan atau kegagalan dalam pengamanan Pemilu bukan satu-satunya dimensi yang dinilai publik. Lebih dari itu, apresiasi dan kepercayaan publik akan muncul manakala TNI mampu menjaga dan memegang teguh komitmen netralitas selama tahapannya.

Sesuai amanat UU RI No. 34 tahun 2004 tentang TNI, diperintahkan kepada seluruh prajurit sampai tingkatan paling bawah agar senantiasa menjaga dan memegang teguh komitmen netralitas dalam menjalankan tugas dan memposisikan diri di tengah pergaulan masyarakat. Oleh karena itu unsur komandan satuan di Kodam Jaya diharuskan bergerak dan aktif memberikan penekanan kepada prajurit anggotanya sedetail mungkin tentang esensi dan pentingnya semua hal yang terkait netralitas serta yakinkan mereka memahami dan mengindahkan apa yang boleh dan tidak boleh, mana yang termasuk dan yang tidak termasuk dalam generalisasi netralitas.

Netral diartikan Tidak berpihak, tidak ikut atau tidak membantu salah satu pihak. Sedangkan Netralitas TNI berarti TNI bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis. Berdasarkan Surat Telegram Panglima TNI Nomor STR/546/2006 tanggal 22 Agustus 2006 yang terdapat didalam buku Sikap TNI dalam Pemilukada, Implementasi (pelaksanaan) Netralitas TNI dalam Pemilu dan Pilkada tertera dalam butir-butir dibawah ini :

1. Mengamankan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada sesuai dengan tugas dan fungsi bantuan TNI kepada Polri.
2. Netral dengan tidak memihak dan memberikan dukungan kepada salah satu kontestan Pemilu dan Pilkada.
3. Satuan/perorangan/fasilitas TNI tidak dilibatkan pada rangkaian kegiatan Pemilu dan Pilkada dalam bentuk apapun di luar tugas dan fungsi TNI.
4. Prajurit TNI tidak menggunakan hak memilih baik dalam Pemilu maupun Pilkada.
5. Khusus bagi prajurit TNI (isteri/suami/anak prajurit TNI), hak memilih merupakan hak individu selaku warga negara, institusi atau satuan dilarang memberi arahan di dalam menentukan pelaksanaan dari hak pilih tersebut.

Kodam Jaya/Jayakarta sebagai Satuan kewilayahan dituntut kesigapan dan peran aktif dalam mengawasi para prajurit bawahannya di masing-masing satuan agar tidak melanggar rambu-rambu yang telah ditentukan. Adapun tugas dan tanggung jawab para Komandan Satuan adalah sebagai berikut :

1. Setiap Komandan dan Satuan wajib mensosialisasikan Netralitas TNI dalam Pemilu dan Pilkada kepada anggota dan keluarganya baik pada setiap apel maupun pada jam komandan secara periodik.
2. Setiap Komandan Satuan wajib mengecek dan mengawasi sejauhmana pemahaman anggota tentang Netralitas TNI.
3. Setiap Komandan Satuan wajib mengawasi kegiatan anggota dan keluarganya di lingkungan masyarakat untuk mencegah hal-hal yang negatif sekaligus mencegah kegiatan yang terkait dengan politik praktis.
4. Setiap Komandan Satuan harus memberikan sanksi apabila anggotanya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang telah ditetapkan.
5. Setiap Komandan Satuan/Kepala Satuan, Dinas wajib menyampaikan hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian kepada seluruh anggotanya antara lain :



- a. Membatasi diri untuk tidak berada secara fisik, baik perorangan maupun fasilitas dinas di arena tempat penyelenggaraan kampanye peserta Pemilu dan Pilkada.
- b. Melaksanakan koordinasi sebaik-baiknya dengan pihak yang berwenang agar tidak ada pemasangan identitas peserta Pemilu dan Pilkada di lingkungan markas, asrama dan fasilitas-fasilitas TNI lainnya.
- c. Dalam melaksanakan tugas agar lebih mewaspadaai daerah-daerah yang berpotensi rawan konflik (Politik, Ekonomi dan Sara)
- d. Mencegah bentrokan fisik antar massa atau perorangan pendukung partai politik di sekitar markas, kesatrian, asrama, kompleks TNI atau di daerah sekitarnya pada radius kurang lebih 100 m, apabila tidak terdapat aparat Polri/Hansip/Petugas yang menangani, maka prajurit TNI secara unit/satuan wajib menghentikan/melerai, selanjutnya menyerahkan permasalahannya kepada aparat Polri terdekat, dengan tetap menjaga Netralitas TNI.
- e. Tidak melakukan kegiatan berupa komentar, penilaian dan mendiskusikan maupun arahan apapun tentang kontestan peserta Pemilu dan Pilkada kepada keluarga dan lingkungannya.

- f. Tidak memberikan bantuan dalam bentuk dan kepentingan kegiatan apapun kepada peserta Bakal Calon Pemilu dan Pilkada di luar tugas dan fungsi TNI.
- g. Mengantisipasi dan mewaspadai setiap perkembangan situasi di lingkungannya serta melaksanakan temu cepat dan lapor cepat secara hirarki, apabila ada kejadian atau kegiatan yang berindikasi mengarah kepada menghambat, mengganggu atau langkah menggagalkan Pemilu dan Pilkada.

Bagi para Prajurit TNI, kaidah-kaidah yang harus ditaati selama proses penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada tertuang dalam bentuk larangan-larangan yang secara esensial mengatur berbagai hal penting diantaranya :

1. Memberi komentar, penilaian, mendiskusikan, pengarahan apapun berkaitan dengan kontestan Pemilu dan Pilkada kepada keluarga atau masyarakat.
2. Secara perorangan/fasilitas berada di arena tempat penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada.
3. Menyimpan dan menempel dokumen, atribut, benda lain yang menggambarkan identitas peserta Pemilu dan Pilkada di instansi dan peralatan milik TNI.
4. Berada di arena Tempat Pemungutan Suara (TPS) saat pelaksanaan pemungutan suara.
5. Secara perorangan/satuan/fasilitas/instansi terlibat pada kegiatan Pemilu dan Pilkada dalam bentuk berkampanye untuk mensukseskan kandidat tertentu/kontestan termasuk memberi bantuan dalam bentuk apapun di luar tugas dan fungsi TNI.
6. Melakukan tindakan dan atau pernyataan apapun yang dilakukan secara resmi yang bertujuan atau bersifat mempengaruhi keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu).
7. Secara perorangan/satuan/fasilitas/instansi menyambut dan mengantar peserta kontestan.
8. Menjadi anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU), Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu), Panitia Pemilih, Panitia Pendaftar Pemilih, peserta dan atau juru kampanye.
9. Terlibat dan ikut campur dalam menentukan menetapkan peserta Pemilu baik perorangan atau kelompok partai.
10. Memobilisasi organisasi sosial, agama dan ekonomi untuk kepentingan Parpol atau calon tertentu.
11. Tidak melakukan tindakan dan atau membuat pernyataan apapun yang bersifat mempengaruhi keputusan KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih).

Komitmen netralitas TNI akan menemukan

gaung kekuatannya jika tidak sebatas dipahami secara sepihak di lingkungan TNI saja, sementara masyarakat sekitar kurang mampu memahami substansinya. Maka selain secara pemahaman personal, setiap prajurit Kodam Jaya terutama yang bertugas di Komando Kewilayahan maupun pasukan di lapangan mempunyai kewajiban menyebarkan informasi dan pemahaman pada masyarakat tentang komitmen Netralitas TNI.

Jika kita kembali mencermati pengalaman dan pelanggaran yang mengemuka dalam pelaksanaan Pemilu sebelum ini baik di pusat maupun daerah-daerah, maka komitmen menjaga netralitas bukan mutlak hanya milik TNI, tetapi semua penyelenggara seperti KPUD, Bawaslu, Panwaslu, PPK seharusnya menunjukkan ketidakberpihakan pada siapapun atau pihak manapun. Terkadang kesalahan kecil dalam proses tahapan, menggiring opini publik bahwa telah terindikasi adanya keberpihakan penyelenggara kepada salah satu parpol atau calon tertentu. Oleh karenanya, tanggung jawab bersama menjaga netralitas dengan benar berlaku secara profesional.

Pengamanan Pelaksanaan Pemilu.

Berdasarkan pengalaman dari pelaksanaan Pemilu-Pemilu sebelumnya membuat kita akan dapat memahami lebih mendalam dan komprehensif guna menetapkan langkah secara terintegral dan bersinergi antar unsur terkait, dalam rangka menyukseskan pelaksanaan tugas yang diemban masing-masing. Kodam Jaya sebagai kompartemen strategis kewilayahan yang bertanggung jawab di bidang pertahanan mempunyai pengalaman menghadapi hajatan demokrasi baik tingkatan pemerintahan terbawah hingga teratas, adanya konflik dan gesekan perbedaan kepentingan dapat mengganggu keamanan wilayah.

Realitas politik sekarang, yang menunjukkan persebaran kekuatan berimbang atau tidak ada satupun yang dominan dalam peta perpolitikan nasional menggiring estimasi terjadinya penguatan potensi konflik di tengah masyarakat dan pemanfaatan celah-celah kerawanan oleh kelompok kepentingan yang kurang bertanggung jawab kian terbuka, sehingga akan lebih memperkeruh suasana. Kodam Jaya melakukan antisipasi terhadap segala kemungkinan yang bakal terjadi dengan mengoptimalkan fungsi-fungsi yang ada bergerak kesetiap sendi-sendi untuk mendeteksi setiap kemungkinan yang bakal terjadi dan menyiapkan alat tangkalnya. Ada tiga fungsi yang menjadi fokus perhatian Kodam Jaya dalam menjaga kondusifitas

wilayah ibukota Jakarta dan daerah penyangganya, yaitu :

Pertama, peranan bidang teritorial. Sesuai dengan petunjuk dari komando atas, untuk menjaga stabilitas wilayah menjelang Pemilu maka Kodam Jaya melakukan kegiatan penguatan kemampuan dibidang teritorial. Aparat Teritorial dengan ujung tombaknya para Babinsa yang berada langsung dilapangan sampai dengan unsur pimpinan bergerak secara intensif dilapangan agar mampu melakukan pemantauan langsung situasi sehingga dapat membuat prediksi kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi dilapangan.

Optimalisasi peranan Bintara Pembinaan Desa (Babinsa) harus maksimal memantau gejala yang timbul ditengah semangat menikmati euphoria berdemokrasi. Kondisi psikologis sebagian besar masyarakat masih tidak cukup siap menerima adanya tuntutan keseimbangan antara hak dan kewajiban, mereka hanya siap menerima kemenangan dan tidak siap menerima kekalahan. Kerawanan-kerawanan dari tingkat kampung, RT dan RW seperti inilah yang harus sudah diketahui dan bisa diprediksi oleh seorang Babinsa.

Ditengah situasi penghargaan terhadap perbedaan yang semakin langka telah menjadikan sebagian masyarakat, mudah terperangkap dalam absolutisme dan fanatisme sempit baik bersifat kedaerahan, agama, suku, ideologi dan kepentingan politik. Hal ini berpengaruh terhadap pola pikir, sikap

dan tindak yang mudah memandang sesuatu atau seseorang berbeda pendapat serta kepentingan, sebagai pihak yang diperlakukan sebagai musuh, bukan patner yang bisa diajak menjalin interaksi secara dialogis. Pada keadaan inilah Peran Babinsa yang sangat krusial dan strategis, Babinsa dituntut tidak hanya menguasai wilayah secara geografi tetapi juga faham keadaan demografi wilayah tanggung jawabnya sebagai bahan analisa.

Berdasarkan informasi yang didapatkan dari para Babinsa di setiap wilayah tanggung jawabnya, maka dapat dipetakan kemungkinan potensi ancaman yang dapat timbul. Pemetaan potensi ancaman mulai dari tingkat kampung sampai dengan Kecamatan, Kabupaten dan Kota inilah yang dijadikan pegangan seorang Dandim, Danrem dan Pangdam untuk melakukan komunikasi yang intensif dengan jajaran maupun pihak-pihak lain yang terkait agar terwujudnya sinergitas dalam pengamanan kegiatan Pemilu di wilayah Kodam Jaya, sehingga demokrasi yang memunculkan pluralitas dan mengajarkan masyarakat untuk hidup berdampingan dengan toleransi dan saling menghormati satu sama lain sesuai nilai-nilai kebangsaan tentang Bhinneka Tunggal Ika serta rakyat sebagai warga negara dijamin hak politiknya oleh konstitusi untuk memilih dan dipilih dapat terlaksana dengan baik di Jakarta, Depok, Tangerang dan Bekasi.

Kedua, peranan bidang intelijen. Selain peran Babinsa, Kodam Jaya juga memaksimalkan



peran Intelijen kewilayahan dalam pemilu 2014 ini. Walaupun pada akhir 2013 terjadi sebuah perdebatan yang cukup panjang dan menyita banyak perhatian masyarakat luas tentang keterlibatan salah satu institusi intelijen yang menangani masalah intelijen dan pengamanan informasi yaitu Lemsaneg dalam proses pengamanan data pemilu. Kesepakatan kerjasama antara kedua institusi ini dimaksudkan untuk melakukan pengamanan data KPU menjelang Pemilu 2014 yang dianggap rentan dan rawan. Ketakutan yang berlebihan dari sebagian LSM dan masyarakat ini pada akhirnya menjadikan kesepakatan ini dibatalkan.

Kodam Jaya dalam menghadapi pemilu 2014 ini tetap mengutamakan kemampuan dari aparat intelijen yang ada dan tersebar di wilayah yang berfungsi sebagai *early warning system* dari setiap perkembangan situasi. Aparat intelijen yang dimulai dari Unit Intel Kodim, Tim Intel Korem sampai dengan Den Intel Kodam memonitor setiap perkembangan yang terjadi di setiap sektor ipoleksosbudmilkam. Selain itu penanaman kesadaran terhadap seluruh Prajurit dan PNS Kodam Jaya bahwa sejatinya mereka semua adalah seorang Bapulket yang berkewajiban melaporkan jika melihat dan mengetahui adanya suatu kejadian ataupun kegiatan yang dirasa akan memberikan dampak kedepan.

Intelijen berperan kedalam organisasi Kodam Jaya untuk melakukan pemantauan untuk mengawal setiap aktivitas yang dilakukan oleh Prajurit dan PNS di wilayah yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilu berjalan sesuai dengan jalur aturannya, sehingga dapat segera mencegah dan meminimalisir terjadinya pelanggaran. Untuk peran keluar intelijen sebagai mata dan telinga satuan, intelijen mengumpulkan semua informasi dan data dari semua sumber yang ada dilapangan. Sehingga tidak ada permasalahan yang muncul secara tiba-tiba dan menimbulkan dampak kerugian, setiap permasalahan yang akan terjadi diwilayah sebelum menjadi besar dan mengacaukan stabilitas sudah dapat dicegah dan ditemukan solusi untuk mengatasinya.

Tentu saja untuk memperoleh deteksi dini terhadap kemungkinan yang akan terjadi diwilayah Kodam Jaya menjelang pemilu ini, aparat intelijen telah melakukan pemantauan dan pengamatan secara mendalam terhadap semua peristiwa yang sudah terjadi selama ini dan dipadukan dengan situasi aktual yang terjadi sekarang dilapangan. Sehingga dapat menghasilkan intelijen yang diramalkan (*forecasting*) yang digunakan untuk mengambil langkah-langkah kebijakan selanjutnya bagi unsur komandan/pimpinan.

Ketiga, pengerahan pasukan. TNI dalam pelaksanaannya tidak pernah memberikan toleransi terhadap upaya-upaya yang bersifat memancing terjadinya gesekan dan konflik pada setiap tahapan Pemilu. Karena Pemilu memiliki nilai strategis dan kepentingan yang besar yang harus dikawal. Menyikapi hal ini, Kodam Jaya telah menyiapkan Pasukan Penindak Anti Huru-Hara (PHH). Kegiatan Penyiapan pasukan ini dimulai dari tingkat Kodim yang disiagakan 1 satuan setingkat peleton (SST), sedangkan untuk Korem disiapkan 1 sampai 2 satuan setingkat kompi (SSK). Sedangkan untuk tingkat Kodam disiagakan 1 batalyon cadangan.

Kodam Jaya sudah menyelenggarakan penataran tersebar tentang Penindakan Huru Hara (PHH), yang melibatkan perwakilan personel dari seluruh satuan jajaran. Penataran yang dilanjutkan dengan pelaksanaan latihan PHH di satuan-satuan, bertujuan untuk meningkatkan kemampuan teknis serta taktis tentang pengendalian dan penindakan huru-hara terhadap massa. Kemampuan tersebut, sangat bermanfaat dalam membantu nantinya tugas kepolisian menghadapi aksi massa yang diprediksi akan cenderung meningkat dalam pemilu tahun ini. Selama kegiatan pelatihan prajurit dibekali sejumlah materi yang terkait persiapan penanganan aksi unjuk rasa apabila massa melakukan tindakan anarkis dan berlatih bagaimana menentukan langkah-langkah awal sebagai bentuk tindakan pencegahan dan tindakan tegas yang terukur sesuai dengan hukum dan prosedur tetap yang berlaku.

Potensi konflik dalam pelaksanaan tahapan pemilu sangat besar kemungkinan terjadi, pada saat massa Parpol saling bertemu maka kemungkinan terjadi gesekan sangat besar. Wilayah kodam jaya yang banyak terdapat obyek-obyek vital dan simbol simbol negara harus tetap terjaga dari ancaman gangguan. Karena itu kesiapsiagaan pasukan harus selalu terjaga dan terbina setiap saat jika dibutuhkan, walaupun dalam penggunaan dan penerjunan pasukan TNI di lapangan sifatnya *mem-back up* dan penebalan terhadap Kepolisian.

Penutup.

Kodam Jaya bertekad mengerahkan semua potensi, daya dan kemampuan dalam mengawal dan menjaga pelaksanaan pesta demokrasi 2014 dari semua kemungkinan yang dapat terjadi. Setiap tindakan yang dilakukan mulai dari prajurit terendah sampai ke pucuk pimpinan tetap berpegang teguh pada aturan dan ketentuan, tetapi dengan tidak mengenyampingkan aspek responsif terhadap perkembangan yang terjadi dilapangan.

Pemahaman tentang netralitas dan peningkatan kemampuan dan kesiapan prajurit Kodam dalam merespon setiap perkembangan situasi yang terjadi serta sinergitas dengan pihak-pihak yang terkait adalah upaya nyata yang dilakukan kodam Jaya dalam berperan secara aktif menjaga dan mengawal pelaksanaan Pemilu 2014 khususnya di wilayah

tanggung jawab, agar terlaksana sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditentukan. Keberhasilan menjaga komitmen netralitas dan kesiapsiagaan TNI mengawal pelaksanaan pemilu adalah pertaruhan terhadap tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

RIWAYAT HIDUP SINGKAT PENULIS

I. Data Pokok.

1. Nama : E. Hudawi Lubis
2. Pangkat : Mayjen TNI/29046
3. Tempat/Tgl. Lahir : Padang Sidempuan/07-08-1956
4. Agama : Islam
5. Status : Kawin
6. Sumber Pa/Th : Akabri/1980
7. Jabatan : Pangdam Jaya

II. Riwayat Pendidikan Militer.

A. Dikbangum.

1. Akabri : 1980
2. Sussarcab If : 1980
3. Suslapa II Inf : 1990
4. Seskoad : 1995
5. Sesko TNI : 2000
6. Lemhannas : 2006

B. Dikbangspes.

1. Sussar Para : 1981
2. Komando : 1981
3. Susjur Sar Pa Intel : 1984
4. Sus Gumil : 1987
5. Suspa Intelstrat : 1988
6. Sussa Bhs. Inggris : 1991
7. Sus Danrem : 2007

III. Riwayat Penugasan.

A. Dalam Negeri.

1. Ops. Seroja Tim-Tim : 1983
2. Ops. Seroja Tim-Tim : 1987
3. Ops. Aceh : 1991
4. Ops. Maluku : 2001

B. Luar Negeri.

1. Australia : 1983
2. USA (Seattle) : 1993
3. Singapura : 1993
4. Rusia : 1995, 2000
5. Thailand : 1996, 2000
6. Nepal : 1997
7. USA (Hawaii) : 1998
8. Turki : 2009
9. Brunai Darussalam : 2010
10. Pakistan : 2010

IV. Riwayat Jabatan.

1. Danton Grup-3 Kopassus
2. Pa Ops Grup-3 Kopassus
3. Danki Grup-3 Kopassus
4. Pa Intel Grup-3 Kopassus
5. Kaur Ops Susko Grup-3 Kopassus
6. Danden-3/22 Grup-2 Kopassus
7. Wadanyon-22 Grup-2 Kopassus
8. Danyon-12 Grup-1 Kopassus
9. Wadan Grup-3 Pusdikpassus Kopassus
10. Komandan Grup-4 Kopassus
11. Komandan Grup-2 Kopassus
12. Asops Kasdam IX/Udy
13. Paban II/Bindik Spersad
14. Danrem-043 Gatam Kodam II/Swj
15. Danpusdikter Pusterad
16. Waaspam Kasad
17. Asdep-2/IV Koordinasi Hanneg Kemenkopohukum
18. Danpussenif Kodiklat TNI AD
19. Pangdam XII/Tpr
20. Pangdam Jaya

PROFESIONALISME TNI AD DALAM MENYIKAPI TAHUN POLITIK 2014 DI WILAYAH ACEH



Oleh : Mayjen TNI Pandu Wibowo, SE
(Pangdam Iskandar Muda)

TNI AD sebagai salah satu garda terdepan dalam menjaga keutuhan NKRI akan memantau kubu-kubu partai politik, sehingga langkah antisipasi untuk menghindari konflik dapat diwujudkan. TNI AD mempunyai peran menjaga persatuan dan kesatuan NKRI khususnya di wilayah Aceh, dalam menyikapi perkembangan politik kedepan.

Pendahuluan.

Wilayah Aceh menjadi wilayah yang unik dalam pelaksanaan Pesta demokrasi lima tahunan atau Pemilu 2014, yang hanya beberapa bulan lagi akan segera dilaksanakan. Dikarenakan Aceh memiliki kekhususan tersendiri di banding dengan daerah lain dengan hadirnya Partai Lokal menjadi peserta Pemilu tahun 2014. Dalam era reformasi ini terlihat peranan rakyat sangat begitu penting di dalam mekanisme pemilihan anggota parlemen DPR dan pemilihan Presiden, berbeda dengan era orde baru, dimana intervensi pemerintah saat itu begitu kental dan kuat dalam mekanisme Pemilu. Saat ini perbaikan terhadap peraturan

undang-undang Pemilu lebih diperhatikan terutama dalam permasalahan yang terkait dengan masalah kampanye. Kampanye pada perkembangannya mengalami perubahan nilai-nilai dan perubahan gaya dalam menyampaikan visi dan misi kepada masyarakat, bermacam gaya komunikasi era orde baru berbeda dengan gaya komunikasi di era reformasi, kita bisa lihat dalam **Pemilu 2004 dan 2009, namun akan lebih berbeda untuk di tahun 2014**, dimana peranan media massa terutama elektronik menjadi begitu dominan dibanding komunikasi yang bersifat orasi.

Dari beberapa tahapan, KPU sudah memutuskan hanya ada 12 Partai Politik Nasional yang lolos menjadi peserta Pemilu 2014 yakni; Golkar, PDIP, Hanura, Gerindra, PAN, PKB, PPP, Nasdem, Partai Demokrat, PKB, PBB dan PKPI, khusus di Aceh terdapat 3 (tiga) Partai Lokal yang turut serta mewarnai sebagai peserta Pemilu 2014 yakni ; Partai Damai Aceh (PDA), Partai Nasional Aceh (PNA) dan Partai Aceh (PA), masing-masing Partai Politik baik Nasional maupun Lokal memiliki daftar calon legislatif baik untuk DPR, DPRD Propinsi maupun DPRD Kabupaten dan Kota.

Undang-Undang Pemilu Nomor 8 Tahun 2012 Pasal 83 menyatakan, kampanye Pemilu legislatif dimulai tiga hari setelah partai ditetapkan secara resmi sebagai peserta Pemilu dan berakhir saat dimulainya masa tenang. Artinya, sepanjang 11 Januari 2013 s/d 5 April 2014, sekitar 15 bulan, masyarakat akan menghadapi terpaan kampanye yang beragam kekuatan yang bertarung. Rentang waktu masa kampanye Pemilu 2014 ini lebih lama dibandingkan Pemilu 2009 yang berjalan hanya sekitar 9 bulan (5 Juli 2008 s/d 5 April 2009). Hal lain yang ada perbedaan adalah waktu pelaksanaan serta metode kampanye.

Perkembangan lingkungan strategis nasional pada tahun 2013 yang telah diwarnai oleh dinamika politik menjelang penyelenggaraan pemilu tahun 2014 yang telah memberikan julukan tersendiri yaitu **tahun politik** memberikan efek bahwa bangsa Indonesia mengalami "*point of no return*", yaitu demokratisasi harus tetap berlangsung dan diarahkan pada demokrasi substansial (*bukan demokrasi prosedural*) sebagai bagian dari integral pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Pemilu sebagai jalan untuk memulai sebuah kekuasaan karena dari sanalah pilihan rakyat banyak ditentukan. Intinya, Pemilu merupakan suatu

upaya untuk memenangkan hati rakyat. Pemilu juga merupakan satu sendi untuk selalu tegaknya sistem politik demokrasi yang bertujuan untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip demokrasi dengan cara memilih wakil-wakil rakyat di lembaga perwakilan rakyat dan Presiden serta Wakil Presiden. Pemilu 2014 sangat penting dan strategis bagi kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga pelaksanaan Pemilu harus berjalan aman dan tertib serta sukses.

Netralitas TNI Adalah Kehendak Rakyat.

Netralitas TNI sejatinya adalah merupakan kehendak rakyat Indonesia yang telah diamanatkan dalam Undang Undang nomor 34 tahun 2004 tentang TNI. Disamping itu netralitas TNI juga merupakan wujud nyata dari TNI bahwa TNI benar-benar tidak masuk dalam ranah politik praktis. Posisi prajurit TNI untuk tetap netral dalam Pemilu 2014 telah dituangkan dalam panduan Buku Saku Netralitas TNI. Upaya yang dilakukan oleh pimpinan TNI adalah suatu bentuk tanggung jawab TNI agar dalam Pemilu 2014 ini, TNI tidak dimasuki oleh intrik-intrik yang ingin menarik TNI masuk dalam kancah pertarungan politik yang sejatinya bila tidak diwaspadai dapat memecah soliditas dalam tubuh TNI. Untuk menjaga TNI tetap netral dalam pesta demokrasi, TNI sendiri telah manerbitkan Buku Saku, buku seukuran saku seragam prajurit TNI tentunya dibuat untuk menjawab kekhawatiran beberapa kalangan tentang netralitas prajurit TNI. Buku saku tersebut sebagai pegangan semua prajurit TNI yang meliputi ***pedoman, rambu-rambu, dan wewenang*** yang harus dipatuhi oleh setiap personel TNI aktif. Buku Saku Netralitas TNI bisa dikatakan suatu bukti dan

tekad TNI dalam melaksanakan amanat kehendak rakyat untuk tetap netral dalam pesta demokrasi ini, sehingga rasanya tidak ada alasan lagi bila nanti di lapangan ada prajurit yang tidak mengetahui tentang netralitas TNI. Sementara itu bagi para purnawiran TNI sendiri yang telah memiliki hak politik yang sama dengan warga negara Indonesia umumnya memiliki hak untuk memilih dan dipilih, demikian juga dengan keluarganya, serta keluarga dari TNI aktif, akan tetapi hak tersebut hendaknya jangan digunakan untuk memengaruhi para prajurit aktif terlibat dalam politik praktis. Sebab komitmen TNI sudah jelas untuk tetap netral dan tidak akan memberikan dukungan moral atau apapun kepada para purnawirawan TNI yang akan menjadi Presiden maupun Wakil Presiden pada Pilpres 2014. Secara emosional dan sosial TNI mempunyai hubungan, namun secara institusi maupun organisatoris tidak ada hubungan sama sekali sehingga jika ada anggapan bahwa para purnawirawan akan memanfaatkan TNI untuk kepentingan politiknya dan akan menggerogoti netralitas TNI sama sekali tidak beralasan.

Dipertegas dalam Tujuh Perintah dan Penekanan Presiden kepada Pimpinan TNI, pada **poin ketujuh perintah Presiden Indonesia tentang Netralitas TNI dalam Pemilu 2014, yang ditindaklanjuti oleh Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad)**. Bahwa Netralitas TNI merupakan amanah dan kehendak rakyat dalam pelaksanaan reformasi internal TNI sesuai Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Adapun pengertian dari netralitas TNI sebagai berikut : Netral : "Tidak berpihak, tidak ikut, atau tidak membantu salah satu pihak "Netralitas TNI : "TNI bersikap netral yang ***diimplementasikan*** dalam



kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis” didalam pelaksanaannya ada beberapa hal bisa penulis sampaikan **larangan** bagi prajurit seperti yang telah tercantum dalam **buku Netralitas TNI dalam Pemilu** antara lain **memberi komentar, penilaian, mendiskusikan, pengarahannya** apapun **berkaitan dengan kontestan Pemilu** kepada keluarga atau masyarakat, secara perorangan/fasilitas berada di arena tempat penyelenggaraan Pemilu, **menyimpan dan menempel dokumen, atribut**, benda lain yang menggambarkan identitas peserta Pemilu di instansi dan peralatan milik TNI, berada di arena Tempat Pemungutan Suara (TPS) saat pelaksanaan pemungutan suara, secara perorangan/satuan/fasilitas/instansi terlibat pada kegiatan Pemilu dalam bentuk berkampanye untuk mensukseskan kandidat tertentu/kontestan termasuk memberi bantuan dalam bentuk apapun di luar tugas dan fungsi TNI, melakukan tindakan dan atau pernyataan apapun yang dilakukan secara resmi yang bertujuan atau bersifat memengaruhi keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu), secara perorangan/satuan/fasilitas/instansi menyambut dan mengantar peserta kontestan, menjadi anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU), Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu), Panitia Pemilih, Panitia Pendaftar Pemilih, peserta dan atau juru kampanye, terlibat dan ikut campur dalam menentukan menetapkan peserta Pemilu baik perorangan atau kelompok partai, memobilisasi organisasi sosial, agama dan ekonomi untuk kepentingan Parpol atau calon tertentu, tidak melakukan tindakan dan atau membuat pernyataan apapun yang bersifat memengaruhi keputusan KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih).

Perbantuan TNI Terhadap Polri Dalam Pesta Demokrasi.

Tugas perbantuan TNI kepada Polri sendiri telah diatur oleh undang-undang yaitu UU 34/2004 tentang TNI dan UU 2/2002 tentang Polri. Aturan inilah yang memberikan garis tugas yang berbeda tetapi memiliki makna yang sama yaitu sama mengamankan situasi kondisi agar pelaksanaan Pemilu berjalan aman di tahun 2014.

Dalam menghadapi Perhelatan Pemilu di Aceh tidak terlepas dari pengamanan Pemilu yang menjadi tugas dan tanggung jawab kepolisian dalam mengawal keamanan dalam negeri, karena Polisi merupakan garda terdepan dalam penegakan hukum dan telah memiliki tugas dalam menjamin kondisi keamanan dalam negeri yang mantap agar keberlangsungan proses pembangunan nasional tercapai sesuai yang diamanahkan dalam pembukaan UUD 1945. Tetapi hal ini tidak begitu saja dibiarkan tanpa ada keterlibatan TNI didalamnya, tugas dan

fungsi TNI tetap dibutuhkan dan berada dalam tugas membantu Polisi menjalankan tugas pengamanan.

Polri dan TNI selaku aparat pemelihara keamanan dan pertahanan dalam negeri telah diberikan tugas dan tanggung jawab untuk mengamankan pelaksanaan Pemilu. Oleh karenanya segala upaya dan kegiatan diarahkan untuk mewujudkan situasi yang kondusif dalam negeri agar jalannya Pemilu yang aman dan damai dapat terselenggara dengan baik dan sukses.

Profesionalitas TNI AD Dalam Menyikapi Tahun Politik 2014 Di Wilayah Aceh.

Mencermati 7 (tujuh) Perintah Penekanan Presiden kepada pimpinan TNI pada **Point kedua adalah TNI yang diharapkan oleh rakyat adalah TNI yang profesional**. Disamping kegiatan reformasi yang masih berlangsung hingga saat ini tuntutan menjadi tentara profesional juga mengemuka saat sekarang ini. Tentara Profesional adalah tentara yang mahir menggunakan peralatan militer, mahir bergerak, dan mahir menggunakan alat tempur, serta mampu melaksanakan tugas secara terukur dan memenuhi nilai-nilai akuntabilitas. Dalam melaksanakan kebijakan pertahanan untuk menegakkan Kedaulatan negara, Tentara Nasional Indonesia sebagai alat pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia harus mempunyai peran dan tugas yang jelas agar dapat mempertahankan keutuhan wilayah dan melindungi keselamatan bangsa sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan. Profesionalitas dalam menyikapi tahun politik 2014, karena dinamika politik negara yang menyebabkan TNI AD memiliki peran penting dalam mengawal kondisi aman dan damai dalam negara, terutama dalam membangun sistem demokrasi yang baik dan benar. Profesionalitas TNI AD dituntut untuk tidak berpolitik praktis karena dinilai tentara hanya mengikuti politik negara dengan mengutamakan prinsip demokrasi supremasi sipil, HAM, ketentuan hukum nasional dan ketentuan hukum internasional yang telah diratifikasi. Sementara **supremasi sipil** yang dimaksud adalah bahwa kekuasaan politik yang dimiliki dan melekat pada pemimpin negara yang dipilih oleh rakyat melalui hasil pemilihan umum sesuai dengan asas demokrasi. Supremasi sipil dalam hubungannya dengan TNI berarti bahwa TNI tunduk pada setiap kebijakan dan keputusan politik yang ditetapkan presiden. Mekanisme ketatanegaraan menjadikan tentara yang profesional dituntut memiliki moral dan semangat pengabdian serta disiplin yang tinggi, bertanggung jawab dan menjunjung tinggi kehormatan militer.

Komitmen Profesionalitas TNI AD dalam mensukseskan Pemilu 2014 dapat diasumsikan bahwa sebagai prajurit yang bertugas mengawal tetap tegaknya persatuan dan kesatuan bangsa maka

TNI merasa memiliki rasa keteladanan, kepribadian dan tanggung jawab yang besar untuk membawa bangsa ini dari segala macam ancaman yang dapat mengacaukan jalannya pesta rakyat ini, sehingga kita menjadi bangsa yang berbudaya serta bermartabat untuk tidak saling adu kekuatan maupun *gontok-gontokan*. Beban tugas yang ditumpukan pada TNI dalam menjaga tetap tegaknya persatuan dan kesatuan bangsa dalam menghadapi Pemilu 2014 merupakan tugas berat, hal ini harus dibarengi dengan kesiapan membantu Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk membantu dalam bentuk pendistribusian kertas suara. Namun TNI tetap harus profesional, terlebih dalam menghadapi kenyataan akan keterbatasan alokasi anggaran yang tentunya sangat besar jika harus mendistribusikan kertas suara sampai ke daerah-daerah ***terpencil atau wilayah rawan konflik***. Semuanya tentunya sudah ada aturan mainnya, TNI dapat dengan matang merencanakan dan menghitung ketersediaan waktu, jarak antar lokasi, peralatan dan personel serta anggaran yang diperlukan. Tentunya saling pengertian sangat dibutuhkan dalam hal ini dengan pihak KPU. Walaupun memang bagi TNI, profesionalitas prajurit tidak semata-mata bersandar dan diukur dari ketercukupan anggaran, tapi didasarkan atas jiwa, semangat, dan nilai-nilai pengabdian yang tinggi.

Menyikapi tahun politik 2014 di wilayah Aceh, Profesionalisme TNI AD pada tahun 2014 ini diuji dalam rangka menghadapi tahun politik pesta demokrasi yang akan digelar sepanjang tahun 2014, kekhususan aturan leks specialist yang diterapkan di Aceh yang merupakan turunan dari Mou Helsinki yang menjadi UU Pemerintah Aceh Nomor 11 tahun 2006 menjadi tantangan bagi TNI AD di Aceh dalam menerapkan Politik Negara untuk mengamankan dan melaksanakan keputusan pemerintah Pusat dalam menegakkan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan tidak mengecilkan peran penting TNI AD di wilayah Aceh dalam menghadapi Pemilu 2014 Satuan Komando Kewilayahan dan Satuan Tempur serta Satuan Bantuan Tempur mempunyai tugas dalam menjaga profesionalisme TNI AD di wilayah Aceh.

Komando Kewilayahan. Tugas Komando Kewilayahan yang dilaksanakan dalam rangka persiapan penyelenggaraan Pemilu 2014 adalah dengan memberikan sosialisasi yang tepat kepada jajaran Kowil yang tersebar di wilayah Aceh guna tercipta situasi netral pada pemilu 2014 yang sudah dipedomani oleh prajurit TNI AD.

Komando Kewilayahan dalam melaksanakan tugasnya adalah dengan melakukan penanganan permasalahan teritorial di wilayah tugasnya secara cepat, cermat, cerdas, responsif, akomodatif, lintas sektoral, transparan dan berdasarkan prosedur hukum dan Hak Azasi Manusia (HAM). Apalagi

dengan telah diterbitkannya Inpres No. 2 Tahun 2013 tentang penanganan gangguan keamanan dan MoU antara TNI dan Polri, aparat Kowil harus berani dan tidak ragu-ragu bertindak mencegah konflik yang berkembang di masyarakat serta dalam mengatasi setiap permasalahan yang berkaitan dengan keamanan di wilayahnya.

Kerjasama TNI dan Polri dalam menjaga wilayah dan kondisi kesiapan menjelang Pemilu 2014 tetap terus dilaksanakan di Aceh, kerjasama Aparat Kowil dan Kepolisian dengan melakukan kerjasama keamanan ketertiban masyarakat (kamtibmas) melalui antara lain Siskamling bersama masyarakat. Menghidupkan kembali Siskamling atau jenis pengamanan yang sama untuk menjaga keamanan daerah dan warga setempat sudah seharusnya digalang kembali dan ini akan menjadi andalan kedekatan warga masyarakat dengan TNI/Polri di daerah.

Satuan Tempur dan Bantuan Tempur. Satuan tempur dan Bantuan tempur yang dimiliki oleh TNI melaksanakan tugasnya dengan tetap berlatih dan berlatih sesuai program TNI AD. Peran TNI dalam perbantuan kepada Polri tetap disiapkan oleh satuan-satuan di jajaran TNI baik diminta ataupun tidak diminta dengan melakukan latihan huru hara untukantisipasi terjadi kerusuhan.

Pengamanan dengan bentuk perbantuan ini tetap dihadirkan oleh TNI di satuan-satuan atau markas masing-masing daerah, artinya kesiapsiagaan tetap selalu terjaga, karena sewaktu-waktu dibutuhkan TNI sudah siap beroperasi melakukan tugasnya.

Peran Satuan Tempur maupun Bantuan Tempur dalam menghadapi pesta demokrasi mendatang adalah tetap menjaga profesionalisme sesuai fungsi masing-masing melalui latihan yang telah diprogramkan, juga harus memprioritaskan diri untuk berlatih dalam menghadapi setiap gejolak yang mungkin timbul sebagai eksese dari pelaksanaan pesta demokrasi tahun ini.

Penutup.

Tugas pokok TNI dalam mengawal terciptanya kondisi aman dalam dinamika berbangsa dan bernegara berdasarkan Undang-Undang TNI nomor 34 Tahun 2004 menegaskan bahwa tugas pokok TNI AD adalah menegakkan kedaulatan Negara dan keutuhan wilayah darat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia di wilayah daratan dari segala ancaman baik dalam maupun dari luar negeri.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, TNI AD memiliki tugas lain yang tidak kalah penting yaitu tugas perbantuan yang harus diberikan kepada Kepolisian dalam mengawal pengamanan dalam

negeri yang telah disusun dalam Undang-Undang TNI Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI dan UU Polri Nomor 2 Tahun 2002. Aturan main dan sistem perbatasan untuk keduanya telah disesuaikan berdasarkan undang-undang yang telah ada.

TNI yang keberadaannya tunduk kepada keputusan pemerintah pusat sebagai wujud sikap taat pada supremasi sipil dihadapkan pada kondisi pesta demokrasi yang akan digelar pada tahun ini akan mendukung sepenuhnya melalui sikap netralnya. Kondisi TNI menghadapi pesta demokrasi 2014 memiliki keharusan yang tidak bisa diganggu gugat lagi yaitu sikap netral TNI terhadap pesta demokrasi. Pada tahun politik ini netralitas TNI kembali diuji dengan menunjukkan sikap profesionalismenya

sebagai alat negara yang taat pada hukum yang berlaku.

TNI AD sebagai salah satu garda terdepan dalam menjaga keutuhan NKRI akan memantau kubu-kubu partai politik, sehingga langkah antisipasi untuk menghindari konflik dapat diwujudkan. TNI AD mempunyai peran menjaga persatuan dan kesatuan NKRI khususnya di wilayah Aceh, dimana dalam menyikapi perkembangan politik ke depan. TNI AD akan melihat bagaimana kubu-kubu politik ini dapat menyikapi pemilu, dengan arif dan bijaksana untuk saling menghormati dan menghargai satu dengan yang lainnya khususnya partai lokal, sehingga pesta demokrasi ini dapat memberikan suatu harapan yang besar di masa mendatang.

RIWAYAT HIDUP SINGKAT PENULIS

I. Data Pokok.

- | | |
|----------------------|-------------------------|
| 1. Nama | : Pandu Wibowo, SE |
| 2. Pangkat | : Mayjen TNI/29310 |
| 3. Tempat/Tgl. Lahir | : Cimahi/06-07-1956 |
| 4. Agama | : Islam |
| 5. Status | : Kawin |
| 6. Sumber Pa/Th | : Akabri/1981 |
| 7. Jabatan | : Pangdam Iskandar Muda |

II. Riwayat Pendidikan Militer.

Dikbangum.

- | | |
|----------------|--------|
| 1. Akabri | : 1981 |
| 2. Sesarcab If | : 1980 |
| 3. Suslapa If | : 1991 |
| 3. Seskoad | : 1995 |
| 4. Sesko TNI | : 2000 |
| 5. Lemhanas | : 2011 |

Dikbangspes.

- | | |
|------------------|--------|
| 1. Sussarpara | : 1980 |
| 2. Tar Korbantem | : 1984 |
| 3. Sus Pasi Ops | : 1986 |
| 4. Sis Binlatsat | : 1991 |

III. Riwayat Penugasan.

Dalam Negeri.

- | | |
|------------------|--------|
| 1. Ops. GHT Aceh | : 1981 |
| 2. Pam Pemilu | : 1982 |
| 3. Ops Tim-Tim | : 1984 |
| 4. Ops Tim-Tim | : 1991 |
| 5. Ops Tim-Tim | : 1994 |
| 6. Ops Tim-Tim | : 1996 |

IV Riwayat Jabatan.

1. Danton Yonif-113/Jaya Sakti
2. Danton 1/C Yonif-113/Jaya Sakti
3. Danki-C Yonif-113/Jaya Sakti
4. Kasi-2 Ops Yonif-113/Jaya Sakti
5. Kasi Ops Yonif-113/JS
6. Pama Kodam V/BRW
7. PS. Wadan Yonif-512 Rem-083
8. Wadan Yonif-512 Rem-083
9. Kasdim-0825/Banyuwangi
10. Pamen Kodam V/BRW
11. Danyonif-643 Rem-121/ABW
12. Danyonif Linud-612
13. Dandim-1621 Rem-163/WD
14. Dandim-0421/LS
15. Dandim-0410/BL
16. Wadan Grup C Paspampres
17. Waasops Paspampres
18. Dan Grup C Paspampres
19. Asops Paspampres
20. Aster Kasdam IM
21. Aster Kostrad
22. Paban IV Siapsat Sopsad
23. Irum Itjenad
24. Kasdam IM
25. Wadan Sesko TNI
26. Pangdam IM

SEBUAH PENDAPAT TENTANG : NETRALITAS PRAJURIT TNI AD PADA PEMILU 2014



Oleh Mayjen TNI Dody Usodo Hargo.S., S.I.P., MM
(Wadan Kodiklat TNI Angkatan Darat)

Walaupun para Prajurit TNI AD tidak menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu tahun 2014 ini, bukan berarti tidak tahu sama sekali tentang proses demokrasi tersebut. Melalui kegiatan Pembinaan Teritorial (Binter) sebagai salah satu fungsi utama TNI AD, maka Prajurit TNI AD tidak bersikap pasif dalam netralitasnya menghadapi Pemilu 2014, tetapi harus tetap melaksanakan tugas dan fungsinya agar proses demokrasi tetap berlangsung secara aman, tertib, dan lancar di wilayah tanggung jawab teritorialnya masing-masing.

Karakteristik bangsa Indonesia yang majemuk merupakan potensi konflik yang besar bila wawasan kebangsaan Indonesia terabaikan. Pemicu konflik adalah akibat dari dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu terjadinya perbedaan sistem tata nilai sosial budaya, benturan kepentingan ekonomi dan kesenjangan kesejahteraan, benturan kepentingan politik yang menjurus kepada perebutan pengaruh dan kekuasaan secara emosional dan egois.

Sebagai negara yang berdaulat dan bermartabat kebangsaan Indonesia, maka untuk menghindari dan mencegah potensi konflik tersebut negara telah mengatur tata kelola pemerintahan melalui proses demokrasi untuk menentukan dan memilih Wakil-Wakil Rakyat yang diharapkan dapat mewakili seluruh komponen bangsa dan mampu membawa aspirasi bangsa Indonesia yang majemuk, serta dengan memilih Pemimpin Nasional yang amanah untuk membawa Indonesia meraih cita-cita dan tujuan nasional seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Proses Demokrasi bagi Bangsa Indonesia bertujuan untuk memilih Wakil-Wakilnya yang akan duduk sebagai Anggota Legislatif di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dan memilih Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang akan menjadi Kepala Negara dan Wakil Kepala Negara dan juga sebagai Kepala Pemerintahan untuk menentukan arah dan tujuan pembangunan Bangsa Indonesia selama 5 (lima) tahun kedepan secara berkesinambungan.

Untuk mewujudkannya maka dilaksanakanlah Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) sebagai perwujudan proses demokrasi bagi bangsa Indonesia, dan telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum (Pemilu), diantaranya dijelaskan bahwa untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan juga memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Pemilu sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan Wakil Rakyat yang aspiratif, Pemimpin Nasional yang berkualitas dalam segala aspek, dan bertanggung jawab berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Diamanatkan dalam UUD 1945, bahwa Indonesia sebagai negara berdaulat yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dengan



berlandaskan Pancasila sebagai dasar Negara, maka dalam setiap kurun waktu 5 (lima) tahun sekali diselenggarakan Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) sebagai sarana untuk menentukan kepemimpinan bangsa 5 (lima) tahun kedepan. Seluruh komponen bangsa ikut berkewajiban untuk mengamankan dan mensukseskan terselenggaranya Pemilu tersebut, karena hasil Pemilu akan menentukan kelanjutan arah pembangunan dan kualitas Pemimpin Nasional bangsa Indonesia sesuai dengan tujuan dan cita-cita nasional yang diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945. Dengan demikian pelaksanaan Pemilu harus dijamin berlangsung secara aman, tertib, lancar, dan damai untuk mencapai sasaran yang diinginkan sesuai amanat Undang-Undang dengan mengedepankan prinsip-prinsip demokrasi, langsung, umum, bebas, dan rahasia, serta jujur dan adil tanpa dipengaruhi oleh tekanan maupun intimidasi dari siapapun juga terhadap para penyelenggara (Komisi Pemilihan Umum/KPU, dan Badan Pengawas Pemilu/Bawaslu), para pemilih maupun para kontestan yang dipilih dalam Pemilu dari tingkat Pusat sampai tingkat Daerah. Dengan demikian jaminan keamanan dan netralitas penyelenggaraan Pemilu menjadi kunci sukses terselenggaranya proses demokrasi bangsa Indonesia tersebut. Netralitas dan jaminan keamanan menjadi suatu keharusan dan sangat diperlukan agar proses demokrasi melalui Pemilu tersebut tidak dijadikan sebagai alasan pembenaran terjadinya kecurangan bagi para Caleg, Capres/Cawapres, dan Partai Politik (Parpol) kontestan peserta Pemilu Tahun 2014. Maka akan timbul pertanyaan, siapa yang harus menjamin netralitas dalam proses demokrasi melalui Pemilu tersebut? Maka jawaban dan

arahnya akan selalu ditunjukkan kepada institusi negara yang sampai dengan saat ini belum menggunakan hak pilihnya, yang selanjutnya diatur dalam Undang-Undang yaitu Tentara Nasional Indonesia/TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia/Polri.

Negara menjamin hak setiap warga negara untuk menyalurkan aspirasi politiknya, demikian pula halnya untuk para prajurit TNI, hanya ada aturan tersendiri yang digariskan oleh Panglima TNI bagi prajurit yang ingin terjun ke dunia politik, dengan tujuan untuk menjaga netralitas TNI dalam proses demokrasi bangsa tersebut. Apabila ada keinginan prajurit TNI AD yang akan menggunakan hak pilih,

yaitu hak untuk dipilih dan hak memilih dalam Pemilu ataupun Pilkada, maka sudah diatur melalui Surat Telegram Panglima TNI Nomor STR/546/2006 tanggal 22 Agustus 2006, yaitu harus membuat pernyataan mengundurkan diri dari dinas aktif (pensiun) sebelum tahap pelaksanaan Pemilu dan Pilkada berlangsung. ST ini tentunya berlaku juga untuk pelaksanaan Pemilu Tahun 2014 sesuai dengan tahapan Pemilu yang sudah diatur dalam Undang-Undang Pemilu.

Selanjutnya bagaimana Prajurit TNI AD menyikapi tuntutan netralitas tersebut? Sebagai Warga Negara Indonesia yang dijamin hak-haknya, maka Prajurit TNI AD memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan Warga Negara lainnya (masyarakat sipil), namun demikian untuk menjaga netralitasnya, maka sampai dengan terselenggaranya Pemilu (Legislatif dan Presiden) Tahun 2014 ini, Prajurit TNI AD tidak menggunakan hak pilihnya. Para Prajurit TNI AD sebagai bagian dari komponen bangsa secara konsekuen dan konsisten dengan profesionalitasnya harus dan harus menjaga untuk mengamankan suksesnya penyelenggaraan pesta demokrasi Pemilu tersebut. Seperti diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI pada bab II pasal 2 mengenai Jati Diri TNI, huruf d menjelaskan sebagai Tentara Profesional diantaranya TNI tidak berpolitik praktis. Pengertian tidak berpolitik praktis bahwa Tentara hanya mengikuti politik negara, dengan mengutamakan prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan ketentuan hukum internasional yang telah diratifikasi. Sehingga TNI hanya bertugas mengawal jalannya demokrasi negara agar dapat berjalan dengan aman, tertib dan lancar tanpa adanya gangguan yang dapat mengakibatkan

gagalnya proses demokrasi bangsa tersebut.

Mengutip penegasan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Budiman, S.IP saat melaksanakan kunjungan kerja ke wilayah Kodam XVI/Patimura di Ambon, Kasad menegaskan bahwa TNI AD akan bersikap netral dalam menghadapi Pemilu 2014 mendatang dan untuk 2014 sudah pasti kami TNI AD akan bersikap netral. Terkait dengan keluarga TNI AD yang memiliki hak pilih, maka sepenuhnya diserahkan kepada keluarga masing-masing untuk memilih secara cerdas (Ambon, Kamis 26 Desember 2013), demikian penegasan Kasad. Penegasan tentang netralitas TNI AD dalam Pemilu Tahun 2014 diulangi lagi oleh Kasad pada saat pelaksanaan Rapat Pimpinan TNI AD tanggal 15 Januari 2014 di Mabesad, diantaranya Kasad menegaskan tidak ada unsur pimpinan TNI AD yang bermain politik sendiri. Dari penegasan Kasad tersebut sangatlah jelas bagaimana sikap netral Prajurit TNI AD dalam menghadapi Pemilu tahun 2014 ini. Sampai dengan Pemilu tahun 2014 ini prajurit TNI AD tidak menggunakan hak pilihnya, akan tetapi anggota keluarganya yang berstatus sipil layaknya warga negara lainnya tentunya mempunyai hak untuk memilih. Sehingga sebagai warga negara Indonesia yang baik, maka prajurit TNI AD tetap berkewajiban untuk mengarahkan keluarganya untuk menggunakan hak pilihnya dan menyerahkan kepada keluarga masing-masing untuk menjadi pemilih yang cerdas, karena melalui Pemilu inilah rakyat Indonesia akan menentukan kelanjutan cita-cita nasional dan kualitas pemimpin nasional bangsa dan negaranya 5 (lima) tahun kedepan sesuai dengan amanat Undang-Undang.

Walaupun para Prajurit TNI AD tidak menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu tahun 2014 ini, bukan berarti tidak tahu sama sekali tentang proses demokrasi tersebut. Melalui kegiatan Pembinaan Teritorial (Binter) sebagai salah satu fungsi utama TNI AD, maka Prajurit TNI AD tidak bersikap pasif dalam netralitasnya menghadapi Pemilu 2014, tetapi harus tetap melaksanakan tugas dan fungsinya agar proses demokrasi tetap berlangsung secara aman, tertib, dan lancar di wilayah tanggung jawab teritorialnya masing-masing. Untuk mendukung keberhasilan kegiatan Binter tersebut, setiap aparat teritorial telah dibekali dengan 5 (lima) kemampuan teritorial sesuai dengan strata jabatan tugasnya, sehingga dalam menjalankan tugas dan fungsinya tidak keluar dari norma yang berlaku. Dengan demikian dalam menyikapi dan menghadapi proses demokrasi Pemilu 2014 di wilayah tugasnya masing-masing maka setiap prajurit TNI AD senantiasa mengedepankan sikap netral dalam mengikuti dinamika proses

demokrasi tersebut. Sikap netral Prajurit TNI AD dapat diimplementasikan dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Menguasai karakteristik wilayah tugasnya, pengertiannya setiap aparat teritorial selalu mengikuti perkembangan politik, mengetahui dukungan kekuatan Partai Politik dan Kontestan peserta Pemilu, serta dapat membuat peta politik di wilayah tanggung jawabnya. Dengan demikian satuan Teritorial dapat membuat prediksi kekuatan parpol dan prediksi kontestan pemenang Pemilu 2014 di wilayahnya dengan tanpa melibatkan aparatnya secara langsung, dan tidak menggunakan sarana prasarana serta fasilitas dinas militer lainnya, seperti asrama dan pangkalan TNI AD untuk memfasilitasi kegiatan kampanye ataupun kegiatan lainnya bagi para Calon Anggota Legislatif, Calon Presiden/Wakil Presiden, dan Parpol sebagai Kontestan peserta Pemilu Tahun 2014.

b. Senantiasa menyiapkan organisasi Satuan Tugas Pengamanan Pemilu dalam rangka mengantisipasi pelaksanaan tugas-tugas bantuan kepada Kepolisian dan Pemerintah Daerah dalam menjaga dan mengamankan berlangsungnya proses demokrasi Pemilu, jadi sifatnya hanya membantu dan bukan sebagai petugas keamanan yang terlibat langsung dalam lingkaran kepanitiaan penyelenggara Pemilu. Sedangkan tugas bantuan kepada Pemda dilakukan untuk memperlancar terselenggaranya Pemilu, dan tugas bantuan kepada Pemda dalam penyelenggaraan Pemilu tersebut, diantaranya dapat dilakukan dengan memberikan bantuan alat transportasi angkutan perangkat Pemilu dalam keadaan darurat dan mendesak atas permintaan Pemerintah melalui Kemendagri dan KPU, seperti pendistribusian kotak suara, dan kartu Pemilu ke daerah terpencil dan rawan, sehingga memerlukan bantuan alat transportasi TNI, baik melalui jalur darat, laut, dan udara. Bantuan transportasi tersebut bertujuan untuk menghindari keterlambatan pendistribusian ke Tempat Pemungutan Suara di daerah terpencil, daerah rawan gangguan keamanan dan atau untuk menghindari terjadinya sabotase dan gangguan dalam perjalanan di daerah rawan tersebut. Untuk unsur TNI AD dapat melakukan tugas bantuan tersebut atas perintah Kasad melalui rantai komando sampai tingkat pelaksana tugas di lapangan, jadi bukan atas inisiatif masing-masing satuan di lapangan, karena walaupun tugas tersebut harus dilaksanakan maka atas Keputusan Pemerintah.

c. Dalam menjaga netralitasnya maka seluruh Prajurit TNI AD tetap mempedomani Buku Saku Netralitas TNI yang diterbitkan pada tanggal 28

Agustus 2008 dan ditandatangani oleh Panglima TNI saat itu. Tidak memengaruhi keluarga (suami, istri dan anak) untuk menentukan salah satu Parpol dan Caleg ataupun Capres yang harus dipilih. Tetapi mendorong keluarga untuk menggunakan hak pilih dan hak suaranya adalah suatu kewajiban, karena satu suara akan ikut menjadi andil dalam menentukan nasib bangsa Indonesia 5 (lima) tahun kedepan.

d. Bagi seluruh Prajurit TNI AD yang berdomisili/bermukim di lingkungan masyarakat umum (diluar asrama militer) atau menempati rumah sendiri di lingkungan RT/RW adakalanya dipilih sebagai Ketua RT atau RW di lingkungan pemukiman tersebut, karena masyarakat umumnya ada kecenderungan lebih percaya terhadap prajurit dalam mengatur lingkungan RT/RW di pemukimannya dengan alasan bahwa prajurit memiliki tingkat kedisiplinan yang lebih dan bisa menjadi panutan warga. Kebiasaan yang berlaku dalam penyelenggaraan proses demokrasi Pemilu, maka perangkat pejabat di lingkungan pemukiman masyarakat dilibatkan sebagai Panitia Pemilihan Umum tersebut. Menghadapi situasi ini, maka seluruh prajurit TNI AD tidak boleh terlibat dan tidak melibatkan diri dalam kepanitiaan tersebut, walaupun hanya sebagai Panitia Pemilih Setempat (PPS) di Tempat Pemilihan Suara (TPS) di lingkungan RT/RW pemukimannya. Sekecil apapun peran dan fungsi keterlibatan oknum prajurit TNI AD dalam

kepanitiaan tersebut akan dipolitisasi menjadi isu hilangnya netralitas TNI secara keseluruhan.

e. Sekarang apa yang harus dilakukan oleh para unsur Komandan Satuan dalam menjaga netralitas prajurit disatuannya? Maka setiap Komandan Satuan jajaran TNI AD wajib mensosialisasikan netralitas TNI dalam Pemilu 2014 kepada seluruh prajurit dan keluarganya secara jelas seperti yang telah ditegaskan oleh Kasad, dan dapat diimplementasikan dilapangan. Artinya para unsur Komandan Satuan menguasai arti netralitas dan cerdas dalam menjabarkan kepada prajuritnya, sehingga seluruh prajurit TNI AD harus memahami dan mematuhi tentang semua larangan-larangan yang dapat melibatkan diri dalam kegiatan politik praktis. Disamping itu, maka Komandan Satuan juga wajib untuk mengecek dan mengawasi sejauhmana pemahaman anggota tentang netralitas tersebut, mengawasi kegiatan prajurit di lingkungan masyarakat untuk mencegah kegiatan yang terkait dengan politik praktis.

Demikian sebuah pendapat tentang Netralitas Prajurit TNI AD dalam menghadapi proses demokrasi Pemilu Tahun 2014, semoga bermanfaat bagi para unsur Komandan Satuan jajaran TNI AD dan dapat menjadi tambahan acuan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dilapangan guna menjaga netralitasnya. Selamat Bertugas !!!



RIWAYAT HIDUP SINGKAT PENULIS

I. Data Pokok.

1. Nama : Dody Usodo Hargo.S,S.IP.,
M.M
2. Pangkat/NRP : Mayjen TNI/29955
3. Tempat/Tgl. Lahir : Padang/05-03-1961
4. Agama : Islam
5. Status : Kawin
6. Sumber Pa/Th : Akabril/1984
7. Jabatan : Wadan Kodiklat TNI AD

II. Pendidikan.

A. Dikbangum.

1. Akabri : 1984
2. Sussarcab Inf : 1984
3. Diklapa Inf I : 1995
4. Diklapa Inf II : 1996
5. Seskoad : 2000
6. Suskatjemen Dephan : 2001
7. Susopsgab TNI : 2006
8. Sesko TNI : 2007
9. Lemhannas RI PPRA XLIV : 2010

B. Dikbangspes.

1. Sussarpara : 1983
2. Tar Danton Pemburu : 1984
3. Suspatih Infanteri/SPI : 1986
4. Suspa Senjata Bantuan : 1989
5. Tarkader Ter 1991 dan : 1996
6. Tar Kader Intel : 1997
7. Tar Binlat Intel : 1998
8. Sus Dan Yonif : 1998
9. Tar Pelatih Inti Raider : 2003
10. Sus Danrem : 2008

III. Riwayat Penugasan.

A. Dalam Negeri.

1. Ops Tim-Tim : 1985-1986
2. Ops Tim-Tim : 1986-1987
3. Ops Tim-Tim : 1987-1988
4. Ops Tim-Tim : 1990-1991

5. Ops Tim-Tim : 1991-1992
6. Ops Irian Jaya : 1996-1997
7. Ops Pamtas RI-RDTL : 2000
8. Ops Lihkam Darmil NAD : 2004-2005
9. Ops Pamtas RI-Malaysia : 2007-2009
10. Ops Pamtas RI-RDTL : 2009-2010

B. Luar Negeri.

1. Singapore : 1993 dan 2005
2. RRC : 2007
3. Malaysia : 2008 (3 KALI)
4. RDTL : 2009
5. Polandia : 2010
6. Belanda : 2010

IV. Riwayat Jabatan.

1. Danton-1/B/323/13 Kostrad
2. Danton-2/A/323/13 Kostrad
3. Danton-1/A/323/13 Kostrad
4. Danki Ban-323/13 Kostrad
5. Dankipan A/L-433/L-3 Kostrad
6. Kasilog-323/13 Kostrad
7. Dankipan C 323/13 Kostrad
8. Kasi Intel Brigif-13 Kostrad
9. Wadan Yonif-731 Kodam VIII/Tkr
10. Kasdim-1505/Halteng Kodam VIII/Tkr
11. Kasdim-1504/Ambon Kodam VIII/Tkr
12. Kasiwaslat Baglatsat Sdirbindiklat Pussenif
13. Dan Yonif-310 Brigif-15/Kujang Kodam III/Slw
14. Pabandyalid Sintel Kodam V/Brw
15. Dandim-0823/Stbd Kodam V/Brw
16. Wadan Rindam V/Brw
17. Dan Satgas Mobil Koops NAD
18. Dosen Gol IV Seskoad
19. Asops Kodam VI/Tpr
20. Danrem-161/WS Kodam IX/Udy
21. Pamen Den Mabesad (Dik Lemhannas)
22. Pamen Ahli Bid Ilpengtek Kodiklat TNI AD
23. Dankorsis Seskoad
24. Kepala Biro Persidangan dan Humas Setjen Wantannas RI
25. Wadan Kodiklat TNI AD

INDONESIA MEMANGGIL !

**SATU
SUARA
UNTUK
PERUBAHAN**



PEMILU DPR, DPD, dan DPRD
9 APRIL 2014

Pemilu di Luar Negeri:
30 Maret - 6 April 2014



SUKSESKAN PEMILU 2014!



TNI AD Membantu Pendistribusian Logistik Pilkada Jatim 2013